

**TOKOH-TOKOH BADAN PENYELIDIK USAHA-USAHA
PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA**

II

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA
1993**

TOKOH-TOKOH BADAN PENYELIDIK USAHA-USAHA PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA

II

Tim Penulis :

MPB. Manus
Zulfikar Ghazali
Susanto Zuhdi
Sumardi
Wiwi Kuswiah
P. Suryo Haryono
Triana Wulandari
Julinar Said

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA
1993

Koreksi Naskah :
Soejanto

Penyunting :
Zulfikar Ghazali

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Saya dengan senang hati menyambut terbitnya buku-buku hasil kegiatan penelitian Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, dalam rangka menggali dan mengungkapkan khasanah budaya luhur bangsa.

Walaupun usaha ini masih merupakan awal dan memerlukan penyempurnaan lebih lanjut, namun dapat dipakai sebagai bahan bacaan serta bahan penelitian lebih lanjut.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku ini masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dapat saling memahami kebudayaan-kebudayaan yang ada dan berkembang di tiap-tiap daerah. Dengan demikian akan dapat memperluas cakrawala budaya bangsa yang melandasi kesatuan dan persatuan bangsa.

Akhirnya saya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan proyek ini.

Jakarta, Januari 1993
Direktur Jenderal Kebudayaan



Drs. GBPH. Poeger
NIP. 130 204 562

PENGANTAR

Buku Tokoh-tokoh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa disebut BPUPKI merupakan salah satu hasil pelaksanaan kegiatan penelitian Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1991/1992.

Buku ini memuat uraian tentang biografi tokoh-tokoh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang boleh dikatakan sebagai tokoh-tokoh pendiri Negara Republik Indonesia. Tokoh-tokoh BPUPKI tersebut berjumlah 68 orang, sehingga proyek kemudian menerbitkannya dalam dua buku, yaitu Buku I dan Buku II dengan masing-masing buku memuat biografi 34 orang tokoh.

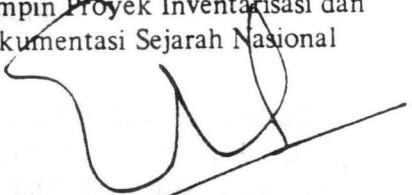
Pengungkapan riwayat hidup dan perjuangan tokoh BPUPKI dimaksudkan untuk menggali nilai-nilai luhur budaya bangsa, untuk dilestarikan dan dijadikan modal dasar dalam mencapai suksesnya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Penulisan biografi ini dimaksudkan pula untuk membangkitkan kesadaran sejarah bagi generasi penerus terhadap kepahlawanan para pendahulunya.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, namun kami berharap kiranya penerbitan buku ini dapat mem-

perkaya khasanah kesejarahan dan memberikan informasi yang memadai bagi masyarakat peminatnya serta memberi petunjuk bagi kajian selanjutnya. Kepada berbagai pihak yang telah membantu terlaksananya penerbitan buku ini kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, Januari 1993

Pemimpin Proyek Inventarisasi dan
Dokumentasi Sejarah Nasional



Dra. Sri Sutjiatiningsih
NIP. 130 422 397

PENGANTAR

Penulisan ini dimulai dengan keinginan mengetahui peran dan interaksi di antara tokoh-tokoh Badan Menyelidiki Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (kemudian Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia disingkat BPUPKI) secara biografis dan kontribusi mereka menjelang kemerdekaan Indonesia. Hal ini dihubungkan dengan upaya meningkatkan kesadaran sejarah dan cakrawala pengetahuan. Diharapkan dari ungkapan dalam karya tulis ini dapat menjadi sumber "acuan" dan informasi tentang tokoh-tokoh BPUPKI itu.

Sesuai dengan sumber utama yang dipergunakan karya tulis ini, terdapat enampuluh delapan tokoh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang diuraikan dalam Buku I dan II. Mereka terdiri atas dua "ketoea moeda" yang bertugas menjalankan atau menjaga aturan persidangan secara bergantian bahkan kadang kala dibantu oleh anggota tertua lainnya, enampuluh anggota BPUPKI yang pengangkatannya ditentukan oleh Jepang, dan enam orang lainnya yang diangkat oleh BPUPKI itu sendiri. Tentu menjadi catatan yang masih perlu ditelaah lebih dalam lagi yaitu bagaimana prosedur pengangkatan itu, terutama pada anggota tambahan, dan kenapa pihak tentara pendudukan Jepang tidak melarang atau mempersoalkannya dalam arena yang lain (baca : *Tjhou Sang-in*).

Namun demikian amat disayangkan bahwa tidak seluruh tokoh dapat ditelusuri data pribadinya secara lengkap maupun

ungkapan yang memadai dari pihak yang dekat dengan sumber. Amat diharapkan pada masa yang akan datang kelengkapan tersebut dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kupasan ataupun ungkapan dalam karya tulis ini dimungkinkan oleh kesediaan pimpinan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN) Depdikbud memberi kepercayaan kepada tim penulis untuk menelaah data berupa informasi dasar, pembicaraan atau pikiran di antara tokoh-tokoh tersebut. Di samping itu pada tempatnya pimpinan tim penulis mengucapkan terima kasih kepada pustakawan-pustakawan di beberapa instansi pemerintah atau lembaga swasta, termasuk juga beberapa pribadi tokoh segenerasi dengan tokoh-tokoh dalam BPUPKI itu, yang telah banyak memberikan petunjuk, peluang, waktu, dan tenaga sehingga amat menolong kelancaran tim penulis mewujudkan karya tulis ini.

Suatu karya tulis tentu mengandung kelemahan dari berbagai sisi atau visi pengamat dan pembaca lainnya. Karena itu pada tempatnya tim penulis mengulurkan tangan dan keterbukaan hati dan perasaan untuk menerima kritik, saran dan nasihat bagi perbaikan naskah ini di masa yang akan datang.

Jakarta, awal April 1992

DAFTAR ISI

Sambutan Direktur Jenderal Kebudayaan	vii
Pengantar	ix & xi
Daftar Isi	xiii
Pendahuluan	1
Catatan	7
Mr. Johannes Latuharhary	9
Mr. R. Hindromartono	16
R. Soekardjo Wirjopranoto	19
Haji Ahmad Sanoesi	30
Agoes Moechsin Dasaad	38
Mr. Tan Eng Hoa	41
Ir. RMP. Soerachman Tjokroadisoerjo	42
RAA. Soemitro Kolopaking Poerbonegoro	47
KRMTH. Woerjaningrat	50
Mr. A. Soebardjo	53
Prof. Dr. R. Djenal Asikin Widjajakoesoema	60
RM. Abikoesno Tjokrosoejoso	63
Parada Harahap	68
Mr. RM. Sartono	75
KH. Mas Mansoer	79
Drs. KRMA. Sosrodiningrat	85
Mr. R. Soewandi	88
KH. Abdul Wachid Hasjim	92
P.F. Dahler	99

Dr. Sukiman Wirjosandjojo	102
Mr. KRMT. Wongsonegoro	108
R. Oto Iskandar Di Nata	113
AR. Baswedan.	121
Abdoel Kadir.	127
Dr. Samsi Sastrowidagdo.	133
Mr. AA. Maramis.	136
Mr. R. Samsoeddin	141
Mr. R. Sastromoeljono	143
KH. Abdoel Fatah Hasan.	146
R. Asikin Natanegara.	148
GPH. Soerjohamidjojo.	149
Ir. P. Mohammad Noor	155
Mr. Mas Besar Martokoesoemo	157
Abdoel Kaffar.	159
Penutup.	161
Daftar Pustaka.	163
Lampiran.	174

PENDAHULUAN

Sejarah perjalanan suatu bangsa dipahami melalui usaha-usaha mengerti segala sikap, pandangan, pikiran yang menggambarkan cita-cita, keinginan ataupun dalam nuansa tertentu menggambarkan untuk pikiran di antara para pendiri bangsa tersebut. Di samping itu gejolak-gejolak yang ada dalam perkembangan masyarakat tersebut akan mudah dipahami dengan melihat kembali catatan dari telaah terhadap berbagai perdebatan dalam dimensi konsensus atau konflik dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi, sepanjang tidak memecahbelah bangsa tersebut ketika para pendiri negara membicarakan hukum dasar negara itu.

Dalam hubungan dengan keinginan mengetahui pikiran para pendiri bangsa dikemukakan dengan mengajinya melalui tokoh-tokoh yang terlibat dalam pembentukan Negara Indonesia merdeka itu di samping akan dikemukakan suatu perkembangan sejarah dari pengumpulan berbagai pikiran yang ada dan berkembang dalam lapisan masyarakat guna menyambut cita-cita yang diperjuangkan secara bersama itu. Bagian pertama akan dikemukakan perkembangan suatu organisasi di bawah pemerintahan pendudukan Jepang. Lembaga ini dibentuk setahun menjelang kejatuhan Jepang dalam Perang Pasifik. Lembaga ini memainkan peranan sesuai dengan maksud pendiriannya, sebagai penasihat bagi keperluan pemerintah kala itu, tetapi lembaga ini juga menggambarkan aspirasi yang ada dan ber-

kembang dalam masyarakat. Bagian lain adalah membicarakan lembaga yang walaupun dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang, tetapi mempunyai tujuan yang lebih jelas, bahkan lembaga ini tampil dalam menampung dan merumuskan hal-hal yang sudah lama dipendam itu, Indonesia Merdeka.

Sidang-sidang akhir *Tjuo Sang-in*

Setelah setahun kedatangannya di Indonesia, pemerintah pendudukan Jepang membentuk *Tjhuo Sangi-in*. Organisasi ini dimaksudkan untuk menampung partisipasi orang-orang Indonesia, terutama untuk mempromosikan kerjasama penduduk Jawa yang merupakan kunci penting dalam memperkuat pertahanan di wilayah Asia Tenggara.¹ Organisasi bentukan Jepang ini dimaksudkan juga untuk memberi jawaban atas pertanyaan *Saiko Shikikan* serta mengajukan usul-usul kepada *Saiko Shikikan*.²

Dalam kegiatan selama kurang-lebih dua tahun, *Tjuo Sangi-in* telah mengadakan delapan kali sidang. Empat sidang pertama lebih tertuju pada maksud menggalang kekuatan rakyat untuk mendukung kepentingan Jepang³, tetapi situasi dan perkembangan perang di Pasifik telah mendorong pihak pemerintahan pendudukan Jepang untuk memberikan janji tertentu kepada orang-orang Indonesia. Dalam sidang istimewa yang merupakan sidang kelima, disampaikan janji "Indonesia akan diberi kemerdekaan di kemudian hari". Pemberian janji ini belum memuaskan kalangan tertentu dalam *Tjhuo Sangi-in*. Mereka mulai memperlihatkan pandangan dan pendapat yang menegaskan tuntutan tentang janji kemerdekaan itu. Hal ini terlihat dalam sidang keenam dan ketujuh lembaga tersebut. Sejumlah pertanyaan dan pandangan yang dikemukakan dalam sidang-sidang ini semakin memperjelas tekad dan tuntutan atas janji kemerdekaan dari Jepang itu. Pada 1 Maret 1945 diberitakan tentang pembentukan Badan Menyelidiki Oesaha-oesaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan resmi oleh *Saiko Shikikan* pada 28 Mei 1945 sekaligus meresmikan badan tersebut. Susunan pengurusnya terdiri atas Badan Perundingan dan Kantor Tata Usaha. Badan

Perundingan diisi oleh seorang "ketoea" (orang Jepang)⁴, dua orang "ketoea moeda",⁵ dan 60 anggota terdiri atas orang-orang Indonesia asli, orang-orang yang mewakili golongan Indo-Belanda, orang-orang yang mewakili golongan Cina, orang yang mewakili peranakan Arab. Di samping itu terdapat beberapa orang Jepang sebagai anggota istimewa⁶.

Tjhou Sangi-in masih mengadakan sidang lagi yaitu sidang terakhir atau kedelapan, setelah pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) itu. Sedang ini berlangsung sebelum persidangan BPUPKI yang membicarakan masukan tentang dasar negara seperti yang dikemukakan Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Dalam hubungan ini perhatian masyarakat lebih tertuju kepada kemerdekaan, dan harapan-harapan sudah tertampung dalam lembaga yang baru dibentuk itu.

BPUPKI dan Kegiatan Utamanya

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, terlihat kehadiran BPUPKI tidak saja merupakan bagian dari janji kemerdekaan oleh pemerintah pendudukan Jepang, tetapi juga merupakan tuntutan yang mendasar dalam benak masyarakat Indonesia yaitu Indonesia Merdeka. Hal ini terlihat dari berbagai usaha dan kegiatan untuk menampung dan membulatkan tekad dan semangat yang sudah bergelora selama ini dalam hati sanubari masyarakat, bahkan kalangan BPUPKI sendiri melakukan terobosan tertentu. Perhatikan adanya penambahan anggota sebanyak enam orang pada sidang kedua (10 -- 17 Juli 1945) sebagai maksud menampung suara atau dukungan maupun keinginan masyarakat tertentu.⁷

Penambahan ini menurut Radjiman, "menguatkan kegiatan Badan Penyelidik" . . . "dan menambah pendirian" . . . "dalam menjalankan tugas badan penyelidik ini".⁸ Hal yang menarik adalah pandangan yang luas dari para pemimpin Indonesia dalam lembaga tersebut untuk mempertegas dan meneguhkan pendirian tentang cita-cita yang ada selama ini.

Jika diperhatikan komposisi anggota BPUPKI ini, terlihat sebagian besar mereka adalah anggota dari *Tjhuo Sangi-in*. Di samping anggota asal lembaga pembentukan Jepang itu, terdapat juga anggota BPUPKI yang semula merupakan penasihat pemerintah ketika itu. Dari sudut ini terlihat mereka itu tentu mempunyai kualitas terbaik dan cakap pada bidangnya, sebab para penasihat dalam pemerintahan Jepang tersebut merupakan orang pilihan. Di samping itu terdapat beberapa pegawai kantor pemerintah yang semula merupakan pegawai karir yang bekerja di zaman pemerintahan Hindia Belanda. Sisi lain lagi menunjukkan komposisi anggota BPUPKI diisi oleh kalangan yang berpengaruh luas dalam masyarakat (seperti tokoh-tokoh ulama Islam), juga pengisian BPUPKI memperhatikan lapisan atau golongan tertentu dari realitas pembagian masyarakat di zaman Hindia Belanda, yaitu adanya kalangan peranakan Indonesia, golongan keturunan Cina, dan golongan keturunan Arab. Secara sederhana keseluruhan anggota BPUPKI dapat dikatakan mewakili masyarakat atau penduduk Indonesia ketika itu. Di samping itu terlihat juga keterbukaan pihak Jepang dalam penambahan anggota baru yang sebagian besar merupakan lapisan terdidik dalam masyarakat Indonesia. Dengan demikian anggota BPUPKI selain mencerminkan masyarakat Indonesia asli yang beraneka ragam, juga menggambarkan perwakilan dalam kelompok "non-pribumi", dan yang penting lagi mereka ini berpendidikan menengah atas (setingkat HBS/AMS) atau pernah mengenyam pendidikan dalam bidang tertentu (bagi kalangan ulama Islam) pada tingkatan yang sama.

Dalam pada itu terobosan yang cukup jauh terlihat dalam laporan Soekarno, sebagai ketua Panitia Kecil⁹, dan dibenarkan oleh Radjiman, ketua BPUPKI¹⁰, yang mempersiapkan lebih jauh dari sekedar maksud pembentukan panitia yang dipimpinnya itu. Tentu menjadi pertanyaan, masalah apa yang dibicarakan dan menjadi terobosan besar itu?

Dalam penjelasannya di depan sidang kedua pada rapat 10 Juli 1945, Soekarno memaparkan hasil kerja panitia yang dipimpin-

pinnya itu. Pada bagian permulaan ia mengemukakan terdapat kurang-lebih 32 usul yang berpokok pada Indonesia Merdeka, tetapi yang lebih penting lagi adalah kesepakatan mereka (Panitia Kecil) dengan sejumlah anggota *Tjhuo Sangi-in* yang sebagian juga anggota BPUPKI dengan jumlah 38 orang untuk membentuk satu panitia¹¹ yang menghasilkan suatu rancangan pembukaan hukum dasar dari negara yang nantinya akan dibentuk. Dikemukakan pula oleh Soekarno bahwa rancangan yang dihasilkan itu merupakan kompromi yang mengikat dari kesepakatan antara pihak Islam dan pihak kebangsaan.¹²

Dalam perkembangan selanjutnya dari pembahasan terhadap rangkaian materi yang telah dikumpulkan oleh Panitia Kecil (delapan orang), dibentuk tiga panitia dalam tubuh BPUPKI itu.¹³ Masing-masing panitia mengemukakan pokok pikiran mereka dalam perdebatan tentang materi Undang-Undang Dasar dari negara yang akan dibentuk itu. Hal ini terlihat dari tolak-tarik di antara para anggota BPUPKI terhadap rumusan pengertian ataupun kalimat dalam menyusun bab-bab dan pasal-pasal termasuk ayat-ayat dari Undang-Undang Dasar itu.

Perdebatan yang dimulai dengan masalah bentuk negara, batas wilayah negara, dan seterusnya memperlihatkan kearifan para anggota BPUPKI untuk memilih bagian-bagian yang perlu dimasukkan dalam hukum dasar negara itu. Kadang kala memang terdapat silang sengketa pendirian di antara mereka, tetapi kebesaran dan kematangan jiwa serta sikap menenggang rasa (toleransi) yang cukup tinggi telah memudahkan usaha-usaha mencari solusi dari perbedaan yang ada itu.

Di samping itu terdapat kecenderungan kuat untuk mencapai kata mufakat (musyawarah) terhadap masing-masing pihak dari berbagai pandangan dan pendapat atas bagian-bagian dari hukum dasar negara itu, dan yang nantinya pada seluruh bagian dari Undang-Undang Dasar yang dibicarakan itu. Baik pimpinan sidang maupun para anggota BPUPKI bertekad mencari jalan keluar yang terbaik dengan tetap berargumentasi atas dasar pandangan dan pikiran tertentu dalam tingkatan pembicaraan di

antara para pembicara dalam persidangan BPUPIKI itu. Dalam hubungan ini terlihat ketajaman pikiran para anggota BPUPKI, di samping juga kesederhanaan, tetapi bukan simplistis, terhadap kemungkinan perkembangan masyarakat nantinya. Hal-hal semacam ini mungkin yang perlu dikembangkan di masa kini dan mendatang.

CATATAN

¹ Arniati P. Herkusumo, *Chou Sangi-in (Dewan Pertimbangan Pusat pada Masa Pendudukan Jepang)*. Jakarta : CV Rosda Jayaputra, 1984, hal. 29.

² *Ibid.*, hal. 29 -- 30.

³ Sidang pertama bertopik "*memperkuat tenaga* untuk kepentingan perang", sidang kedua bertopik "*penyempurnaan kekuatan di Jawa*", sidang ketiga bertopik "*memperdalam kesadaran dan persaudaraan di antara rakyat*", sidang keempat bertopik "*penyempurnaan hasil produksi dan memperkuat pembelaan rakyat*"; lihat *Ibid.*, hal. 45 -- 76.

⁴ Jabatan ini bersifat *ex-officio*, diperkirakan diisi oleh *Saiko Shikikan*, hal ini dengan melihat cara penentuan *Chuo Sangi-in*.

⁵ Kelihatannya merupakan wakil ketua, dan dalam realita salah satu menjalankan tugas sebagai ketua pelaksana (Radjiman) dan yang lainnya menjadi wakil ketua pelaksana (Soeroso).

⁶ Anggota istimewa tidak mempunyai hak suara. Dalam buku Sartono Kartodirdjo dkk, *Sejarah Nasional Indonesia* jilid VI adanya seorang Jepang (*shucokan* Cirebon yaitu Icibangase) yang menjabat wakil ketua pertama: sementara dalam buku

Yamin tercatat ada lima orang yaitu Myano, Tanaka, Matuura, Tokonami dan Nakamura, lihat Muhd. Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar*. Jakarta : CV Prapanca, 1959, h. 250-3.

⁷ Salah satu anggota yang diangkat, Abdul Kafar, mengemukakan kehadirannya sebagai wakil rakyat Madura, dan ia menyampaikan keinginan dari masyarakat yang "diwakilinya" itu, lihat Yamin, *ibid.*, hal. 194.

8. Yamin, *ibid.*, hal. 145.

⁹ Panitia ini dibentuk dengan maksud memeriksa usul-usul yang masuk dan menentukan kebulatan pendapat dalam BPUP-KI. Panitia diketuai oleh Soekarno dengan anggota Ki Bagoes Hadikoesoemo, KH. Wachid Hasjim, Mr. Muhd. Yamin, Mr. Sutardjo Kartohadikoesomo, Mr. AA. Maramis, R. Otto Iskandar Di Nata, dan Drs. Moh. Hatta), lihat lampiran.

¹⁰ Yamin, *op-cit.*, hal. 117.

¹¹ disebut Panitia Sembilan, terdiri dari Moh. Hatta, Muhd. Yamin, A. Soebardjo, AA. Maramis, Soekarno, KA. Kahar Muzakir, Wachid Hasjim, Abikusno Tjokrosoejoso dan H. Agus Salim.

¹² lihat Yamin, *op.cit.*, hal. 153 - 4.

¹³ lihat lampiran, dan pembentukan panitia ini, kalau diperhatikan keterangan Radjiman, mengikuti kebiasaan dalam *Tjuo Sangi-in*, yaitu pembentukan *Bunkakai* (panitia) dalam menjawab pertanyaan atau persoalan yang diajukan *Saiko Shikikan*.

MR. JOHANNES LATUHARHARY

Johannes Latuharhary lahir di Kota Saparua pada 6 Juli 1900. Ayahnya bernama Yan Latuharhary, seorang guru pada *Saparuasche School* yang kemudian menjadi *Hollands Inlandsche School* (HIS) sedangkan ibunya bernama Josefin. Johannes Latuharhary adalah putera sulung dari empat orang bersaudara.

Johannes memulai pendidikan sekolahnya di *Saparuasche School*, dengan Bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Selanjutnya dalam usia sembilan tahun ia pindah sekolah ke Kota Ambon dan memasuki *Eerste Europesche Lagere School* sampai tahun 1917. Sekolah ini sebenarnya khusus untuk anak-anak Belanda, tetapi karena ayah Johannes seorang guru, maka ia memperoleh kesempatan memasuki sekolah tersebut. Di Kota Ambon Johannes tinggal bersama dengan keluarga guru bersama Leihitu Tisera.

Selama delapan tahun Johannes tinggal bersama dengan keluarga Leihitu Tisera. Ia dididik juga untuk melakukan bermacam-macam pekerjaan rumah tangga seperti ke pasar, memotong kayu bakar, memasak, dan lain-lain. Pengalaman itu membuat Johannes terampil dan cekatan. Ia tidak canggung untuk hidup mandiri. Dengan bekal dasar pendidikan agama yang diperoleh dari ayah-bundanya, pengalaman hidup dari orangtua angkatnya sewaktu berada di Ambon, dan pendidikan serta pengajaran yang diperoleh di sekolah Johannes berangkat menuju Batavia (kini Jakarta) untuk melanjutkan sekolahnya.

Di Batavia ia memasuki HBS. Kerajinan, ketekunan, dan kecerdasannya membuat Johannes berhasil baik dalam studinya. Johannes juga dapat menguasai bermacam-macam bahasa asing antara lain Bahasa Belanda, Inggris, dan Jerman. Dalam bidang olahraga Johannes ikut serta memperkuat regu sepak bola di sekolah. Di bidang kesenian ia mengembangkan bakatnya sebagai seorang pemain biola. Dengan berbagai macam aktivitas, Johannes dapat mengembangkan bakatnya sebagai salah seorang pemain Hawaian Guitar yang pertama di antara pemuda-pemuda Ambon di Batavia. Selain itu hobinya adalah membaca buku.

Pada tahun 1923 Johannes menamatkan studinya di HBS, dan pada tahun itu juga ia berangkat ke Negeri Belanda. Di Leiden ia memasuki Fakultas Hukum. Pada tahun 1927 Johannes berhasil meraih gelar *meester in de rechten*. Johannes adalah putera Maluku pertama yang meraih gelar tersebut di Universitas Leiden.

Johannes Latuharhary kembali ke tanah air dengan membawa rekomendasi dari guru besarnya, Prof. Dr. Van Vollenhoven, seorang sarjana Hukum Adat yang terkenal serta mempunyai pengaruh besar terhadap Pemerintah Hindia Belanda. Dengan rekomendasi itu Latuharhary segera mendapat pekerjaan. Ia diangkat sebagai *ambtenaar ter beschikking* (pegawai yang diperbantukan) pada *President Van de Raad van Justitie* (ketua Pengadilan Tinggi) di Surabaya sejak 22 Desember 1927. Karena prestasi kerja dan tanggung jawabnya yang meyakinkan, maka Latuharhary diangkat menjadi *landrechter* (hakim) di Surabaya untuk beberapa waktu menjadi *grivier* pada *Raad van Justitie*. Ia bekerja selama dua tahun di kantor tersebut.

Surabaya pada waktu itu merupakan salah satu pusat Pergerakan Nasional yang penting. Di sana berkedudukan pusat Boedi Oetomo dan *Indonesische Studie Club* yang dipimpin oleh dr. Soetomo. Di Surabaya Mr. J. Latuharhary mulai aktif dalam Sarekat Ambon (SA) dan pergerakan nasional. Ide-ide dan perspektif baru yang dibawanya dari Eropa mulai dimasukkan dalam tubuh SA. Ide persatuan dan kemerdekaan bangsa Indonesia menjadi topik pembicaraan dalam diskusi-diskusi yang diadakan oleh organisasi tersebut. Ketika itu Latuharhary

menghadapi dua masalah yang penting; pertama, reorganisasi SA, dan kedua, penempatan SA dalam Pergerakan Nasional. Masalah kedua inilah yang perlu mendapat pemecahan dengan segera.

Reorganisasi SA dimulai dengan pembicaraan antara Mr. J. Latuharhary dari SA cabang Surabaya dan Pengurus Besar SA yang dipimpin oleh dr. Kayadu. Persetujuan dapat dicapai dengan dipindahkannya pusat SA ke Surabaya pada tahun 1928.

Pengabdian Mr. J. Latuharhary pada Pergerakan Nasional dimulai dari SA (Serikat Ambon), dilanjutkan dengan menjabat sekretaris pada PPPKI (Persatoean Perhimpoean Politik Kebangsaan Indonesia) dan kemudian menjadi anggota pengurus PARINDRA.

Pada 1 sampai 3 Januari 1932 Kongres Partai Indonesia Raya diadakan di Surabaya. Kota Surabaya diliputi suasana persatuan dan kesatuan. Di mana-mana terpancang poster-poster dan spanduk-spanduk untuk menyambut Kongres Partai Indonesia Raya itu. Utusan berdatangan dari berbagai daerah di tanah air, dan tidak ketinggalan utusan Sarikat Ambon dari daerah bagian Timur juga sudah hadir di Surabaya karena selain mengikuti Kongres Nasional, Sarikat Ambon juga akan ber-kongres.

Di hadapan tokoh-tokoh politik seperti Ir. Soekarno, Dr. Soetomo, Mr. Iskak, Mr. Sartono, Oto Iskandar Di Nata, Moh. Husni Thamrin, dan lain-lain, Mr. J. Latuharhary membacakan prasarannya yang berjudul, "**Azab Sengsara Kepulauan Maluku**". Ia menguraikan bagaimana Kepulauan Maluku ditaklukkan oleh bangsa Barat dan bagaimana VOC memonopoli perdagangan dan pelayaran honginya. Ia juga menggambarkan betapa kejamnya VOC yang merusak kehidupan ekonomi dan sosial sehingga rakyat Maluku hidup dalam kesengsaraan dan penderitaan. Dikemukakannya pula dalam prasaran itu tentang surat-menyurat antara Serikat Ambon di Ambon dengan para raja-raja di Kerajaan Maluku sebagai bukti rintangan atau kendala terhadap perjuangan Serikat Ambon.

Uraian Mr. J. Latuharhary itu mendapat sambutan meriah dari kalangan tokoh-tokoh nasional. Pers nasional memuji pendirian Mr. J. Latuharhary dengan Serikat Ambon-nya, tetapi Pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu menganggap Mr. J. Latuharhary sebagai seorang pegawai negeri yang tidak loyal.

Kedudukan Mr. Latuharhary sebagai ketua Pengadilan Negeri tidak dapat disatukan dengan kedudukan politiknya sebagai ketua Serikat Ambon dan Sekretaris PPPKI. Akibatnya tekanan-tekanan berat menimpa Mr. Latuharhary. Ultimatum diberikan kepadanya, memilih menjadi ketua Pengadilan Negeri dengan prospek karier yang menanjak atau memilih politik tetapi harus keluar dari dinas pemerintahan.

Setelah Mr. Latuharhary meminta pendapat kepada teman seperjuangannya dan meminta pertimbangan kepada isterinya, ia memutuskan untuk berhenti sebagai ketua pengadilan dan ke luar dari dinas pemerintahan kolonial. Ia mengirim telegram kepada pemerintah pusat di Batavia tentang sikapnya. Pemerintah Belanda mengabulkan permintaannya.

Dalam perkembangan selanjutnya Mr. Latuharhary menjadi advokat pembela rakyat Jawa Timur. Ia dan keluarganya masih menetap tinggal di Kraksaan sampai tahun 1934, walaupun ada kendala yang dihadapinya antara lain belum ada izin dari pihak pengadilan untuk muncul sebagai pembela dalam suatu sidang perkara. Sebagai sekretaris PPPKI dan mantan ketua pengadilan, ia banyak mengetahui bahwa para petani, pemilik tanah di Kraksaan, Probolinggo, Sutubondo, dan Jember dirugikan oleh pabrik-pabrik gula milik asing. Dengan perjuangan yang gigih Mr. Latuharhary dan petani-petani Jawa Timur memperkarakan kenyataan tersebut dan menang dalam perkara itu, sehingga pabrik-pabrik gula itu harus membayar sewa tanah yang sudah dipakai bertahun-tahun itu. Kemenangan Mr. J. Latuharhary sebagai advokat untuk membela rakyat kecil di Jawa Timur membuat namanya semakin terkenal. Dari daerah Banyuwangi dan Madura pun datang meminta bantuan kepadanya. Akhirnya Mr. Latuharhary terpilih menjadi anggota *Regentschapsraad* (Dewan Perwakilan Kabupaten) di Kraksaan

dan kemudian pindah ke Malang. Ia terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Provinsi Jawa Timur di Surabaya dan memasuki Fraksi Nasional. Keanggotaan itu dipertahankannya sampai tahun 1942.

Pada masa pendudukan Jepang, karena Mr. J. Latuharhary seorang tokoh Pergerakan Nasional dan pemimpin PARINDRA, maka Pemerintah Belanda mencurigai aktivitasnya. Akibatnya tiga kali ia harus masuk penjara. Berkat usaha dan perjuangan Ny. J. Latuharhary, tokoh ini dibebaskan sehingga dapat kembali berkumpul dengan keluarganya. Pada bulan September 1942 Mr. J. Latuharhary dan keluarganya pindah ke Jakarta. Di Jakarta Mr. Latuharhary bekerja di bidang sosial yaitu mengurus anak-anak dan isteri tentara KNIL yang terlantar dalam suatu organisasi yang disebut Badan Penolong Ambon Timur (BAPATI). Tujuannya adalah untuk meringankan penderitaan orang-orang terlantar itu dan mengamankan orang-orang Maluku serta Timor. Menjelang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Mr. Latuharhary menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Gagasan Latuharhary untuk mendirikan Negara Indonesia diungkapkannya dalam harian *Asia Raya* 9 Mei 1945 dengan judul, **"Empat Batoe Pengalas Penting Oentoek Gedoeng Negara Indonesia"**. Keempat hal itu ialah: (1) Persatuan Rakyat Indonesia, (2) Rumah Tangga Desa, (3) Perguruan, dan (4) Agama.

Seperti diketahui BPUPKI memberikan kesempatan untuk pembicaraan tentang bentuk negara (federal atau kesatuan), sifat konstitusi (sederhana dan sementara), dan mukadimah. Dalam perdebatan mengenai bentuk negara, Latuharhary mengusulkan bentuk *bondstaat*, sedangkan dalam hal mukadimah, Mr. J. Latuharhary tidak dapat menerima tujuh kata pada sila Ketuhanan, karena hal itu mempunyai konsekuensi yang sangat luas bagi para pemeluk agama yang bukan Islam, dan ini dapat mengakibatkan perpecahan. Latuharhary minta supaya di dalam UUD diadakan pasal-pasal yang jelas tentang hal ini. Ia menolak

pendapat Wachid Hasjim yang ingin mendirikan Negara Islam. Latuharhary mengemukakan bahwa usul tersebut membahayakan kesatuan dan persatuan Indonesia. Daerah-daerah Kristen seperti Maluku, Minahasa, dan lain-lain tidak akan bersedia menggabungkan diri pada Negara Islam.

Persoalan mukadimah yang berkesan mendirikan Negara Islam itu dapat diselesaikan oleh Mohammad Hatta dengan mengajak beberapa tokoh Islam dalam PPKI untuk membicarakan dan memperbaiki rumusan yang telah disetujui dalam BPUPKI sebelumnya.

Mr. J. Latuharhary hadir di antara pemimpin-pemimpin lainnya pada saat proklamasi dikumandangkan oleh Soekarno. Pada 19 Agustus 1945 PPKI bersidang. Salah satu keputusannya adalah Daerah Negara Indonesia dibagi delapan provinsi yang masing-masing dikepalai oleh seorang gubernur. Provinsi-provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil).

Maluku sebagai salah satu provinsi dikepalai oleh seorang gubernur. Untuk jabatan itu diangkat Mr. J. Latuharhary. Amat disayangkan kedudukannya terpisah dari daerah Maluku dan rakyatnya. Hal ini disebabkan keadaan politik dan kesukaran perhubungan waktu itu yang tidak memungkinkan tokoh nasional ini berangkat ke Maluku, apa lagi daerah itu telah diduduki Australia yang kemudian menyerahkannya kepada Belanda. Sementara itu di mana-mana didirikan organisasi-organisasi Pemuda Badan Perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan.

Pada 5 September 1945 di rumah Mr. J. Latuharhary, pemuda Maluku membentuk Angkatan Pemuda Indonesia Ambon (API Ambon). Organisasi ini telah banyak memberikan bantuan terhadap pemerintah yang dipimpin Mr. J. Latuharhary. Melalui seruan-seruan dan maklumat yang dikeluarkan organisasi ini, Mr. J. Latuharhary dapat menyadarkan dan mempersatukan rakyat daerah Maluku.

Dalam bidang politik Mr. J. Latuharhary hanya bergerak dalam kalangan atas. Ia tidak memiliki fanatisme partai. Ia

masuk PNI. Tokoh ini tidak menonjol sebagai pemimpin masyarakat, tetapi di kalangan pemimpin ia ikut menentukan kebijaksanaan politik PNI dan kebijakan politik negara.

Salah satu akibat persetujuan Linggarjati (1947) adalah dibentuknya RIS. Dengan sendirinya struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berubah pula. Dalam perundingan selanjutnya, Pemerintah RI didesak untuk menghapuskan alat-alat revolusinya yaitu jabatan para gubernur Daerah Seberang (Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil).

Sementara itu dalam kalangan seberang timbul inisiatif untuk membentuk suatu badan perjuangan pengganti lembaga gubernur yang telah dihapus yaitu "*College Seberang*". Organisasi ini diketuai oleh Mr. J. Latuharhary.

Dalam awal tahun 1950 suhu politik semakin panas ketika Mr. Dr. Soemokil dari Makassar (sekarang Ujung Pandang) melarikan diri ke Ambon yang disokong oleh sekumpulan tentara tertentu dan KNIL serta kaum reaksioner, terjadi suatu perubahan status kenegaraan yang bertentangan dengan UUD RIS dan kemauan dari sebagian besar rakyat Maluku.

Pada 25 April 1950 J. Manuhutu dan A. Wairisal dipaksa oleh Soemokil dan Manusama untuk memproklamasikan "Republik Maluku Selatan" serta menyatakan ke luar dari NIT dan RIS. Bagaimana pendapat Mr. J. Latuharhary tentang RMS itu? Pada 28 April 1950 ia mengeluarkan pernyataan sebagai mantan gubernur Maluku RI sebagai berikut:

Saja yakin bahwa rakyat Maloekoe Selatan pada umumnya dan di Ambon choesoesnja tidak menjetoedjoei dan tidak berdiri dibelakang proklamasi itoe (RMS) oleh karena bertentangan dengan semangat rakyat yang soedah berpoeloeh-poeloeh tahoen ditoedjoeikan kepada kemerdekaan seloeroeh bangsa Indonesia.

Mr. J. Latuharhary diangkat kembali menjadi gubernur Maluku dalam Negara Kesatuan RI, dan ia baru sampai di Ambon pertengahan Desember untuk memulai menjalankan tugasnya. Pada akhir tahun 1954 Mr. J. Latuharhary ditarik kembali ke Jakarta. Pada permulaan November 1959 tokoh perjuangan dari Maluku ini wafat dan dimakamkan di Taman Pahlawan Kalibata Jakarta.

MR. R. HINDROMARTONO

Raden Hindromartono lahir pada 31 Desember 1908, di Gunem (Rembang), Jawa Tengah. Berlatar keluarga bangsawan, pendidikan formalnya ditempuh di sekolah-sekolah pemerintah. Ia menyelesaikan pendidikannya di *Hollands Inlandsche School* (HIS) pada usia 15 tahun, kemudian melanjutkan ke *Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs* (MULO) dan lulus tahun 1926. Jenjang pendidikan menengahnya diselesaikan di *Algemene Middelbare School* (AMS) pada tahun 1929. Hindromartono memasuki perguruan tinggi dengan memilih bidang ilmu hukum pada *Rechtskundige Hoogeschool* (RHS) di Batavia (kini Jakarta) dan memperoleh gelar sarjana hukumnya dalam usia 28 tahun pada tahun 1936.

Sebagai seorang pelajar dan kemudian mahasiswa, Hindromartono telah menerjunkan diri dalam masyarakat dengan berbagai aktivitas sosialnya. Antara tahun 1929 sampai 1933, ia bekerja sebagai redaksi harian *Indonesia Raja*, dan dengan kegiatannya dalam organisasi pelajar menyebabkan ia diangkat sebagai ketua Perhimpoean Peladjar-peladjar Indonesia tahun 1933 sampai 1934. Setelah menyelesaikan sekolahnya, Hindromartono menunjukkan perhatian yang besar kepada dunia pendidikan dengan bekerja sebagai guru MULO dan AMS di Batavia. Setahun setelah meraih gelar kesarjanaannya, Mr. R. Hindromartono antara tahun 1937 sampai 1938 duduk sebagai anggota Dewan Kotapraja Batavia.

Tahun 1937 merupakan awal dari keterlibatan dan aktivitas Mr. R. Hindromartono dalam organisasi-organisasi buruh. Dimulai dengan memimpin Serikat Sekerdja Persatoean Pegawai Spoor dan Tram (PPST) dari tahun 1937 sampai 1942, juga sebagai pengurus besar Persatoean Pegawai Pelaboehan Kapal (PPPPK) hingga menjadi wakil ketua Persatoean Pegawai Petroleum Mij (PPPM) yang semuanya berkedudukan di Batavia. Sementara itu pesatnya kelahiran serikat-serikat sekerja di berbagai perusahaan partikelir, mendorong serikat-serikat sekerja di Kota Semarang untuk membentuk suatu federasi yang diberi nama Gabungan Serikat-serikat Sekerja Partikelir Indonesia (Gaspi). Sementara itu Gaspi Semarang yang masih bersifat lokal dan diketuai oleh Muhammad Ali mengeluarkan seruan agar di kota-kota lain dibentuk pula semacam federasi serikat-serikat sekerja. Imbauan tersebut disambut baik termasuk di Jakarta dan sebuah panitia vaksentral buruh partikelir didirikan dengan inisiatif tokoh-tokoh buruh Jakarta, antara lain Mr. R. Hindromartono yang kemudian duduk sebagai salah seorang pengurusnya.

Keperluan akan Gaspi yang tidak lagi bersifat lokal, akhirnya terwujud setelah diadakan konferensi di Semarang pada 26 dan 27 Juli 1941. Konferensi yang dihadiri wakil-wakil dari tujuh pengurus besar, 22 organisasi buruh setempat, dan dua Gaspi lokal membentuk panitia-panitia kerja untuk membahas berbagai hal yang berkenaan dengan vaksentral yang akan dibentuk, seperti kepengurusan dan struktur organisasi, tujuan, hak dan kewajiban anggota. Gaspi sebagai suatu organisasi yang merupakan wadah gabungan dari berbagai organisasi buruh dan Gaspi-Gaspi lokal, resmi dibentuk Mr. R. Hindromartono yang hadir sebagai wakil vaksentral buruh partikelir Jakarta. Di dalam kepengurusan Gaspi Hindromartono menjadi wakil ketua dengan RP. Soeroso menjadi ketuanya.

Kepercayaan Pemerintah Hindia Belanda terhadap Mr. R. Hindromartono sebagai tokoh buruh dan berlatar pendidikan ahli hukum, menyebabkan ia ditunjuk menjadi penasihat ahli dalam konferensi *International Labour Organization* yang akan diadakan di New York akhir tahun 1941. Penunjukkan tersebut

ternyata menimbulkan kontroversi, karena pemerintah sebelumnya tidak berkonsultasi dengan Gaspi maupun Perserikatan *Vakbonden* Pegawai Negeri (PVPN), di mana Mr. R. Hindromartono menjadi anggota pengurusnya. Kedua organisasi buruh tersebut mengadakan rapat bersama pada 28 September 1941, dan memutuskan untuk mengirim hasil rapat kepada Pemerintah Belanda di pengasingan di London. Menurut kedua organisasi, Mr. R. Hindromartono semestinya ditunjuk sebagai anggota delegasi bukan sekedar penasihat ahli, karena ia mewakili kepentingan buruh-buruh di Hindia Belanda yang jumlahnya melebihi buruh-buruh di Negeri Belanda.

Dalam masa pendudukan Jepang, tokoh pejuang nasib buruh ini duduk dalam BPUPKI sebagai anggota dan dalam panitia yang lebih kecil ia duduk sebagai anggota panitia Pembelaan Tanah Air.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan dan berdiri Negara Republik Indonesia, Mr. R. Hindromartono terpilih sebagai anggota Badan Pekerja Komite Nasional Pusat. Badan pekerja yang beranggotakan 15 orang ini dibentuk berdasarkan Maklumat X dari Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta, dengan fungsi sebagai kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar haluan negara serta bertanggung jawab kepada Komite Nasional Indonesia Pusat.

Sementara itu atas dasar pemikiran untuk memperluas partisipasi politik rakyat dan memperkuat perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan, pemerintah mengeluarkan Maklumat 3 November 1945 tentang pembentukan partai-partai politik. Mr. R. Hindromartono sebagai mantan aktivis organisasi buruh menyalurkan aspirasi politiknya pada Partai Sosialis, yaitu sebuah partai fusi dari Partai Rakyat Sosialis dengan Partai Sosialis Indonesia. Berdasarkan kongres fusi 16 sampai 17 Desember 1945, Mr. R. Hindromartono duduk dalam Dewan Pimpinan bersama-sama dengan Amir Sjarifuddin, dr. R. Soedarsono, Soepeno, dan Oij Gie Hwat.

R. SOEKARDJO WIRJOPRANOTO

Tokoh pejuang nasional ini dalam Sejarah Pergerakan Nasional sekitar tahun tigapuluhan, bersama-sama Mohammad Hoesni Thamrin, menjadi juru bicara ulung dari Fraksi Nasional di *Volksraad*. Salah satu gagasan yang dilontarkannya adalah Bahasa Indonesia secara resmi sebagai bahasa nasional. Hal ini sesuai dengan maksud Kongres Bahasa Indonesia di Surakarta (26 Juni 1938) yang menyepakati "Bahasa Indonesia Dalam Badan Perwakilan". Pada 14 Juli 1938, di *Volksraad* Soekardjo berpidato dengan menggunakan Bahasa Indonesia. Peristiwa ini menarik perhatian karena biasanya setiap anggota yang berbicara di *Volksraad* harus menggunakan Bahasa Belanda.

R. Soekardjo Wirjopranoto dilahirkan pada 5 Juni 1903 di Desa Kasugihan, Kecamatan Kasugihan, Kabupaten Cilacap Ia adalah putera keenam dari tujuh bersaudara keluarga Wirjodihardjo. Ayah Soekardjo bukan penduduk asli Desa Kasugihan, melainkan berasal dari Solo. Pekerjaannya sebagai mandor besar *Staatsspoor* (Jawatan Kereta Api) menyebabkan keluarga Wirjodihardjo selalu berpindah-pindah tempat. Ketika ditugaskan di Cilacap Wirjodihardjo memilih tempat tinggalnya 20 kilometer dari Cilacap yaitu di Desa Kasugihan, tempat ia meninggal dunia ketika Soekardjo telah berusia tiga tahun.

Sejak ayahnya meninggal dunia, Soekardjo dan saudara-saudaranya diasuh oleh ibunya yang berasal dari daerah Purwo-

kerto dan masih keturunan seorang alim ulama bernama Kiai Asmadi. Ibunya mempunyai sifat ikhlas dan taat beribadah. Walaupun ibunya seorang buta huruf, tetapi ia bertekad untuk memajukan putra-putrinya menjadi anak-anak pandai, berbudi luhur dan hidup bahagia. Ia memberi dorongan kepada anak-anaknya untuk belajar, karena hanya melalui pendidikanlah anak-anaknya akan maju. Ibunya juga berkeinginan keras untuk belajar membaca, menulis huruf latin, berbahasa Melayu, dan mengerti sedikit-sedikit Bahasa Belanda. Hal itu dipelajari dari anak-anaknya sendiri sehingga ia tidak merasa rendah diri dan berani menghadap kanjeng bupati dan asisten residen Cilacap untuk dapat membantu mewujudkan cita-citanya. Sifat-sifatnya yang keras dan berani menjadi kenangan bagi putra-putranya (Soekardjo kemudian mendirikan "**Yayasan Ibu Wirjodihardjo**" untuk menghormati ibundanya).

Semasa kecilnya, Soekardjo mempunyai keistimewaan yakni suka bercerita dan bermain dengan mengumpulkan teman-temannya sebayanya. Ia pandai bergaul dan banyak teman serta mempunyai rasa optimis yang besar sekali. Hal ini pernah diperlihatkan ketika suatu ketika ia bersama kakaknya, Subagio, berburu burung dengan "plintengan" (ketapil) di persawahan Desa Kasugihan. Karena keasikan kedua kakak-beradik ini tidak sadari bahwa mereka telah jauh dari desanya dan tidak ingat jalan pulang. Kakaknya sudah putus asa, tetapi Sukarjo justru bilang, "Mas, jangan takut, kita terus mencari jalan tadi". Tidak lama kemudian mereka menemukan kembali jalan semula. Sifat optimis ini diperlihatkan Sukarjo ketika duduk sebagai seorang pemimpin Parindra.

Pendidikan Soekardjo bermula dari *Europesche Lagere School* (ELS) di Kota Cilacap. Ia memasuki sekolah itu berkat keuletan ibunya meminta bantuan bupati Cilacap. Bupati Cilacap bersedia membantunya karena kakek Soekardjo yaitu ayah dari ibu Wirjodiharjo adalah penewu atau pegawai Kesunanan Keraton Surakarta. Di sekolah, Soekardjo tidak menonjol. Kecakapannya sedang-sedang saja. Ia menempuh *Klein Ambtenaar Examen*, yaitu ujian bagi anak-anak tamatan HIS dan ELS yang ingin bekerja sebagai pegawai Pemerintah Hindia

Belanda ketika itu.

Pada tahun 1917 Soekardjo menamatkan ELS dan melanjutkan pendidikannya di *Rechtschool* (Sekolah Hukum) di Jakarta. Hidup di kota besar dengan lingkungan yang berbeda dari desanya tidak membuatnya canggung, karena sudah terbiasa dengan didikan ibu dan pengalamannya sewaktu di ELS. Di samping menuntut ilmu ia mengembangkan bakat musiknya dengan baik dan sering mengadakan pertunjukan bersama teman-teman untuk kegiatan sekolahnya.

Pada tahun 1923 Soekardjo berhasil menamatkan sekolahnya di *Rechtschool*. Dengan ilmu yang dicapai, Soekardjo tidak mau lagi tergantung kepada bantuan ibunya, ia ingin mandiri. Untuk itu ia bekerja di Pengadilan Negeri Purwokerto sebagai pegawai yang diperbantukan.

Dalam tahun 1926, setelah berkeluarga, Soekardjo pindah ke Magelang. Di tempat yang baru ini mereka tinggal selama 40 hari. Waktu sesingkat itu menimbulkan tanda tanya. Hal ini berkaitan dengan adanya perselisihan antara Soekardjo dengan ketua Pengadilan Negeri Magelang, orang Belanda yang gila hormat. Ketika Soekardjo dan istrinya sedang jalan-jalan, mereka berpapasan dengan atasannya. Sebagaimana lazimnya, ia harus memberi hormat dengan menganggukkan kepalanya. Rupanya anggukan Soekardjo itu tidak diperhatikan oleh atasannya sehingga keesokan harinya ia dipanggil serta ditegur, mengapa sebagai bawahan tidak memberi hormat. Tokoh ini dengan berani mengatakan bahwa ia telah memberi hormat. "Kalau tuan tidak percaya, istri saya boleh dipanggil, bahkan waktu itu istri saya bertanya, mengapa saya menghormat Tuan?" Atasannya itu tidak mau mendengar alasan tersebut, sehingga Soekardjo harus pindah dari Magelang. Kejadian ini sangat membekas di hatinya. Ia merasa diperlakukan tidak adil, tetapi ia sadar bahwa dirinya berhadapan dengan kekuasaan pemerintah kolonial. Karena itu ia harus mengalah bukan untuk menang. Hal ini dibuktikannya ketika ia memimpin Kantor Pengacara "Wisjnoe" dan sebagai anggota *Volksraad*.

Lumajang merupakan tempatnya yang baru. Soekardjo diangkat sebagai pegawai negeri yang diperbantukan di Pengadilan

Negeri di kota tersebut. Kedudukannya sama dengan di Purwokerto. Ia bersama keluarga tinggal di Lumajang sejak tahun 1929. Pangkatnya dinaikkan, tetapi ia pindah ke Malang. Ia diangkat menjadi *lid Van de Landraad* atau anggota Majelis Hakim di kota tersebut.

Sebagai anggota Majelis Hakim, Soekardjo bekerja sangat tekun dan teliti, dan walaupun pangkatnya tinggi tetapi ia tidak sombong. Dalam menilai orang lain ia selalu menghubungkan dengan dirinya. Ia pun menyadari bahwa sebagai pegawai negeri, harus bekerja untuk kepentingan pemerintah kolonial, yakni pemerintah yang menjajah negerinya. Untuk itu ia selalu memikirkan nasib rakyatnya yang sedang dijajah, bahkan dengan keadaannya sekarang ia tidak bebas bergerak, karena itu setelah masa dinas di Pengadilan Negeri berakhir, ia mengajukan permohonan untuk ke luar dari dinas pemerintahan. Permohonannya itu dikabulkan oleh Pemerintah Hindia Belanda.

Sejak menjadi orang swasta, Soekardjo mendapat kesempatan lebih luas untuk mengemukakan pendapatnya. Ia pun dapat mewujudkan cita-cita nasionalnya yang telah lama terpendam. Langkah pertama ia mendirikan Kantor Pengacara bernama "Wijnoe". Ia bertindak sebagai pembela rakyat yang memerlukan bantuan hukum. Dengan demikian hubungan Soekardjo dengan dunia pengadilan belumlah putus sama sekali, bahkan dijalinnya secara lebih baik. Kalau dulu sebagai anggota Majelis Hakim Soekardjo menjatuhkan vonis atau hukuman, maka selaku pengacara Soekardjo berdiri di hadapan hakim untuk membela rakyat yang lemah dalam mempertahankan kebenaran.

Setelah berhenti sebagai pegawai negeri, ia aktif dalam lapangan politik di samping memimpin Kantor Pengacara "Wijnoe". Ia memimpin Boedi Oetomo cabang Malang. Sebagai ketua, tindakannya tegas, berwibawa, dan disiplin. Ia berpendirian, bahwa organisasi tidak dapat hidup tanpa ditunjang oleh anggota yang menyadari tujuan berorganisasi dan tujuan perjuangan bangsa secara keseluruhan, karena itu tindakannya yang pertama adalah memperbanyak jumlah anggota, mempertebal rasa nasional, dan harga diri sebagai bangsa serta percaya kepada diri sendiri. Pekerjaan ini tidak mudah karena sebagian

rakyat Indonesia masih buta huruf. Usaha menanamkan kesadaran nasional dan pemberantasan buta huruf dilaksanakan bersama-sama. Untuk memberantas buta huruf ia serahkan kepada istrinya, Siti Katidjah, sedangkan untuk menambah jumlah anggota dan mempertebal rasa nasionalisme, ia mendekati golongan priyayi (keluarga bangsawan), pegawai negeri bukan pamong praja dan polisi, kaum cerdik pandai dan guru-guru desa.

Pada tahun 1931 Soekardjo diangkat menjadi anggota *Volksraad* mewakili Boedi Oetomo. Untuk keperluan tugasnya ia bertempat tinggal di Jakarta. Sesekali ia menengok keluarganya di Malang.

Di Malang ia merupakan tokoh politik yang disegani baik oleh kawan-kawan maupun oleh Pemerintah Hindia Belanda. Untuk itu ia dipercaya memberikan penjelasan-penjelasan tentang susunan pemerintahan kolonial seperti *Volksraad*, *Provincialeraad* dan *Gemeenteraad*. Pada tahun 1930 ia diangkat menjadi *Wethouder/Loco Burgermeester* (Badan Pemerintahan Harian, Dewan Pemerintah Daerah). Karena keberhasilannya, maka ia dipilih menjadi anggota *Provincialeraad* (DPRD Provinsi) di Surabaya tahun 1931 dan menjadi anggota *Volksraad* (Dewan Rakyat) berkedudukan di Jakarta mewakili Boedi Oetomo. Namanya menjadi terkenal tidak saja di Jawa, tetapi juga di luar Jawa. Hal ini menarik perhatian dr. Soetomo sebagai ketua Persatuan Bangsa Indonesia (PBI). Soekardjo diharapkan memperkuat Fraksi Nasional di *Volksraad* bersama-sama mereka yang sudah ada dalam Fraksi Nasional seperti Moehammad Hoesni Thamrin, R. Oto Iskandar Di Nata, R. Pandji Soeroso, Mochtar bin Prabu, Abdoel Rasjid, Jahja, Wiwoho, Soangkoe-poen, dan Moehammad Noor.

Soekardjo menghendaki agar bangsa Indonesia bersatu baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar *Volksraad*. Wakil-wakil bangsa Indonesia yang duduk di *Volksraad* harus dapat menghayati aspirasi rakyat Indonesia secara keseluruhan. Perjuangan *Volksraad* tidak akan banyak berhasil jikalau tidak mendapatkan bantuan dari pergerakan politik di luar *Volksraad*, karena itu hubungan jiwa antara Fraksi Nasional di *Volksraad*

dengan tokoh tokoh pergerakan politik harus ditumbuhkan. Untuk keperluan ini, bilamana *Volksraad* sedang reses (tidak ada sidang) Soekardjo berkeliling untuk mengunjungi daerah-daerah.

Dalam tahun 1935 -- 1936, sebagai anggota *Volksraad*, ia mengunjungi beberapa negara di Asia seperti Jepang, Cina, dan Philippina. Karena kesibukannya di *Volksraad* maupun sebagai pemimpin Parindra yang banyak menyita waktu, maka ia jarang mengunjungi istrinya di Kota Malang itu. Sementara kesibukan yang ada tidak dapat menghilangkan kesepian yang dirasakan oleh Soekardjo. Ia memutuskan untuk membentuk rumah tangga kedua dengan Oemarjam Njotowijono. Mereka menikah di Madiun pada tahun 1943. Hubungan Siti Katidjah dengan keluarga Soekardjo tetap baik walaupun berakhir dengan perceraian.

Nama Soekardjo di Parindra sangat terkenal. Selain anggota *Volksraad*, ia juga sebagai komisi pers *Soeara Parindra*, yakni majalah Partai Indonesia Raja yang terbit setiap tanggal 20. Ia seorang politikus yang peka terhadap situasi serta kondisi masyarakat. Kemiskinan, kemelaratan, dan pengangguran yang merajalela dalam masyarakat sering dimajukan dalam sidang *Volksraad* dengan cara-cara yang sederhana. Ketenarannya meningkat saat persiapan berdirinya Gabungan Politik Indonesia (GAPI).

GAPI adalah federasi dari beberapa organisasi politik. Pada 4 Juli 1939 GAPI mengadakan konferensi pertama dengan semboyan, "Indonesia Berparlemen". GAPI menuntut perubahan ketatanegaraan, yakni mengubah status *Volksraad* menjadi parlemen yang sebenarnya, yaitu parlemen yang berdasarkan sendi-sendi demokrasi. Semboyan ini oleh Soekardjo dikumandangkan di *Volksraad*. Dalam mengemukakan tuntutan "Indonesia Berpalemen", Soekardjo mengemukakan dengan penuh semangat sehingga sering mendapat teguran dari polisi. Pada bulan Desember 1939 GAPI berhasil mengadakan Kongres Rakyat Indonesia I di Jakarta. Semboyan "Indonesia Berparlemen" menguasai kongres. Keputusan penting kongres antara

lain Bahasa Indonesia ditetapkan menjadi bahasa pergaulan resmi, Lagu Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan dan bendera Merah Putih menjadi bendera Indonesia. Menginjak tahun 1940 Sekretariat GAPI dipimpin bersama oleh Abikoesno Tjokrosoejoso (PSII), Soekardjo Wirjopranoto (Parindra), dan dr. Adnan Kapau Gani (Gerindo).

Peristiwa pemberontakan kapal *De Zeven Provinciën* yang timbul dari perasaan tidak puas kelasi dan bintanga bangsa Indonesia atas pemotongan gaji mereka, digunakan sebagai alasan oleh Soekardjo untuk menolak rencana Pemerintah Belanda memperkuat armada lautnya. Soekardjo dalam sidang *Volksraad* memajukan keberatan sosial-ekonomis dan politik-ideologis. Keberatan politik-ideologis berhubungan dengan kenyataan bahwa hingga saat ini cita-cita bangsa Indonesia untuk mendapatkan hak kedaulatannya belum terpenuhi. Yang penting, kata Soekardjo, bahwa setiap rencana yang disodorkan oleh Pemerintah Belanda kepada rakyat Indonesia harus mendekatkan bangsa Indonesia kepada kemerdekaan tanah airnya.

Begitu pula mengenai pengangguran, Soekardjo mendirikan suatu komite dengan nama Menoejoe Memberantas Penganggoeran Pemoeda (MMPP) di Kota Malang Jawa Timur. Dalam Kongres Indonesia Raya I di Surabaya tahun 1932, Soekardjo mengemukakan bahwa "Soal pengangguran adalah satu soal yang tidak dapat diabaikan, tetapi sedapat mungkin kita semua harus berikhtiar untuk menanggulangnya".

Dalam Kongres Bahasa Indonesia di Solo pada tahun 1938, Soekardjo yang duduk sebagai penasihat mengemukakan pemakaian Bahasa Indonesia di dalam dewan-dewan perwakilan. Untuk itu mulai bulan Juli 1938 Fraksi Nasional di *Volksraad* menggunakan Bahasa Indonesia dalam pemandangan umumnya. Mengenai pemakaian Bahasa Indonesia dalam badan perwakilan, kongres menyatakan antara lain, "Bangsa Indonesia akan musnah, jika anak buminya tidak mempergunakan lagi bahasanya yaitu Bahasa Indonesia", sebaliknya salah satu syarat untuk meninggikan Nusa dan Bangsa ialah memperkokoh Bahasa Indonesia. Hal ini wajib, sebab hal ini adalah salah satu identitas bangsa dan kita juga harus berbangga sebagai

suatu bangsa, karena kita mempunyai bahasa persatuan.

Tentang kemerdekaan pers disinggung pula oleh Soekardjo bahwa:

..... Pers dengan pergerakan rakjat itoe, tidak boleh dipandang ringan sebagai bahasa jang satoe dengan jang lain mempoenjai perhoeboengan djalan sadja, akan tetapi didalam hakekatnja Pers dengan pergerakan rakjat itoe adalah satoe badan belaka. Maka soedahlah mendjadi kewadjiban kita kaoem pergerakan seoemoemnja oentoek berdaja oepaja sekeras-kerasnja dengan segala kekoeatan dan kepandaian jang ada pada kita oentoek melawan Oendang-Oendang jang menjempitkan kemerdekaan Pers itoe. Hanja Pers jang ada ditangan kaoem pergerakan sadja jang dapat menjoearkan soeara "Indonesia Merdeka".

Soekardjo dalam tahun 1941 menjabat pemimpin surat kabar *Berita Oemoem* di Jakarta. Dalam permulaan masa pendudukan Jepang, Soekardjo menjabat pemimpin surat kabar *Asia Raya*. Ia juga menjabat anggota panitia Adat dan Tata-negara, di samping menjadi anggota *Tjhuo Sangi-in*.

Dalam perkembangan selanjutnya Soekardjo duduk sebagai anggota BPUPKI. Dalam rapat hari kedua, Soekardjo Wirjopranoto mengemukakan pandangannya mengenai mana yang akan didahulukan antara bentuk negara dan hukum dasar. Menurutnya, lebih dahulu dibicarakan preambuil hukum dasar. Soekardjo juga mengemukakan tentang azas Negara Indonesia Merdeka yang diidam-idamkan, yakni keadilan, kemerdekaan, dan kerakyatan. Azas ini pernah dikemukakan Soekardjo dalam sidang *Volksraad* bulan Juli 1938.

Soekardjo berpendapat bahwa kemerdekaan adalah senjata yang ampuh untuk mengalahkan musuh, dapat menyusun negara baru, menghilangkan kemiskinan, kemelaratan, dan kesengsaraan rakyat. Juga dikemukakannya pula tentang satu inti yang dapat menarik segala aliran, sebab Indonesia Merdeka atau bentuk Negara Indonesia hendaklah berbentuk satu rumah, sebab di dalam rumah itu semua orang betah, senang karena rumah sendiri. Juga dikemukakannya tentang bentuk pemerintahan. Bentuk Republik atau monarkhi satu sistem atau republik saja. Sebagai satu sistem tidak perlu mengikat kita, yang

penting baginya adalah persatuan. Negara Indonesia yang akan lahir harus berdasar persatuan.

Soekardjo dalam usulannya tidak mementingkan bentuk:

melainkan djiwanja, jaitoe manoesianja ataoe pemimpinnya me-roepakan bahan jang hidoep, sedang bentoek adalah bahan jang mati. Karena dari tangan pemimpinlah didjelmakan keadilan, kesoetjian, kesatoean, semangat dan dinamika. Djadi pemimpin ataoe Kepala Negara dipilih melaloei permoesjawaratan artinja dengan djalan gotong rojong. Dengan gotong rojong kita mengadakan Kepala Negara, mendjaga Kepala Negara, membentoek Indonesia Merdeka, mengalahkan moesoeh.

Bagi Soekardjo, gotong royong adalah bentuk yang cocok dengan kelakuan jiwa ketimuran yang asli. Juga di dalamnya terdapat sifat-sifat dinamika, gerak, dan kerja. Kekeluargaan adalah sifat asli bangsa kita. Jadi sesuai tentang pandangannya itu, Soekardjo memilih bentuk Republik untuk Negara Indonesia Merdeka.

Soekardjo duduk sebagai anggota panitia pembelaan negara. Dalam pembahasan mengenai UUD, Soekardjo tampil memberikan sumbangan pikirannya tentang warga negara. Menurut tokoh ini, dalam UUD cukup disebut pendek, bahwa **hal warga negara dan penduduk negara ditetapkan dengan Undang-undang**. Alasannya, dengan perumusan seperti itu perselisihan antara bangsa Indonesia dan orang yang bukan Indonesia dapat dihindarkan. Kata "**asli**" pada "Bangsa Indonesia asli" diganti dengan "bangsa Indonesia" saja. Soekardjo juga mengemukakan penajaman pengertian kewarganegaraan dengan penduduk negara.

Sementara itu, pendapat Abikoesno yang ingin memasukkan "semangat yang berkobar-kobar" di dalam "Sumpah Presiden", tidak disetujui oleh Soekardjo. Ia menghendaki Sumpah Presiden "**mengabdikan kepada Noesa dan Bangsa**". Alasan memilih kalimat tersebut, ialah karena orang Indonesia sangat terkenal sederhana, tajam dan penuh perasaan. Demikian pula terhadap pendapat Kiai Masjkoer tentang "wajib menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" di dalam konteks **wadajib se-andainja Presiden boekan beragama Islam**. Sementara itu, pen-

dapat Masjkoer tentang "Agama resmi bagi RI ialah Agama Islam". Soekardjo berpendapat bahwa seharusnya, **"Segala warga negara bersamaan kedoeodoekannya di dalam hukum dan pemerintahan"**, artinya tiap-tiap warga negara mempunyai hak yang sama di dalam penghidupan yang sudah tentu dilindungi oleh hukum dan pemerintahan, termasuk juga kesempatan untuk mengisi jabatan presiden.

Pandangan dan pendapat Soekardjo setelah proklamasi kemerdekaan yang cukup terkenal adalah, bahwa presiden dan wakil presiden harus merupakan satu "dwitunggal", maksudnya, Soekarno—Hatta adalah dwitunggal kita, pemimpin negara kita. Pendapat ini berkembang dalam masyarakat dan merupakan lambang persatuan bangsa Indonesia. Soekardjo diangkat sebagai juru bicara negara.

Ketika dibentuk kabinet yang bertanggung jawab kepada KNI, Soekardjo berhenti sebagai juru bicara negara. Ia kembali kepada profesinya, yakni dunia pers. Karier politiknya muncul lagi setelah terbentuknya Negara Kesatuan RI tahun 1950, Soekardjo diangkat menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh atas Negara Vatikan dan Republik Italia.

Pada waktu Kabinet Wilopo jatuh dan digantikan oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo, Soekardjo ditarik kembali ke tajah air untuk memimpin Direktorat Asia Pasifik di Kementerian Luar Negeri. Setelah Konferensi Asia—Afrika (1955) di Bandung, Soekardjo diangkat menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh untuk RRC merangkap kepala Perwakilan Diplomati pada Pemerintah Republik Rakyat Mongolia tahun 1957 -- 1960. Dalam masa selanjutnya Soekardjo diangkat menjadi wakil tetap Indonesia di PBB dengan tugas berat, yaitu harus memasukkan persoalan Irian Barat ke Sidang Umum PBB sehubungan dengan niat Pemerintah RI untuk memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah kesatuan Nusantara. Akhirnya persetujuan Indonesia - Belanda yang kemudian terkenal dengan "Persetujuan New York" yang berhasil ditandatangani 15 Agustus 1962.

Tokoh pergerakan nasional yang bekerja keras dengan penuh cita-cita perjuangan dan membuktikan tanggung jawab bagi pengabdian kepada nusa dan bangsa ini meninggal dunia setelah mendapat serangan jantung pada 23 Oktober 1962 di New York. Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata beberapa hari kemudian.

HAJI AHMAD SANOESI

Menurut beberapa sumber, Ahmad Sanoesi dilahirkan pada 3 Muharam 1036 Hijriyah atau 18 September 1889. Ayahnya bernama Haji Abdoerrahim bin Haji Jasin, seorang kiai dari pesantren Cantayan, Desa Cantayan, Kecamatan Cikembar, Kewedanaan Cibadak, *Afdeeling* Sukabumi. Ia merupakan anak ketiga dari isteri pertama. Sejak kecil Ahmad Sanoesi terbiasa dengan lingkungan agama dan kehidupan beragama (Islam). Sebagaimana umumnya anak seorang kiai, ia memperoleh perlakuan yang cukup istimewa baik dari para santri ayahnya maupun masyarakat di lingkungan pesantren itu. Kemauannya jarang ditentang, tetapi sebaliknya apabila tindakannya dianggap keliru dan menyalahi kaidah serta norma-norma agama, banyak orang memperingatkannya, bahkan mencegahnya. Bukan saja karena hal itu dianggap berdosa, melainkan juga dianggap dapat menjatuhkan nama dan martabat orang tuanya; karena itu, sebenarnya proses internalisasi terhadap masalah-masalah keagamaan telah terjadi sejak ia masih kecil, apa lagi ayahnya, seperti umumnya para kiai lain di Pulau Jawa, menginginkan anaknya menjadi seorang ulama seperti halnya dia, sehingga proses sosialisasi pun sudah dimulai sejak usia dini.

Pada mulanya Ahmad Sanoesi mendapat pelajaran dan pendidikan agama dari ayahnya. Setelah dianggap cukup dewasa, ia disuruh belajar di luar lingkungan pesantren ayahnya dengan maksud untuk memperluas pengalaman dan pergaulan.

Pada tahun 1909 Ahmad Sanoesi berangkat menuju Mekkah. Kepergiannya ke Mekkah selain untuk menunaikan ibadah haji, juga dimaksudkan untuk melanjutkan pendidikan agamanya. Diharapkan di kota itu ia dapat berguru pada para ulama yang ada baik ulama lokal maupun ulama pendatang yang bermukim di kota tersebut. Umumnya guru yang ia datangi adalah para ulama Syafiiyah, misalnya Haji Moehammad Djoenaedi, Haji Moechtar, Haji Abdoellah Djawawi, Seh Saleh Bafadil dan Said Djawani seorang mufti dari mazhab Syafii.

Selama bermukim di Mekkah, selain belajar dan memperdalam ilmu pengetahuan agama, Ahmad Sanoesi mulai berkenalan dengan masalah-masalah politik. Keterlibatannya dengan masalah politik iaawali dengan perjumpaannya dengan Haji Abdoel Moeloek di tahun 1913. Abdoel Moeloek memperlihatkan anggaran dasar (*statuten*) Sarikat Islam (SI) kepadanya dan mengajaknya untuk masuk organisasi itu. Setelah anggaran dasar itu dipelajarinya, ia setuju untuk bergabung. Keterlibatannya dalam masalah politik semakin nyata ketika pada tahun 1914 di Mekkah tersebar "surat kaleng" yang isinya menjelek-jelekkan SI. Isi surat itu antara lain menyebutkan bahwa SI sebenarnya bukan organisasi ummat Islam. Akibat tulisan ini, banyak jemaah dari Indonesia menjadi resah. Sebagai anggota dari organisasi itu, ia merasa terpenggil. Sanoesi menuliskan satu buku bersujud **Nahratoe'dharham** yang isinya membeberkan kebaikan dari SI. Selain menulis buku, Ahmad Sanoesi terlihat pula dalam perdebatan dengan beberapa ulama yang memang tidak begitu suka terhadap SI. Dalam kesempatan itu yang diperdebatkan tidak hanya menyangkut SI, melainkan juga masalah kepercayaan dan mazhab, seperti yang ia lakukan melawan para ulama dari kalangan Ahmadiyah.

Pada bulan Juli 1915 Ahmad Sanoesi kembali ke Cantayan, Sukabumi. Ia mulai membantu pekerjaan ayahnya mengajar para santri di pesantren itu. Dalam tahun itu pula ia diminta oleh Haji Sirod, presiden SI lokal Sukabumi, untuk menjadi penasihat (*adviseur*) organisasi itu.

Ahmad Sanoesi boleh dikatakan termasuk kelompok kiai tradisional. Dalam bidang tauhid, ia mengaku termasuk kalang-

an ahli *sunnah wal jamaah*, sedangkan dalam bidang *fiqih* mengikuti mazhab Imam Syafii. Meskipun demikian, dalam praktek-praktek keagamaan ternyata dia mempunyai beberapa pandangan yang berbeda, bukan saja dengan para pembaru, melainkan juga dengan sesama kaum tradisi, misalnya dalam masalah pengumpulan zakat, fitrah, dan masalah slametan.

Menurut dia, pengumpul zakat dan fitrah oleh para *lebe* atau *amil pakauman* yang kemudian disetorkan kepada *naib* dan seterusnya kepada *hoofdpenghulu* atau penghulu di kabupaten adalah salah kaprah. Masalah zakat dan fitrah adalah urusan umat Islam, bukan urusan pemerintah, apa lagi dalam peraturan pemerintah sudah ditegaskan bahwa pemerintah tidak akan ikut campur dalam urusan Agama Islam; karena itu zakat dan fitrah tidak perlu diserahkan kepada pemerintah, tetapi dikumpulkan kepada *amil* yang ditunjuk oleh masyarakat setempat, untuk seterusnya dibagikan kepada *mustahik* zakat (yang berhak menerima zakat tersebut). Fatwa ini mendapat reaksi keras dari para *punggawa pakauman*, sebab bukan hanya wibawa mereka merasa digugat, tetapi juga secara ekonomis mereka terpukul. Di Jawa Barat saat itu, masalah zakat dan fitrah ditangani oleh bupati melalui penghulu kepala, penghulu dan *punggawa* kaum bawahannya sampai ke *amil*. Khususnya para *amil* ini menerima 30% dari zakat dan fitrah sebagai gajinya, setelah sebagian disetorkan kepada penghulu sesuai dengan *quota* yang telah ditentukan.

Ahmad Sanoesi juga mempersoalkan masalah slametan (*dhiyafah*), yaitu upacara ketiga hari, ketujuh hari, dan seterusnya bagi orang yang telah mati, yang pada saat itu biasa dilakukan masyarakat. Menurut Ahmad Sanoesi, perbuatan itu hukumnya makruh, bahkan dapat menjadi haram hukumnya jika prakteknya dianggap sebagai ketentuan agama mengikuti waktu-waktu yang telah ditentukan tadi. Reaksi kuat terhadap ajaran seperti ini terutama datang dari pihak *pakauman*, khususnya dari Kiai Raden Haji Ujek Abdoellah. Perbedaan pendapat ini kemudian dicoba diatasi dengan mempertemukan langsung antara pihak Haji Ahmad Sanoesi dan pihak Raden Haji Ujek Abdoellah dalam satu majlis terbuka. Usaha itu berhasil di-

laksanakan pada bulan Maret 1921 di Kota Sukabumi. Peristiwa ini merupakan perdebatan terbuka pertama dalam satu majlis yang diadakan di Jawa Barat.

Salah satu fatwa Ahmad Sanoesi yang langsung diterjemahkan oleh para penguasa saat itu sebagai ancaman terhadap kedudukan mereka adalah mengenai **abdaka maoelana** atau penyebutan atau mendoakan nama bupati dalam kotbah Jumat. Menurut dia, penyebutan nama bupati dalam kotbah Jumat tidak perlu, sebab dahulu pun yang didoakan adalah pemimpin atau raja yang adil dan dalam konteks ibadah Islam, sedangkan mendoakan raja atau pemimpin yang lalim diharamkan; apa lagi para bupati yang berkuasa saat itu hanyalah pejabat pemerintah yang diangkat dan diberhentikan oleh orang kafir. Ia bukan lagi pemimpin Islam dan sama sekali tidak termasuk ke dalam konteks ibadah Islam. Ungkapan Sanoesi ini banyak dipakai oleh aktivis-aktivis SI di daerah Cianjur baik dalam propaganda maupun pengajiannya.

Karena sikap dan pandangannya itu, maka pengawasan terhadap dirinya semakin ketat. Berbagai upaya untuk menjeratnya ke penjara mulai dilancarkan pihak penguasa. Kesempatan itu pun akhirnya muncul, ketika pada tahun 1927 terjadi kerusuhan di dua tempat di wilayah *Afdeeling* Sukabumi. Pihak penguasa langsung saja mengalamatkan kerusuhan itu kepada Haji Ahmad Sanoesi. Walaupun tidak ada bukti, pihak penguasa setempat tetap bersikeras menahannya, bahkan kasusnya dengan cepat menarik perhatian para pembuat keputusan di Batavia saat itu. Akhirnya atas pertimbangan yang diberikan oleh gubernur Jawa Barat, *Adviseur Voor Inlandse Zaken*, *Procureur Generaal* dan *Raad van Indie*, gubernur jenderal memutuskan untuk menahan dan mengasingkan Ahmad Sanoesi ke *Bavatia Centrum*. Alasan utama pengasingannya itu adalah demi menjaga ketenteraman umum di Karesidenan Priangan. Ajaran yang difatwakannya dinilai oleh pihak penguasa dapat mempengaruhi sebagian masyarakat yang nantinya dapat menjadi satu ladang yang sangat subur bagi suatu paham yang revolusioner.

Walaupun diasingkan, Haji Ahmad Sanoesi ternyata masih tetap memelihara hubungan dengan rekan-rekan dan para pengikutnya baik secara tatap muka langsung maupun melalui tulisan-tulisannya, bahkan pada tahun 1931 dia mendirikan satu organisasi sosial keagamaan yang diberi nama **Al-Ittihadijatul Islamijah (AII)**.

AII didirikan untuk mengantisipasi masalah pendidikan agama dan politik yang berkembang di Hindia Belanda saat itu, namun dalam perkembangan selanjutnya, organisasi ini berkembang menjadi organisasi sosial yang paling militan di keresidenan Priangan dan Bogor. Aktivitas mereka tidak saja menonjol dalam masalah pendidikan agama, melainkan juga dalam pergerakan nasional. Misalnya, dalam suratnya 28 Agustus 1933, bupati Sukabumi melaporkan bahwa AII telah mengadakan kontak dengan "Pasundan", PI (Partij Indonesia – Partindo), dan PNI. Banyak para mualim dari AII yang merupakan pemimpin masyarakat di kampung-kampung bertindak sebagai pemimpin pemimpin PI dan PNI. Sebaliknya tidak sedikit anggota PNI Baru dan Partindo yang bertindak sebagai pengajar-pengajar di sekolah-sekolah AII. Arah politik AII sangat jelas dan sangat aktif, demikian kata bupati, yang menyimpulkannya dari artikel-artikel surat kabar *Soeara Moeslim* edisi Juli dan Agustus. Surat kabar tersebut menurut bupati dikeluarkan oleh AII. Selanjutnya menambahkan, bahwa dengan adanya pembatasan rapat-rapat bagi PI dan PNI, justru semakin memperbanyak anggota AII sehingga dikhawatirkan AII akan mengambil alih kegiatan kedua organisasi tersebut, karena itu banyak pemimpin atas di Batavia termasuk gubernur Jawa Barat, meminta agar masa penahanan Haji Ahmad Sanoesi di Batavia diperpanjang.

Pada 3 Juli 1934 gubernur jenderal mengeluarkan satu keputusan untuk memindahkan Haji Ahmad Sanoesi ke *Gemeente* Sukabumi dalam status tahanan kota. Pada bulan Agustus tahun itu juga, Ahmad Sanoesi membawa kembali keluarganya ke Sukabumi. Di tempat ini kemudian ia membangun pesantren yang diberinya nama "**Pergoeroean Sjamsul Oeloem**". Nama itu dalam perkembangannya ternyata tidak begitu dikenal masya-

rakat. Yang dikenal justru nama pesantren di Gunungpujuh. Pada 20 Februari 1939 gubernur jenderal mengeluarkan keputusan nomor 3 yang berisi pernyataan membebaskan Haji Ahmad Sanoesi.

Popularitas Haji Ahmad Sanoesi sangat berpengaruh pula pada perkembangan AII. Sebelum dia kembali ke Sukabumi, AII baru mempunyai 14 cabang. Dalam waktu empat bulan setelah ia berada di Sukabumi, organisasi itu berkembang menjadi 24 cabang, tersebar di daerah Priangan, Bogor, dan Batavia.

Ketika Haji Ahmad Sanoesi menerima pemberitahuan pembebasannya, saat itu bayangan Perang Dunia II sudah di ambang pintu, khususnya Perang Asia Timur Raya. Kemungkinan-kemungkinan akan masuknya Jepang ke Hindia Belanda sudah banyak dibicarakan, termasuk oleh Haji Ahmad Sanoesi. Perkiraan itu selain datang dari rekan-rekannya di MIAI ataupun dari para pengikutnya yang aktif dalam partai politik, juga ia peroleh dari hubungannya dengan beberapa Jepang muslim yang ada di Batavia. Hal ini terbukti antara lain sewaktu tentara Jepang memasuki daerah Sukabumi, banyak aktivis AII yang ikut membantu menunjukkan "pusat-pusat" pertahanan Belanda di daerah tersebut. Atas bantuan itu, menurut beberapa sumber yang dikutip oleh Muchtar Mawardi, Moehammad Abdoel Moeniam Inada, seorang Jepang yang beragama Islam, datang mengunjungi Haji Ahmad Sanoesi untuk menyampaikan terima kasihnya. Dalam kesempatan itu Inada atas nama pemerintah pendudukan Jepang mengajak kerjasama dengan Haji Ahmad Sanoesi.

Pada tahun 1943 Ahmad Sanoesi diangkat menjadi salah seorang pengajar pada badan latihan bagi para kiai dan ulama yang dibentuk pemerintah penjajahan Jepang. Pada awal tahun berikutnya ia ditawarkan menjadi anggota Dewan Penasihat Keresidenan Bogor (*Syuu Sangi Kai*). Ia mau menerima asalkan organisasinya yang telah dibubarkan Jepang dihidupkan kembali. Permintaan ini sebenarnya agak luar biasa mengingat pada akhir tahun 1943 Pemerintah Jepang baru saja membentuk Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) yang pada dasarnya hanya diberikan kepada Muhammadiyah dan NU. Ternyata

Haji Ahmad Sanoesi bersama dengan Haji Abdoel Halim berhasil "memaksa" pemerintah pendudukan Jepang untuk menghidupkan kembali organisasi mereka yang telah dibubarkan sebelumnya. Pada 1 Februari 1944 AII yang kemudian diubah namanya menjadi **Persatoean Oemmat Islam Indonesia (POII)** diakui resmi sebagai badan hukum oleh pemerintah pendudukan Jepang. Selanjutnya Haji Ahmad Sanoesi diangkat menjadi anggota Dewan Keresidenan Bogor dan sebagai wakil Masyumi dalam pertemuan umumnya 25 Mei 1944.

Satu hal yang cukup menarik terjadi pada akhir tahun 1944. Saat itu pemerintah pendudukan Jepang mengadakan perubahan penting di tingkat pemerintahan. Jabatan-jabatan baru di tingkat daerah banyak diberikan kepada para priyayi tingkat tinggi, tetapi justru salah satu jabatannya, yaitu wakil residen Bogor, diberikan kepada Haji Ahmad Sanoesi. Dengan demikian ia merupakan satu-satunya dari kalangan Islam yang menduduki jabatan eksekutif ketika itu.

Sewaktu Jepang membentuk Badan Persiapan untuk Kemerdekaan Indonesia, Haji Ahmad Sanoesi terpilih menjadi salah satu anggotanya. Dalam rapat BPUPKI 10 Juli 1945, Sanoesi mengajukan satu konsep negara yang disebutnya "imamat", yang tidak lain adalah bentuk republik.

Dalam pembicaraan masalah yang cukup sengit menyangkut agama, khususnya antara Haji Masjkoer, Kahar Moedzakkir dan Ir. Soekarno, Haji Ahmad Sanoesi memperlihatkan ketegangannya. Insinyur Soekarno mengusulkan perkataan, "menurut agamanya", yang juga diusulkan Haji Masjkoer, kemudian Kahar Moedzakkir mengusulkan diganti dengan perkataan yang tidak berbau agama. Untuk kedua usul itu Radjiman mengusulkan agar dipungut suara saja guna menentukannya. Di sini Haji Ahmad Sanoesi menolak usul pemungutan suara itu. Menurut dia, **"ada ataoe tidaknja perkataan menoeroet agamanja, Indonesia tetap akan merdeka"**. Jadi, supaya ditentukan saja, menerima usul Haji Masjkoer atau memakai usul Moedzakkir. Dia sendiri mengusulkan memakai perkataan, **"menurut agama"**. Ia sendiri tidak keberatan usulnya itu ditolak, yang penting ummat Islam harus mempunyai negara yang dimufakati. Selan-

jutnya dia juga menyatakan bahwa :

"dalam menerima oesoel jang dibitjarakan dalam sidang itoe, djangan asal menerima sadja. Sebab para anggota haroes memper-tanggoengdjawabkan tindakannja nanti. Boekan hanja kepada ketoea sidang, melainkan kepada rakjat jang 70 djuta, jang me-reka wakili. Oleh karena itoe, semoea oesoel haroes dibitjarakan sedjelas-djelasnja Siapa nanti jang akan bertanggung jawab kepada rakjat djika kesalahan soedah terdjadi di sini, anak tjutju kita! Djika pembitjaraan mengenai negara ini dibitjarakan seperti tadi, tidak moengkin terjadi soeatoe negara persatoean, melainkan ne-gara perpetjahan, meskipoen namanja negara persatoean".

Pada masa mempertahankan kemerdekaan (1945 -- 1950), Haji Ahmad Sanoesi duduk sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. Berkaitan dengan jabatannya ini, pada tahun 1948 ia harus pergi ke Yogyakarta setelah ditandatanganinya perjanjian Renville. Atas dasar perjanjian itu, daerah Sukabumi dinyatakan tidak lagi sebagai daerah Republik Indonesia.

Seusai perang kemerdekaan, ia kembali ke Sukabumi, namun ia tidak terlalu banyak mempunyai kesempatan untuk membangun kembali pesantren maupun organisasinya. Suatu keputusan politik yang cukup penting telah diambil tokoh pejuang Islam ini pada tahun 1949. Ia menolak Darul Islam yang diproklamasikan Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo. Ahmad Sanoesi meninggal dunia dalam tahun 1950.

AGOES MOECHSIN DASAAD

Tokoh perjuangan ini lahir di Sulu, Filipina pada 25 Agustus 1905. Pendidikan sekolahnya dimulai di Sekolah Rendah (diploma, 1918). Setamat sekolah rendah, ia melanjutkan sekolahnya ke Sekolah Dagang Singapura sampai tahun 1922. Setamat dari sekolah ini, ia mengembangkan dirinya dalam dunia usaha mulai tahun 1923 sebagai pembantu pemegang buku seperti *assisten boekhouder drukkerij Loa Mock en Coy*. Dalam tahun 1924 -- 1934 Dasaad menjadi penjual pada *The Anglo Egyptian Trading Coy*. Selanjutnya pada tahun 1926 -- 1934 ia menjadi pemimpin organisasi penjual *Soerabajasche Sigaretten Fabriek*. Setelah masa jabatannya selesai, pada tahun 1934 -- 1938 ia menjabat sebagai pemimpin organisasi penjual *Lausim Zecha en Coy* dan pada tahun 1938 ia menjabat kuasa *Malaya Import My Djakarta*. Pada bulan Agustus 1941 sampai 1943 menjadi *Fuku Gityoo Jakarta Tokubetu Si Sangi Kai* atau wakil ketua *Sangi Kai* Kota Khusus Jakarta. Dalam dunia usaha ia menjadi direktur pabrik tenun "Kantjil Mas".

Tokoh ini pernah mengungkapkan pendapatnya di surat kabar *Asia Raya* pada 27 April 1945. Ia mengemukakan pendapat tentang masih banyaknya kekurangan dalam lapangan ekonomi. Dikemukakan kekurangan itu seperti ungkapan berikut.

1. Indonesia Merdeka boleh dioempamakan sebagai satoe pemoda jang soedah dewasa, dan akan beroemah tangga sendiri. Oentoek bisa mengoeroes roemah tangga sendiri itoe perloelah memperhatikan soal penghasilan, ialah pendapatan oelang. Karena djika tidak mempoenjai penghasilan oelang, bagaimanakah bisa menoetoepi ongkos-ongkos hidoepnja, oentoek menjekolahkan anak-anaknja, dan lain-lain keperluan hidoep?

Begitoe djoega roemah tangganja satoe Negeri, jang terdiri dari riboean, berdjoeta-djoeta roemah tangga. Roemah tangga negeripoen perloe mempoenjai penghasilan-penghasilan. Dari penghasilan-penghasilan itoe bisalah dipakai oentoek kemakmoeran noesa dan bangsa.

2. Dari apa jang dioeraikan diatas ini, njatalah bagaimana perloenja oentoek memperhatikan, ja mementingkan dan mamedjoekan ekonominja satoe negeri. Karena dari sitoe akan bergantoeng kemadjoean dan terlahirlah kemadjoean-kemadjoean lain dilapangan pengetahoean. Poen kedodoekan satoe negeri diantara lain-lain negeri; djadi kedodoekan internasional) akan dipengaroehi oleh kedodoekan ekonomi dari negeri jang tersangkoet itoe.
3. Dalam hal ekonomi, bangsa kita masih banjak kekoerangan-nja, masih banjak jang haroes diperbaiki, masih banjak jang haroes dipelajarinja. Inilah soeatoe kebenaran jang tak boleh dan tak bisa dipoengkiri, baik oleh rakjat djelata maoepoen oleh pemimpin-pemimpin kita menimpakan kesalahan-kesalahan pada pihak jang lain. Adalah seriboe kali lebih baik oentoek sekarang, ja. Sekarang ini, memperbaiki apa jang salah, mempeladjar apa jang beloem diketahoei.
4. Indonesia Merdeka dengan soember-soember kekajaannja jang tak bisa habis, meroepakan satoe "tjintjin rantai" dalam lingkoeangan ekonomi itoe. Oleh karena itoe adalah perloe sekali bahwa moelai dari sekarang diperhatikan, soepaja bisa dibikin persediaan-persediaan seperloenja oentoek bisa mendjalankan penghidoepan ekonomi kita dikelak kemoedian hari, ja.
5. Dari apa jang terseboet diatas ini, mendjadi tegaslah soal kemakmoeran dan ekonomi itoe jang bisa kita hitoengkan setjara sederhana: Kemakmoeran negeri = ekonomi jang sempoerna. Ekonomi jang sempoerna = soember-soember bahan kesoeboeran tanah pekerdja-pekerdja jang pandai.

Tegasnja kemakmoeran negeri baroe bisa tertjapai djika ekonominja sempoerna. Ekonomi jang sempoerna bisa tertjapai djika ada bahan-bahan, kesoeboeran tanah dan dikerdjakan oleh pekerdja-pekerdja jang pandai.

6. Sebagai tadi soedah dikatakan kita soedah mempoenjai soember-soember bahan, dan tanah-tanah jang soeboer. Sekarang coema perloe pekerdja-pekerdja jang pandai. Dan di bagian ini djoestroe pada bangsa kita masih banjak kekoerangan. Kita maksoedkan boekan tidak ada orang-orang jang pandai, coema djoemlahnja beloem coekoep.

Kita beloem mempoenjai coekoep pemimpin-pemimpin indoestri, pemimpin-pemimpin peroesahaan pelajaran, pengangkoetan, ahli-ahli keoeangan, ahli-ahli organisasi perdagangan besar, pemimpin-pemimpin dilapangan pertanian, peternakan dan sebagainya.

Djadi soal jang haroes dipetjahkan adalah: mempoenjai coekoep orang-orang pandai dilapangan ekonomi itoe. Salah satoe ialah moelai dari sekarang ini memberi lebih banjak kesempatan oentoek itoe, sepertinja memboeka koersoes-koersoes dan sekolah-sekolah dagang jang praktis, jang se-soeai dengan toejoean itoe.

Tegasnja sekolah-sekolah dan koersoes-koersoes itoe djangan semata-mata oentoek mendidik djoeroe toelis-joeroe toelis, typist-typist dan pemegang boekoe sadja. Tetapi sebaliknja oentoek mendidik tjalon-tjalon pemimpin ekonomi.

Saja insjaf, bahwa apa jang dioeraikan diatas itoe, tidak akan memetjahkan sama sekali soal jang terpenting ini. Dalam hal itoe masih banjak jang haroes dikerdjakannja. Tetapi hal diatas sedikitnja beroepa satoe rantjangan bekerdja jang praktis jang bisa dengan tjepat dilakoekan.

Dalam BPUPKI, peranan AM. Dasaad tampil dalam jabatannya sebagai ketua komisi pemungutan suara untuk memilih bentuk kerajaan atau republik dalam perdebatan tentang bentuk negara yang akan didirikan itu. Dasaad juga duduk sebagai anggota panitia (*bunkakai*) keuangan dan perekonomian BPUPKI yang mempersiapkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia merdeka.

Dalam perkembangan masa, Dasaad lebih tampil sebagai pengusaha nasional dan teman baik Presiden Soekarno. Ia memimpin sejumlah perusahaan yang memegang lisensi tertentu.

MR. TAN ENG HOA

Tan Eng Hoa dilahirkan pada tahun 1907 di Semarang. Ia pernah menempuh pendidikan di HBS yang diselesaikan pada tahun 1925. Kemudian melanjutkan ke *Rechtschool* yang diselesaikan pada tahun 1932.

Tan Eng Hoa adalah salah satu anggota BPUPKI. Dalam persidangan badan tersebut, Eng Hoa tampil dengan usulnya memperbaiki kausal tentang hak-hak dasar manusia dari rancangan yang dihasilkan oleh Panitia Kecil dalam BPUPKI itu. Kelihatannya Eng Hoa memperhatikan betul perlunya dimasukkan hak-hak dasar (baca: kebebasan berkumpul, berserikat, berpikir dan sebagainya) tersebut ke dalam UUD yang dibicarakan BPUPKI itu.

IR. RMP. SOERACHMAN TJOKROADISOERJO

Ir. Raden Mas Panji Soerachman Tjokroadisoerjo dilahirkan pada 30 Agustus 1894 di Wonosobo. Ayahnya, Raden Mas Tumenggung Surjoadikoesoemo, merupakan generasi ketiga keturunan keluarga bupati Wonosobo pertama, Raden Mas Adipati Ario Djajadiningrat. Sebagai bagian dari keluarga Priyayi, Soerachman memperoleh pendidikan mengenai kedisiplinan, kejujuran dan rasa hormat terhadap adat-istiadat dan tradisi kebangsawanan Jawa tetapi pendidikan yang sangat membentuk karakter Soerachman adalah kebiasaan keluarga mereka untuk melepaskan putera-puterinya bergaul dengan anak-anak dari keluarga rakyat kebanyakan. Ditambah dengan pelajaran Agama Islam yang diperolehnya, Soerachman tumbuh menjadi seorang remaja yang menghargai sikap demokratis dalam pergaulannya sehari-hari.

Sebagaimana putera-puteri bangsawan lainnya, Soerachman memperoleh kesempatan untuk menikmati pendidikan Barat yang dilaksanakan Pemerintah Kolonial Belanda. Seperti diketahui, sistem sosial di masa kolonial bersifat diskriminatif, sehingga kebutuhan masyarakat pribumi Hindia yang sangat mendasar, yakni pendidikan setinggi-tingginya, hanya dapat diperoleh golongan bangsawan saja. Realitas demikian mendorong semangat belajar Soerachman untuk membuktikan bahwa sebagai pelajar pribumi ia dapat lebih pandai dari pelajar Eropa. Hal ini terbukti ketika Soerachman diterima bersekolah di seko-

lah-sekolah pemerintah atas dasar kecerdasannya. Sejak bersekolah di *Eropeesche Lagere School* hingga menyelesaikan pendidikannya di *Hoogere Burgerschool* Batavia (1915), Soerachman menjadi murid terpandai dan berhak mendapatkan biasiswa.

Berkat kepandaianya itu, di tahun 1915 Soerachman memperoleh biasiswa pemerintah untuk melanjutkan pendidikannya di Negeri Belanda. Ia mengambil jurusan Teknik Kimia di Sekolah Tinggi Teknik Delft. Tidak seperti para mahasiswa Hindia lainnya di Negeri Belanda yang melakukan berbagai kegiatan organisasi, Soerachman lebih berkonsentrasi untuk menyelesaikan kuliahnya. Pilihan Soerachman untuk lebih mengutamakan kuliahnya merupakan sesuatu yang wajar, karena segera setelah menyelesaikan studinya (1920), dengan bekal ilmu yang diperolehnya, Soerachman segera mengabdikan diri demi kemajuan bangsanya.

Kembali dari Negeri Belanda, Ir. Soerachman segera terjun sebagai praktisi yang bekerja dalam bidang yang sesuai dengan disiplin ilmunya, yakni memimpin laboratorium kimia di Bandung dan laboratorium Kebun Raya Bogor.

Di tengah rutinitas tugas-tugas kerja, Ir. Soerachman tetap bersimpati dan terus menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh pergerakan seperti Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, dan Mr. Sartono. Posisinya sebagai pegawai pemerintah menyebabkan Ir. Soerachman berhati-hati dalam berhubungan dengan kaum pergerakan. Tetapi kedekatannya dengan kaum pergerakan terlihat dengan tidak dapat melepaskan dirinya dengan segala aktivitas kaum pergerakan dan ketika diadakan Kongres Pemuda tahun 1928, Ir. Soerachman menjadi salah seorang donaturnya.

Sebagai ahli kimia yang mencintai rakyat banyak, Ir. Soerachman, dalam upaya meningkatkan taraf ekonomi mereka, mencoba memodernisasikan teknologi tradisional industri batik dan perak rakyat Yogyakarta. Sekitar empat tahun lamanya, Ir. Soerachman mengabdikan diri untuk memajukan industri kecil rakyat Yogyakarta.

Pada tahun 1936, Ir. Soerachman ditempatkan di Batavia pada Departemen Perekonomian. Di mana pun ditempatkan, ciri sebagai intelektual pemikir yaitu sifat inovatifnya untuk menelurkan konsep-konsep pembangunan perekonomian, selalu tampak dalam diri Ir. Soerachman. Salah satu konsepnya untuk mendorong industri kecil rakyat adalah gagasan untuk mendirikan koperasi-koperasi sebagai tempat penjualan barang-barang hasil industri kecil rakyat. Menurut tokoh ini pemerintah perlu melindungi industri rakyat dan koperasi-koperasi tersebut dengan cara meringankan pajak, pengontrol harga padi, mendistribusikan bibit bagus, sehingga petani terhindar dari praktek-praktek sistem ijon.

Insinyur Soerachman menyadari kesulitan yang dialami industri kecil rakyat, karena mereka harus pula bersaing dengan industri yang dikelola orang-orang Belanda. Selain itu impor berbagai barang industri Jepang menyaingi industri kecil rakyat. Upaya yang pantas dilakukan, menurut Ir. Soerachman, agar industri rakyat tetap hidup ialah dengan jalan mempermudah rakyat memperoleh pinjaman dari bank.

Peranan Ir. Soerachman untuk memajukan perekonomian rakyat di masa Pemerintah Hindia Belanda tidak luput dari perhatian Pemerintah Militer Jepang. Keahlian yang dimiliki Ir. Soerachman menyebabkan Pemerintah Militer Jepang memintanya untuk bekerja di Departemen Perekonomian. Ia juga anggota Pusat Kesenian di masa pendudukan Jepang dan anggota Majelis Pertimbangan Poetera. Soerachman terpilih untuk duduk di BPUPKI sebagai anggota.

Setelah proklamasi kemerdekaan, Soerachman diangkat sebagai menteri urusan ekonomi. Langkah pertama yang diambil Ir. Soerachman adalah menasionalisasikan perusahaan-perusahaan milik asing dan menetapkan berlakunya tanda pembayaran yang sah. Tantangan yang dihadapi Soerachman juga berkaitan dengan upaya perlucutan senjata yang dilakukan pihak Sekutu, yakni keharusan menyediakan segala keperluan bagi pihak sekutu termasuk akomodasi untuk kamp-kamp tahanan. Karena hal ini berkaitan dengan hukum internasional, maka Soerachman memprioritaskan hal tersebut.

Karena Pemerintah Indonesia mengalami kesulitan moneter saat itu, maka dalam kedudukannya sebagai menteri keuangan (Kabinet Sutan Syahrir) Soerachman pada bulan Oktober 1946 mengeluarkan uang kertas (dikenal dengan sebutan Oeang Republik Indonesia, ORI) untuk menggantikan mata uang pemerintah pendudukan Jepang. Setiap seribu rupiah uang Jepang ditukar dengan satu rupiah ORI. Untuk mengatur nilai tukar ORI dengan valuta asing, dibentuklah Bank Negara Indonesia.

Kecerdasan Ir. Soerachman menjadikan ia selalu cepat mengantisipasi situasi ekonomi republik. Ketika terjadi aksi militer I tahun 1947, keadaan ekonomi dalam negeri menjadi kacau, pusat pemerintah dan dipindahkan ke Yogyakarta, dan para pegawai pemerintah yang menetap di Jakarta mengalami berbagai kesulitan ekonomi. Agar para pegawai tersebut tetap bekerja di instansi pemerintah serta dengan penghasilan yang tetap mencukupi, Ir. Soerachman mendirikan *NV. Handel Maatchappi Intraport* dengan menampung para pegawai pemerintah untuk merangkap bekerja di perusahaan tersebut. Ide ini memperoleh izin dari pemerintah. Lapangan usaha badan tersebut meliputi industri kerajinan rakyat, pelayaran kapal, pertanian, perdagangan kopra, perak dan makanan.

Setelah berhenti sebagai pegawai pemerintah, Ir. Soerachman melibatkan diri dalam dunia usaha swasta dan mengabdikan diri dalam dunia usaha swasta dan mengabdikan diri dalam dunia pendidikan sebagai tenaga pengajar di Institut Teknologi Bandung yang telah dilakukannya sejak 1949. Seperti biasanya ia tidak pernah menolak tugas yang dipercayakan kepadanya, terutama bila menyangkut kepentingan bangsa. Berdasarkan Undang-Undang Darurat 7 Tahun 1950, dibentuklah Balai Perguruan Tinggi RIS yang merupakan peleburan antara Balai Perguruan Tinggi RI (didirikan 19 Agustus 1945) dengan *Universiteit van Indonesia*. Di sini Ir. Soerachman dipercayakan menjadi presidennya. Menjelang akhir hayatnya, tenaga dan pikiran Ir. Soerachman masih dibutuhkan pemerintah. Ketika Indonesia berusaha menasionalisasi segala perusahaan dan pertambangan timah

milik Belanda di tahun 1952, sekali lagi Ir. Soerachman ditunjuk menjadi ketua delegasi Indonesia ke perundingan di Negeri Belanda.

Bila dapat disebutkan tokoh bangsa yang wafat dalam tugas, maka Ir. Soerachman adalah salah satunya. Di tengah-tengah ketegarannya dalam merundingkan upaya pengambilalihan perusahaan-perusahaan milik Belanda tersebut, ia terserang sakit tekanan darah tinggi dan wafat di Negeri Belanda.

RAA. SOEMITRO KOLOPAKING POERBONEGORO

Salah satu dari kalangan pangreh praja yang diangkat oleh pemerintah pendudukan Jepang sebagai anggota BPUPKI adalah Raden Adipati Ario Soemitro Kolopaking Poerbonegoro, yang pada masa kecilnya sering dipanggil Soem. Ia dilahirkan pada 14 Juni 1887 di Banyumas dari keluarga elit priyayi yang berperan besar dalam pembentukan birokrasi pemerintah dalam negeri (*inlandschebestuur*). Karena itu Soemitro mempunyai kesempatan yang sangat luas untuk memperoleh pendidikan pada masa itu. Ia pernah duduk di HIS pada tahun 1902 Soem memperoleh ijazah dari EIS. Sekolah lanjutan yang ditempuhnya kemudian adalah HBS dengan masa belajar lima tahun dan berijazah pada tahun 1908.

Sebenarnya ayahnya telah menyiapkan suatu jenis pekerjaan bagi Soem untuk memulai berdinis di kalangan pangreh praja tetapi Soem menolak. Dengan biaya sendiri ia berangkat ke Negeri Belanda. Di negeri kincir angin ini, Soem berhasil memasuki Universitas Leiden pada bidang Indologi.

Selama belajar di Universitas Leiden ia tidak mendapat kiriman uang dari orang tuanya. Ia bekerja sebagai buruh pe-labuhan di Rotterdam. Pada waktu liburan ia juga mendapat uang dengan bekerja pada pertambangan di Jerman.

Dalam diri Soem tersimpan jiwa petualang, karena ia hanya sempat mengenyam bangku kuliah selama tiga tahun. Ia justru

memilih jenis pekerjaan yang berbeda dengan bidang ilmu yang pernah ditempuhnya. Pada tahun 1909–1910 Soem bekerja sebagai kuli tambang di perusahaan batu bara di Bruckhusenam Rhein Jerman Barat setelah meninggalkan pekerjaan ini, ia menjadi buruh perkebunan anggur di Ardennen. Setelah ini ia menjadi kuli pembantu di pertanian di Perancis Utara. Pada tahun 1912 – 1913 ia kembali berada di Negeri Belanda tidak untuk melanjutkan kuliahnya, tetapi bekerja sebagai kuli di perusahaan pertanian dan peternakan *Nederrlands Heidemaatschappij*. Ketika Perang Dunia I meletus di Eropa, Soem memilih bekerja sebagai anggota Palang Merah.

Setelah petualangannya dianggap cukup. Soem kembali ke Indonesia. Nampaknya ia tidak dapat terus-menerus menolak keinginan orang tuanya untuk memasuki dunia kepangrehprajaan. Setelah mengikuti ujian untuk menjadi juru taksir (*schatter*), pada tahun 1913 Soem bekerja sebagai ajun administrator pada kantor Pegadaian di Sumpiuh, Banyumas. Pekerjaan ini dijalani sampai tahun berikutnya. Pada tahun 1916, selama dua tahun, ia kembali ke bidang perkebunan, tetapi tidak lagi sebagai kuli melainkan staf administrasi perkebunan kina dan teh di Pasir Panjang, Sumatera. Jabatan berikut yang pernah dipegang Soemitro dalam dinas kepangrehprajaan adalah sebagai wedana di Sumpiuh dari tahun 1925 -- 1927, Jabatan tertinggi yang pernah dipangku adalah ketika ia harus menggantikan ayahnya menjadi bupati Banjarnegara.

”Soem adalah orang yang luar” demikian Prof. Jaan van Baal, guru besar Antropologi Universitas Leiden, di dalam biografinya berjudul *Ontglipt Verleden tot 1947 : Indisch berstuursambtenaar in vrede en oorlog* (1990). Ungkapan itu nampaknya bukan hanya untuk menggambarkan perjalanan hidupnya dalam menempuh pendidikan di Leiden dan pekerjaan di Eropa, melainkan juga dalam membangun industri pribumi yang tidak lain merupakan perwujudan untuk memperbaiki kehidupan ekonomi penduduk. Soem tidak saja mempunyai ide dan daya kreativitas yang tinggi, melainkan juga dalam hal mewujudkannya. Untuk mengatasi kehidupan ekonomi yang sulit pada masa akhir pemerintahan Belanda misalnya, Soemitro

mendirikan sebuah pabrik alat-alat rumah tangga di Banjarnegara. Produksi pabrik itu demikian murah sehingga dapat menyaingi barang impor dari Jepang.

Dari pengalaman yang digambarkan di atas kiranya dapat dimengerti bahwa pada diri Soemitro bukan hanya kita melihat kemampuannya di bidang pemerintahan berkat pendidikan yang telah ditempuhnya, tetapi juga kepedulian sosial, khususnya kepada orang-orang dari golongan bawah. Pengalamannya sendiri sebagai kuli tambang dan buruh perkebunan, lebih memperkaya pemahamannya tentang penderitaan orang kecil. Kepedulian macam ini yang kemudian tetap nampak ketika ia ikut merumuskan persiapan negara Indonesia Merdeka.

Ketika Pemerintah Militer Jepang membentuk BPUPKI, Soemitro terpilih menjadi anggotanya. Sebelum sidang-sidang badan itu berlangsung, Soemitro menyambut pengangkatannya itu dengan menulis suatu karangan pendek di surat kabar *Tjahaja*, 9 Mei 1945, dengan judul *Negara yang Constitutioneel*. Dalam karangan tersebut ia berpendapat bahwa para anggota BPUPKI harus menampung aspirasi rakyat.

Dalam sidang-sidang BPUPKI Soemitro menunjukkan kepedulian pada hal yang mendesak dan penting. Dalam hal Indonesia Merdeka ia bicara antara sebagai berikut.

"soepaja kita lekas mentjapai tjita-tjita kita Indonesia Merdeka. Meskipun banyak soal-soal yang belum sempurna 100% tidaklah jadi apa, asal kemerdekaan ini lekas tertjapai".

Pada bagian lain ia kemukakan pandangannya tentang wilayah Negara Indonesia Merdeka itu. Soemitro juga mendukung pendapat agar UUD Negara Indonesia Merdeka itu cukup 15 atau 16 pasal saja. Soemitro, dengan memperhatikan perkembangan yang ada, mengusulkan hal-hal seperti berikut :

"di dalam UUD itu , harus ada suatu fasal yang menggapangkan UUD itu secepat mungkin disesuaikan dengan permintaan dan keadaan jaman yang akan datang itu."

Untuk mempercepat pembicaraan tentang UUD itu, Soemitro mengusulkan pembentukan panitia kecil yang diisi oleh segala lapisan dari wakil-wakil di dalam BPUPKI itu.

KRMTH. WOERJANINGRAT

Kanjeng Raden Mas Tumenggung Harjo Pangeran Harja Woerjaningrat yang nama kecilnya Bendoro Raden Mas Saparas lahir di Kepatihan Surakarta pada 12 Maret 1885. Ayahnya KRA. Sostrodiningrat IV adalah pepatih dalam Keraton Surakarta masa Pakubuwono IX, sedangkan ibunya adalah puteri Pakubuwono IX. Orang yang lahir dan dibesarkan di keraton ini lebih separuh umurnya dihabiskan dalam pekerjaan di bidang kepomongprajaan dan dunia kebudayaan Jawa. Meskipun tidak melebihi sekolah dasar Belanda (ELS) yang pernah ia capai, tetapi praktek langsung pada pekerjaan yang dijalankan telah menjadi guru bagi hidupnya.

Kegiatannya di bidang kebudayaan Jawa nampak ketika Woerjaningrat menjadi salah satu penyelenggara Kongres Kesusastraan Jawa pada masa pergerakan. Kongres dapat menyatukan ejaan Bahasa Jawa yang kemudian diajarkan di sekolah-sekolah, yang kemudian terkenal dengan nama *Sriwedari Spelling*.

Meskipun tidak sekeras kelompok nasionalis yang berpaham non-kooperasi di dalam perjuangannya, Saparas juga terlibat dalam beberapa organisasi pergerakan. Boedi Detomo, sebuah organisasi yang sering disebut-sebut sebagai wadahnya orang bangsawan, memang cocok bagi Woerjaningrat. Ia menjadi ketua Pengurus Besar Boedi Oetomo pada periode 1916 – 1935.

pada masa kepemimpinannya, beberapa keputusan penting telah dapat dicapai, antara lain, pertama, ketika dalam kongres 6 Juli 1917 di Jakarta, Boedi Oetomo menyatakan ikut berpolitik. Kedua, ketika Boedi Oetomi mendirikan *Nationaal Committe*, yaitu wadah persatuan untuk menanggapi berdirinya *Volksraad*

Ketika Boedi Oetomo berfusi ke dalam Partai Bangsa Indonesia dengan nama Partai Indonesia Raya (PARINDRA), Woerjaningrat menjabat sebagai wakil ketua dalam periode 1938 -- 1940. Setelah dr. Sotomo wafat, Woerjaningrat menjabat ketua Perindra periode 1938 -- 1940.

Setelah masa kolonial Belanda berlalu, nampaknya tidak sulit bagi Saparas untuk tetap berkecimpung dalam dunia pemerintahan yang pada masa pendudukan Jepang memang membutuhkan orang seperti dia. Pemerintah Militer Jepang menganggap bahwa pengerahan dukungan rakyat seluas-luasnya hanya akan diperoleh dengan dukungan tokoh-tokoh nasionalis, agama, dan pamong praja.

Tidak mengherankan jika Woerjaningrat terlibat hampir semua kegiatan organisasi -- organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Militer Jepang di Indonesia. Berturut-turut Woerjaningrat menjadi anggota Poetera kemudian *Tjhuo Sangai-in* dan *Aayo* (penasihat) istimewa serta ketua *Djawa Hokokai* di Surakarta. Sebelum menjadi anggota BPUPKI, Woerjaningrat adalah ketua Dewan Rakyat tingkat *Surakarta Koochi* (baca : kota).

Dalam rapat besar Badan Penyelidik 10 Juli yang merupakan sidang kedua untuk membahas hasil laporan panitia kecil tentang hukum dasar yang diketuai Ir. Soekarno, Woerjaningrat turut berbicara dengan menyampaikan pikirannya seperti berikut.

Saja mengutjapkan banjak hormat kepada pernjataan Kait-yoo tadi, jaitoe pernjataan jang sangat menjetujoei kemerdekaan selekas-lekasnja. Djikalaoe sidang hari ini joega besok dapat mempoenyai bahan-bahan goena kemerdekaan saja kira bahwa pengharapan kita soedah terpenoehi. Maka pendek kata, soepaja pembijtaraan tidak terlaloe pandjang, saja setoedjoe sekali dengan apa jang dioeraikan oleh Mr. Wongsonegoro. Saja tidak bimbang lagi.

Hanja ingin saja memberi tambahan, agar djanganlah persoal-annja hanja mengenai bentoek repoeblik dan monarki sadja, tetapi agar diperhatikan bahwa dasar jang akan ditentoeakan segera akan dapat dilaksanakan.

Kalaoe soedah damai keadaannja, penetapan itoe boleh diperbaiki lagi, disahkan sebagaimana mestinja. Djadisaja tambahkan pada oesoel toean Wongsonegoro itoe, bahwa anggaran dasarpoen ditoejoekan oentoek waktoe ini.

Selanjoetnja saja ada oesoel poela sebagai berikoet :

Meskipun saja setojoe sepenoeh-epenoehnja tidak hanja 100 persen, bahkan 200, 300 persen, tetapi pertama-tama anggaran dasar oentoek waktoe ini saja oesoelkan kepada Ketoea, soepaja ditetapkan dan ketjiali anggaran dasar tidaklah bisa diadakan oesaha-oesaha lain lagi jang kiranja dapat mempertjepat pekerjaan kita ini? Lebih baiklah kiranja seandainja Badan Persiapan mempoenyai oesoel tentang hal ini. Haroeslah ditjamkan dalam batin ataoe pikiran bahwa pekerjaan Badan Penjelidik kemerdekaan ini haroes lekas selesai”.

Ditilik dari uraian di atas nampak kesan praktis cara berpikir Woerjaningrat, tetapi yang perlu dimaklumi justru karena pengalaman zaman pergerakan itulah barangkali yang menjadi faktornya. Kesederhanaan pandangan tokoh ini memperlihatkan cita-cita yang dikandung dalam pikirannya selama ini Ia mencoba agar masalah-masalah dasar saja yang dibicarakan dengan negara, dan nantinya, setelah kemerdekaan, dapat saja diadakan perubahan bagi menyempurnakan pekerjaan sebelumnya.

Setelah proklamasi kemerdekaan, Woerjaningrat diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung sampai masa Republik Indonesia Serikat. Woerjaningrat meninggal dunia dalam usia 85 tahun (13 September 1967).

Mr. A. SOEBARDJO

Nama A. Soebardjo atau lengkapnya Ahmad Soebardjo Djojoadisurjo terdengar tidak asing lagi, baik bagi mereka yang bergelut di bidang sejarah maupun yang bergerak di bidang politik, khususnya bidang diplomasi. Tidak dapat disangkal peranan pria kelahiran Teluk Jambe, Karawang 23 Maret 1896 ini, memang sangat menonjol dalam perjalanan sejarah Indonesia, sejak sebelum Indonesia merdeka hingga masa Orde Baru. Ahmad Soehardjo yang nama kecilnya Abdul Manaf, merupakan anak bungsu dari empat bersaudara keluarga Teuku Yusuf, keturunan bangsawan Aceh Ibunya bernama Wardinah, puteri seorang camat di Cirebon, yang berasal dari Jawa Tengah

Pendidikan yang ditempuh serta pengalaman dan aktivitas yang dilakukannya kelak sangat mendukung kegiatan Ahmad Soebardjo di bidang politik. Sekolah tingkat dasar diselesaikannya di *Europeesche Lagere School* (ELS) di Batavia (kini Jakarta). Saat ia duduk di kelas enam ELS tersebut, untuk pertama kalinya Ahmad Soebardjo mengalami rasa kebangsaan yang masih samar-samar. Rasa ini muncul karena di sekolah ELS tersebut bercampur anak-anak berbagai bangsa seperti Cina, Arab. "Indo", Belanda, selain beberapa anak pribumi. Walaupun di dalam lingkungan sekolah mereka bermain bersama, tetapi ini memperlihatkan pada Ahmad Soebardjo bahwa dari warna kulitnya ia adalah bangsa pribumi berbeda dengan

Cina, Arab, maupun Eropa. Hal ini diperkuat oleh tingkah-laku kepala sekolah tersebut, seorang Belanda bernama Vleming, yang seringkali melampiaskan kemarahan dengan mencemooh orang-orang pribumi. Di antara kata-kata yang sangat melekat di hati Ahmad Soebardjo adalah sebagai berikut :

”Pendoedoek asli tidak mempoenyai kemampoean oentoek menerima pendidikan jang lebih tinggi dan mereka tak memerlukanja, mereka hanja baik oentoek pekerdjaan-pekerdjaan rendah dan kasar”.

Pernyataan di atas inilah yang mendorong Soebardjo kemudian bersumpah dalam dirinya untuk membuktikan bahwa perkataan Vleming itu tidak benar. Tekad ini pula yang menumbuhkan hasrat Soebardjo untuk bersekolah setinggi-tingginya. Hal ini dibuktikan dengan kelulusannya dari ujian masuk Sekolah Pan Pangeran Hendrik (sebuah sekolah dengan lama pendidikan tiga tahun), tanpa harus menyelesaikan sekolah rendahnya.

Rasa kesadaran akan perbedaan warna kulit dan rasa kebangsaan yang semula masih samar-samar semakin tumbuh di masa-masa sekolah selanjutnya sehingga memberi obsesi pada diri Soebardjo untuk membuktikan kemampuan dirinya. Ia berusaha mengetahui segala-galanya lebih dari apa yang diajarkan di sekolah. Hal ini ditunjang oleh bakat dan kecerdasan yang dimilikinya, termasuk juga bakat musiknya Pendidikan Eropa yang diperolehnya di Batavia, membuat tokoh ini terbiasa dengan pergaulan orang-orang Eropa, walaupun dalam hati kecilnya tetap merasa berbeda dari yang lain lebih-lebih jika ia membaca pendapat-pendapat umum di surat kabar atau dalam pembicaraan yang menyangkut masalah politik. Ia selalu merasakan adanya jurang pemisah antara pendapat bangsa Belanda dan pribumi. Saat itu Ahmad Soebardjo sudah mulai tertarik pada perbedaan-perbedaan kepentingan dan tujuan hidup dari bermacam-macam bangsa yang hidup di Batavia, bahkan karena masa kecil Ahmad Soebardjo hidup di saat rasa nasionalisme Indonesia mulai muncul akibat Politik Etis, maka perjuangan tokoh-tokoh pergerakan seperti Douwes Dekker, Soewardi Soerjaningrat, dr. Tjipto Mangoenkoesoemo dengan *Idishe Partai*-nya, Tjokroaminoto dengan Sarekat Islamnya, dan lain-lain tokoh membekas dalam ingatannya.

Setamat dari *Hoogere Burgere School V* (HBS) tahun 1917, ia mulai memasuki gerakan pemuda Tri Koro Dharmao (yang kemudian menjadi *Jong Java*) sampai tahun 1919. Pada tahun itu juga Soebardjo melanjutkan pelajaran di bidang hukum di Negeri Belanda. Di sana ia aktif di dalam organisasi *Indische Vereeniging* (perkumpulan mahasiswa Indonesia di Negeri Belanda). Ia sempat memegang jabatan sebagai ketua untuk periode 1919 – 1921. Karena kegiatan-kegiatan inilah maka Ahmad Soebardjo berada di Eropa selama 13 tahun. Sarjana muda hukum diperolehnya dari Universitas Leiden pada tahun 1922, sedangkan sarjana penuhnya, *meester in de rechten* diperoleh pada tahun 1933.

Kepandaian serta semangat nasionalismenya yang tinggi membawa dia secara aktif pada kegiatan-kegiatan politik di Eropa selama 15 tahun. Waktunya dipergunakan antara lain untuk mengikuti seminar Hukum Internasional di Peace Palace, Hague sejak tahun 1922 sampai tahun 1923. Ia juga mengikuti acara orientasi filsafat dan kebudayaan Jerman, di Jerman dan Austria. Ia juga pergi ke Perancis dalam acara orientasi sejarah dan kesusastraan Perancis. Selain turut serta aktif dalam gerakan mahasiswa Indonesia di Eropa, Ahmad Soebardjo sering pula melakukan perjalanan dengan tujuan politik dan propaganda untuk kemerdekaan Indonesia di ibukota-ibukota Eropa Barat seperti Paris, London, dan Berlin. Kegiatan politiknya yang lain adalah menjadi anggota delegasi Indonesia ke Kongres Anti Imperialis di Brussel dan Frankfurt tahun 1927 sampai 1928.

Ahmad Soebardjo kembali ke tanah air pada April 1934. Sesuai dengan ideologi Perhimpunan Indonesia yang menganut prinsip non-koperasi, dalam memilih pekerjaan Ahmad Soebardjo tidak bekerja mengabdikan pada pemerintah, melainkan berwiraswasta dengan menjadi pengacara dan pembantu di kantor hukum Mr. Sastromoejono di Semarang, dan kemudian menjadi pengacara di Surabaya. . . .

Sampai sejauh itu Ahmad Soebardjo masih menjauh diri dari kegiatan politik, karena sebagai mantan aktivis mahasiswa di Negeri Belanda, ia merasa aktivitasnya di Indonesia sangat diawasi oleh Pemerintah Hindia Belanda. Hanya setahun di tanah air, Ahmad Soebardjo kembali pergi ke luar negeri yakni ke

Jepang pada bulan September 1933. Di sana Ahmad Subardjo bekerja sebagai koresponden pers dari surat kabar *Matahari* yang terbit di Semarang. Di sana ia banyak berhubungan dengan tokoh-tokoh dan orang-orang terpelajar. Ia sangat terkesan oleh cara hidup kebudayaan, pengetahuan, dan teknologi Eropa yang dapat diserap sehingga Jepang menjadi negara yang maju. Pada tahun 1936 ia kembali ke Indonesia dengan pengetahuan yang luas tentang Jepang. Pengalamannya di negeri pengetahuan yang luas tentang Jepang. Pengalamannya di negeri orang membuat ia menguasai banyak bahasa asing dan berwawasan pergaulan internasional. Semua itu kelak sangat mendukung karirnya sebagai diplomat.

Sekembalinya di tanah air Soebardjo kembali berpraktek sebagai pengacara di Bandung dari tahun 1936 sampai tahun 1939. Di samping bekerja sebagai pengacara. Soebardjo juga aktif sebagai anggota majalah *Kritick en Opbouw*, sebuah majalah Belanda yang diterbitkan di Bandung. Aktivitasnya sebagai penulis sebenarnya sudah sejak lama berlangsung, yaitu diawali sebagai anggota redaksi majalah *Indonesia Merdeka* milik Perhimpunan Indonesia. Ia juga menjadi pembantu dalam majalah *Nationale Commentaren* yang terbit di Jakarta.

Semasa pendudukan Jepang di Indonesia. Ahmad Soebardjo bekerja sebagai pembantu Kantor Penasihat Angkatan Darat Jepang yang dikepalai oleh Mohammad Hatta, dan menjadi kepala Biro Riset Angkatan Laut Jepang pimpinan Admiral Maeda. Pada masa akhir pendudukan Jepang di Indonesia, yakni ketika BPUPKI dibentuk, Ahmad Soebardjo termasuk di dalamnya sebagai anggota. Karena banyak dan begitu kompleksnya masalah yang harus dibahas oleh BPUPKI serta untuk menghindari kemacetan dalam kegiatan-kegiatan persidangan, maka dibentuklah Panitia Sembilan di mana Soebardjo termasuk pula di dalamnya.

Ahmad Soebardjo mengakui bahwa ia menyumbangkan dua gagasan penting, yang menurutnya sebaiknya dimasukkan dalam teks Pembukaan Undang-Undang Dasar, sebagaimana diuraikan dalam otobiografinya. Diduga dua gagasan ini disampaikan oleh Ahmad Soebardjo pada saat-saat informal di luar sidang

BPUPKI. Hal itu mengingat tidak ditemukannya catatan mengenai usul-usul Ahmad Soebardjo tersebut dalam notulen sidang BPUPKI, yaitu di dalam buku yang disusun oleh Muhammad Yamin. Dan ini diakuinya di dalam otobiografinya, *Kesadaran Nasional*, sebagai berikut

Sebenarnya, selama pertoebaran pikiran Badan Penyelidik, saja telah mengoesoelkan bahwa doea gagasan penting hendaknja ditjantumkan dalam teks terseboet, yakni prinsip : penentoean nasib sendiri sebagai landasan oetama perdjoeangan kemerdekaan nasiional gagasan kedoea jang saja oesoelkan berasal dari kongres menentang imperialisme di Brussel pada boelan Febroeari dalam kongres itoe disimpoeikan bahwa imperialisme dan kolonialisme telah mentjiptakan penderitaan jang tidak terperi itoe haroes dihapoeskan, demi terwoejoednja kemanoesiaan dan keadilan.

Kelihatannya kedua gagasan tersebut tercermin dalam alinea pertama Pembukaan UUD 1945, **"bahwa Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri-kemusiaan dan perikeadilan"**.

Sebagai kelanjutan dari sidang BPUPKI, sesudah proklamasi kemerdekaan diadakan sidang-sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) di mana Ahmad Soebardjo ikut pula sebagai anggota. Sidang PPKI 18 Agustus 1945 antara lain membahas tentang penetapan UUD 1945. Sidang dipimpin oleh Ir. Soekarno sebagai ketua PPKI dan Ahmad Soebardjo berkedudukan sebagai anggota tambahan bersama lima orang tambahan lainnya. Di dalam sidang ini dibahas pasal demi pasal dari UUD 1945. Ketika sampai pada pembahasan Bab XVI pasal 37 tentang mengubah UUD, Ahmad Soebardjo mengajukan usul mengenai jumlah minimal suara yang dapat memutuskan, apakah suatu UUD dapat diubah atau tidak. Dalam pasal 37 disebutkan, **"untuk mengubah UUD sekurang-kurangnya duapertiga dari jumlah anggota MPR harus hadir dalam persidangan. Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya duapertiga dari jumlah anggota yang hadir"**. Soebardjo tidak setuju dengan kalimat kedua, karena menurutnya di dalam praktek dapat

menyebabkan diktatur. Adapun cuplikan usul dari Ahmad Soebardjo di dalam sidang ini adalah sebagai berikut.

Saja moefakat dengan kalimat pertama . . . Tetapi terhadap kalimat kedoea saja ada keberatan, karena itoe dalam praktek bisa menjebabka diktatoer; hendaknja diseboetkan "dengan soeara jang terbanjak" sadja, karena dengan adanja hasrat oentoek meroebah itoe soedah ada djaminan jang baik.

Usul Ahmad Soebardjo ini disanggah oleh Ki Bagus Hadikoesoemo, karena menurut tokoh ini perubahan UUD adalah hal yang sangat penting, sehingga misalnya jumlah anggota yang hadir 60 orang, dengan jumlah 31 orang saja UUD sudah dapat diubah, padahal jumlah tersebut dianggap masih kurang untuk dapat mengubah suatu UUD. Ketika diambil pemungutan suara, 16 suara dari 27 anggota menyetujui jumlah duapertiga suara anggota untuk dapat mengubah UUD. Dengan demikian usul Ahmad Soebardjo tidak diterima sidang ketika itu.

Peranan lain Ahmad Soebardjo di dalam sidang PPKI ini adalah sumbangan pikirannya di dalam sidang 19 Agustus 1945. Pada sidang itu Ahmad Soebardjo bersama-sama dengan Soetardjo dan Kasman Singodimedjo tergabung dalam panitia kecil yang bertugas membuat rancangan departemen apa saja yang dibutuhkan. Hasil rapat panitia kecil ini kemudian diajukan dalam sidang PPKI 19 Agustus 1945 tersebut melalui diskusi-diskusi. Akhirnya diputuskan membentuk 12 departemen dan satu kementerian negara.

Dari usul-usul yang dikemukakannya, terutama mengenai jumlah suara yang mempengaruhi perubahan suatu UUD, menunjukkan prinsip yang dipegang teguh oleh Ahmad Soebardjo. Pengalaman sejak masa kanak-kanak hingga masa mahasiswa di Negeri Belanda, di mana perbedaan antara penjajah dan yang dijajah, perbedaan karena warna kulit, perbedaan kepentingan, dan banyak perbedaan-perbedaan lain seringkali membawa arus ke arah kediktaturan dari yang kuat terhadap yang lemah. Ini semua sangat membekas dalam diri Ahmad Soebardjo hingga masa-masa selanjutnya.

Selain di dalam sidang, kiprah Ahmad Soebardjo juga berlangsung di luar sidang. Dengan kekalahan Jepang di Pasifik, bangsa Indonesia mulai bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaannya pula. Peranan Ahmad Soebardjo juga tidak luput pada masa ini. Di antaranya sebagai penjamin dibebaskannya Soekarno dan Mohammad Hatta dari tangan pemuda di Rengasdengklok. Ia juga ikut di dalam detik-detik penyusunan teks proklamasi di kediaman Maeda. Setelah Indonesia merdeka, di mana mulai dibentuk kementerian-kementerian, Ahmad Soebardjo dipilih sebagai menteri luar negeri Indonesia yang pertama. Pilihan ini tidak meleset mengingat pengalamannya di luar negeri ketika itu. Tugas yang saat itu dipikulnya adalah menyebarluaskan berita kemerdekaan Indonesia keseluruh dunia.

Ketika Sekutu dengan diboncengi NICA datang ke Indonesia dan melakukan teror senjata, Ahmad Soebardjo bertugas melakukan perundingan-perundingan atas nama Republik Indonesia. Saat sjahrir membentuk Kabinet Parleментар tahun 1945, Ahmad Soebardjo diminta menjadi penasihat pribadi perdana menteri. Situasi politik yang ada saat itu membawa Ahmad Soebardjo ke berbagai penjara di beberapa kota, antara lain Tawangmangu, Tretes, Megelang, Ponorogo, Mojokerto, Madiun, dan lain-lain. Tahun 1948 ia bebas kembali.

Di dalam karir politiknya kemudian Ahmad Soebardjo bertugas sebagai menteri luar negeri pada masa Kabinet Sukiman tahun 1952. Sebelumnya, di bulan September 1951 Soebardjo memimpin delegasi Indonesia ke San Fransisco dalam konferensi perdamaian dengan Jepang. Di tahun-tahun selanjutnya, dalam rangka pengabdian terhadap Republik Indonesia ia banyak berkecimpung di bidang diplomasi. Rupanya bidang ini sudah merupakan "garis hidup", karena sampai periode tahun 1970 an, menjelang akhir hayatnya, Soebardjo masih aktif berkarir di bidang ini.

PROF. DR. R. DJENAL ASIKIN WIDJAJAKOESOEMA

Djenal Asikin lahir pada 7 Juni 1891 di Manonjaya, Tasikmalaya. Mulai bersekolah *Europeesche Langere School* (ELS), STOVIA (diploma *Indies Arts* pada tahun 1914), di Universitas Leiden bagian Kesehatan (diploma *arts* tahun 1925), di *Instituut Voor Tropische Geneesk Leiden* (tahun 1926), dan berakhir dengan promosinya sebagai *doctor in de Geneesk* (tahun 1932).

Selain belajar, ia juga mulai bekerja pada tahun 1915 -- 1918 sebagai *assistent* di STOVIA Jakarta bagian penyakit dalam. Tahun 1918 -- 1922 ia menjabat sebagai pemimpin rumah sakit, dokter daerah dan dokter pelabuhan Bengkulu, Sumatera Selatan.

Pada tahun 1926 ia bekerja di CBZ (*Centraal Burgelijk Ziekenhuis*) dan GH Jakarta sampai tahun 1941, *Gouvernements arts*, *gouv. arts* kelas I dan *Hoofd Commies*, *gouv. arts* di CBZ Jakarta. Pada GH Jakarta sebagai *Hoofd Commies assistent* bagian penyakit dalam dan menjadi anggota *examen commissie*. Di sini ia diserahi tugas sebagai pimpinan Poliklinik Penyakit Dalam di *Centraal Burgelijk Ziekenhuis* (CBZ) kemudian memberi pelajaran *Physische diagnostiek*, *Propaedeutische kliniek*, dan *Microscopische diagnostiek*.

Tahun 1941 -- 1942 ia kembali menjadi pemimpin *Militair Hospitaal* Jakarta. Pada 11 Mei 1942 menjabat sebagai wakil

pemimpin Rumah Sakit Umum Negeri Jakarta, dan 7 Desember 1942 menjadi anggota panitia untuk membuka kembali Sekolah Tinggi Kedokteran Jakarta. Setelah berhak memakai gelar profesor, ia pada 14 April 1943 mengajar di *Ika Dai Gaku* Jakarta. Di samping belajar dan mengajar, tokoh ini menulis sejumlah karangan, antara lain.

- 1) *Bijdrage tot de kennis v.d. Bloedbilirunverhou dingen gij gezonden en zieken in de tropen*, disertai untuk memperoleh gelar doktor (Batavia, tahun 1932).
- 2) *Bloed in de eont lasting* (Tijdschr voor Ind. Geneeskundigen, tahun 1917, No. 1, Pag. 1.
- 3) *Beri-beri en rijtvoeding* (Tijdschr voor Ind. Geneeskundigen, tahun 1918, No. 5, Pag. 16.
- 4) *Enkele opmerkingen naar aanleiding van "Plotselinge onver wachte dood met een steno in sufficientia mitralis ais patholoogananatomisch subtraat en nogwat"* (Tijdschr voor Ind. Geneeskundigen, tahun 1921, No. 4, Pag. 92).
- 5) *Over de oorzaken v.d. hooge sterfte onder de gevangenen in de gevangenis the Benkoelen gedurende jaaar* (Tijdschr voor Ind. Geneeskundigen, tahun 1921, No. 5, Pag. 125).
- 6) *Het vraagstuk der pokkenbestrijding in het Geneeskundigen ressort Benkoelen* (Tijdschr voor Ind. Geneesk, tahun 1921, No. 5, Pag. 155.
- 7) *Een en onder over Malaria zonder koorts* (Tijdschr voor Ind. Geneesk, tahun 1922, No. 1 Pag. 44).
- 8) *Enkele opmerkingen naar annleiding van "Een kleine bijdrage tot de kennis der oedeemziekte". De oedeemziekte te Tulungagung in 1918 t/m 1920*, (Stovia Mededeelingen, tahun 1922 – 1923, Pag. 78).
- 9) *De hepatotoxische werking v. Neotreparsenan en Noesalvarson* (Geneeskundig Tijdscharift van Nederlandsch Indie, tahun 1933, Pag. 1065).
- 10) *Over reterus in het bijzonder de parenchy mieterus* (Geneeskundig Tijdschrift van Nederlandsch Indie, tahun 1934, Pag. 1065).

- 11). *Eppingers inzichten in de leverpathologie* (Geneeskundig Tijdschrift van Nederlandsch Indie, Feest bundel, tahun 1936, Pag. 619).
- 12) *Over de bloedbezinkingssnelheid* (Geneesk, Jaarb v. N.I. II, tahun 1938, Pag. 34).
- 13) *Acute ziekten van het leverparenchym* (Geneeskundig Tijdschrift van Nerderlandsch Indie, tahun 1940, Pag. 294).
- 14) *Pathogenese v. den haemolytischen interus* (Geneskundig Tijdschrift van Nederlandsch Indie, tahun 1940, Pag. 427).
- 15) *De pathogenese deruramieen* (Geneeskundig Tijdschrift van Nederlandsch Indie, tahun 1940, Pag. 558).

Uraian di atas memperlihatkan beberapa karangan tokoh pejuang ini. Tulisannya sesuai dengan bidang perhatian ilmu yang dikembangkannya, yaitu penyakit dalam. Pekerjaan yang dapat diketahui hanya sebagai penasihat Perthabin dan anggota pengurus perkumpulan *Akademict Indonesia* (Perkaci).

RM. ABIKOESEN TJOKROSOEJOSO

Abikoesno Thokrosoejoso dilahirkan dari keluarga bangsawan di Delopo, Madiun, 15 Juni 1897. Abikoesno adalah adik HOS. Tjokroaminoto, seorang pemimpin Sarekat Islam sebelum Perang Dunia II. Orang tuanya bernama Raden Mas Tjokroamiseno, pensiunan wedana Distrik Kanigoro, Madiun. Ia adalah anak kesembilan dari duabelas bersaudara.

Abikoesno termasuk keturunan orang terhormat, sehingga mempunyai kesempatan masuk sekolah lebih leluasa dibandingkan dengan kawan-kawannya. Semula ia mengikuti pelajaran di *Keningin Emma School* di Surabaya dan lulus pada tahun 1917. Ia dikenal sebagai seorang otodidak dan memiliki kemampuan cukup sehingga diterima di *Architectesexamen*. Ia menamatkan pelajarannya di sekolah ini sekaligus menjadi seorang arsitek pada 7 Februari 1925 di Jakarta. Gelar arsitek ia peroleh melalui kursus ataupun ujian tertulis yang dikirim dari Negeri Belanda. Ia belajar melalui korespondensi. Semua materi ditekuni dan permasalahan dipecahkan sendiri hingga berhasil menyelesaikan studinya.

Di samping kesibukannya sebagai pemborong bangunan, Abikoesno juga ambil bagian dalam perjuangan Sarekat Islam sejak tahun 1923. Ia duduk dalam pengurus Sarekat Islam Cabang Kediri sekaligus menjadi pimpinan redaksi majalah mingguan *Sri Djojobojo*. Melalui majalah ini Abikoesno meng-

ungkapkan berbagai macam masalah ekonomi, sejarah, kebudayaan, dan penangkapan tokoh-tokoh Sarekat Islam. Semakin lama para pembaca *Sri Djojobo* menjadi semakin sadar karena majalah ini secara berani memuat kritik yang tajam mengenai penyelewengan para pejabat Pemerintah Hindia Belanda.

Dalam memimpin Sarekat Islam Abikoesno seringkali berbeda pendapat dengan kawan-kawannya, namun hal ini bukan merupakan sesuatu yang merintanginya untuk terus berjuang. Dalam tubuh Sarekat Islam ketika itu terdapat dua kelompok, yaitu AM. Sangadji, Mr. Moh. Roem, Moh. Sardjan, dan Yusuf Wibisono sebagai kelompok aliran kooperasi, dan Abikoesno, Arudji Kartawinata, dan Sabirin Latief menggunakan basis lama dalam kelompok non-kooperasi.

Ketika memimpin Sarekat Islam, Abikoesno mendapat celaan dari lawan-lawannya, karena ia bertindak sewenang-wenang dengan memecat kaum oposisi yang berjumlah 29 tokoh terkemuka. Di antaranya ialah H. Agoes Salim, Moh. Roem, Sangadji, Sabirin, Samsuddin, dan Notopoerojo. Setelah mengalami berbagai keretakan di antara para pemimpin PSII, akhirnya di bawah pimpinan Abikoesno partai tersebut dapat bersatu kembali. Sebelum Kongres PSII ke-24 (Agustus 1938), Abikoesno menulis beberapa karangan di surat kabar yang berisi pandangan PSII dan usaha-usaha yang dijalkannya.

Kebolehan Abikoesno bagi kaum pergerakan terlihat ketika terjadi penangkapan pemimpin-pemimpin PSII di Bolaang Mangondow. Abikoesno datang ke Sulawesi Utara untuk membela mereka sehingga Raja Bolaang Mangondow Adam Faidolot diperingan hukumannya dan dikirim ke Sukamiskin (Bandung).

Abikoesno juga ikut aktif dalam GAPI, Sikap Abikoesno tegas, lugas, dan berani. Kepemimpinannya tampak jelas bila ia memimpin rapat partai. Sebagai seorang pemimpin SI, Abikoesno banyak idenya. Ia menulis suatu gagasan untuk membangun Indonesia yang diterbitkan dalam buku berjudul *All Indonesia Planning*.

Pada masa pendudukan Jepang, di Jakarta direncanakan suatu susunan Badan Pemerintah Indonesia yang terdiri atas

Abikoesno Thokrosuejoso sebagai perdana menteri, Ir. Soekarno sebagai wakil perdana menteri, dan beberapa pemimpin pergerakan lainnya sebagai *minister*, (menteri) tetapi hal ini tidak mendapat persetujuan pihak Jepang.

Dalam menjalankan pemerintahannya, Jepang banyak memanfaatkan tenaga tokoh-tokoh bangsa Indonesia termasuk di antaranya RM. Abikoesno Tjokrosujoso. Keahliannya dalam bidang arsitek dimanfaatkan Jepang untuk menangani pembuatan gedung-gedung baru di Jakarta, pembuatan kamar bola, dan perbaikan Istana Merdeka yang mengalami kerusakan berat serta hampir roboh.

Dalam sidang BPUPKI yang pertama (29 Mei 1945), Abikoesno tampil sebagai tokoh dari golongan Islam. Ia juga menjadi anggota Panitia Kecil bersama Ir. Soekarno, Moh. Hatta, Soetardjo, Wachid Hasjim, Hadikoesoemo, Oto Iskandar Di Nata, Muhd. Yamin, dan Mr. Maramis.

Pandangan Abikoesno terlihat dalam pembicaraan tentang sumpah jabatan presiden dan wakil presiden. Sumpah tersebut menurut Abikoesno adalah sebagai berikut.

"Demi Allah saja bersoempah sebagai Presiden 9Wakil Presiden) akan memegang tegoh dan memelihara Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Saja bersoempah akan mempertahankan dan Kedaoelatan negara, akan mempertahankan dan menjaga dengan djiwa raga saja Kemerdekaan dan Kedaoelatan negara, akan melakoekan semoea oesaha jang ditentoeikan oleh segala Uendang-Uendang negara dan peratoerannya oentuk menjaga dan memajoekan kemakmoeran dan kesejahteraan noesa dan bangsa".

Pendapat dan pandangan Abikoesno itu ditanggapi oleh Soerjo yang memandang perlu ditambah dengan kata-kata "*Menjauhkan kepentingan sendiri dan golongan sendiri*". Pandangan Abikoesno juga ditanggapi oleh Soekardjo Wirjopranoto yang berpendapat presiden itu adalah kepala negara yang akan mempertahankan dengan jiwa raga kemerdekaan daan kedaulatan Negara Indonesia. Namun demikian Abikoesno tetap mempertahankan apa yang telah diusulkan itu. Perbedaan pendapat

di antara tokoh-tokoh tentang sumpah jabatan presiden diselesaikan dengan pemungutan suara dengan hasil akhir dukungan usul Abikoesno hanya memperoleh duabelas suara.

Dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI, 18 Agustus 1945) dibentuk 12 departemen dengan Abikoesno Tjokrosoejoso ditunjuk sebagai menteri perhubungan. Sebagai menteri perhubungan, Abikoesno berusaha keras untuk memperlancar transportasi yang ada, antara lain dibukanya hubungan kereta api antara Jakarta—Merak untuk meningkatkan perekonomian, perdagangan, dan lain-lain. Ia menjabat menteri hanya beberapa bulan karena banyak pihak-pihak lain yang tidak menyetujui pendapat dan pandangannya yang berpegang pada suatu prinsip perjuangan yang kuat dan sulit menerima pendapat orang lain bila tidak sesuai dengan prinsipnya sendiri.

Setelah tidak menjadi menteri, Abikoesno meneruskan kesibukannya dalam bidang arsitek dan aktif dalam kegiatan partai. Namun demikian pula tahun 1950 Abikoesno dan Arudji Kartawinata ditahan oleh pemerintah, karena presiden tidak setuju dengan "Persatuan Perjuangan" yang dianggap terlalu mengeruhkan suasana perundingan dengan Belanda.

Setelah ditahan beberapa lama Abikoesno diperbolehkan pulang dan pada waktu diselenggarakan Konggres Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII) di Jakarta tahun 1953 Abikoesno Tjokrosoejoso terpilih menjadi pimpinan Dewan Partai, tetapi ia tidak bersedia. Ia hanya bersedia apabila duduk sebagai presiden partai. Hal inilah yang menyebabkan ia bertentangan dengan Anwar Tjokrominoto dan Arudji Kartawinata.

Pada waktu diadakan Kongres Sarikat Islam di Solo tahun 1955, untuk mempertemukan kedua belah pihak, Zakaria Imban pun ditunjuk menjadi panitia pendamai. Kemudian diputuskan untuk mengadakan Kongres Lajnah Tanfidzyah pada tahun 1956 yang membentuk formatur terdiri atas Abikoesno Tjokrosoejoso, Arudji Kartawinata, Anwar Tjokrominoto, Zakaria Imban, dan Muhammad Sjafei. Sesudah susunan pengurus diumumkan, Abikoesno berbicara, "**Terima kasih atas pembed-**

toekan ini, tetapi saja maoe apabila jang membentoek saja sendi-ri". Ia membentuk PSII tandingan yang kemudian dibubarkan oleh pemerintah.

Setelah tidak aktif dalam dunia politik, Abikoesno hidup sebagai pengusaha swasta hingga akhir hayatnya. Tokoh pejuang nasional yang penuh kontroversial ini meninggal pada tahun 1981 setelah beberapa saat menderita sakit tekanan darah tinggi. Almarhum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Surabaya.

PARADA HARAHAP

Nama lengkap Parada Harahap ialah Parada Harahap gelar Mangaraja Sutan Goenoeng Moeda . Ia lahir di Pargarutan, Sumatera Utara, 15 Desember 1899. Parada dikenal sebagai seorang tokoh jurnalistik terpandang yang otodidak dengan nama samaran Baron Mutharapek.

Menjelang usia 15 tahun, tepatnya pada tahun 1914, ia memperoleh diploma setelah menamatkan studinya di *Standaard school* yang setaraf dengan sekolah dasar. Lima tahun kemudian, karena tuntutan keadaan, sekitar tahun 1919 ia mengikuti beberapa kursus sebagai tambahan pengetahuan, misalnya, kursus Bahasa Belanda, kursus *Toehoorder Recht Hoogeschool* bagian sosiologi di Jakarta, dan kursus dagang dan mengetik di Medan.

Setamat sekolah dasar Parada langsung bekerja sebagai juru tulis di sebuah perkebunan milik Belanda. Karena ketekunannya khususnya di dunia tulis-menulis, maka ilmunya semakin bertambah dan wawasan berpikirnya pun semakin luas. Pendidikan formal yang dapat dibilang sama sekali tidak ia miliki, ternyata tidak menjadi rintangan untuk lebih mendalami ilmu kewartawanan, bahkan dalam usianya yang ke-50, ia sempat mendirikan Akademi Wartawan di Jakarta tahun 1951. Akademi ini kelak berkembang menjadi Perguruan Tinggi Publisistik, dan kemudian Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta.

Sebagai seorang wartawan terkemuka, pejuang sekaligus intelektual yang otodidak, banyak sudah tulisan-tulisannya misalnya *Djoernalistiek di Amerika* (1925), *Dari Pantai ke Pantai* (1925), *Djoernalistik dan Pers* (1926), *Menuju Matahari Terbit* (1934), *Berhoeboeng Perjalanan ke Dai Nippon*, *Riwajat Dr. Rivai* (1939), *Pers dan Djoernalistiek*, dan *Indonesia Sekarang* (1940).

Kariernya dimulai sebagai "krani" (juru tulis) di sebuah perusahaan perkebunan, kantor onderneming "Liberia" di Sumatera Timur hingga tahun 1915. Selama bekerja di sini, Parada juga sempat menerbitkan majalah untuk golongannya, *De Krani*. Di sini Parada mulai tampak bakatnya dalam bidang tulis-menulis, sehingga ia menjadi redaktur *Sinar Merdeka* dari tahun 1919 hingga tahun 1922. Sebelumnya, ia pun sempat pindah kerja dari onderneming "Liberia" ke onderneming "Sungai Dadap" sebagai asisten *boekhouder* dari tahun 1916 hingga tahun 1918. Dalam tahun yang sama ia juga bekerja merangkap sebagai pembantu pada surat kabar *Pewarta Deli* di Medan dan *Benih Merdeka* di Sibolga. Setahun kemudian ia mendirikan *Estatesklerkenbond* di Medan dan sebagai ketua merangkap redaktur *Benih Merdeka* serta *Poestaka Padang Sidempoean*.

Untuk memperoleh kemajuan, Parada pindah ke Jawa dan menjadi reporter *Sin Po*, tetapi kemudian pindah ke harian *Neratja* sebagai redaktur dari tahun 1922 hingga tahun 1923. Surat kabar ini dipimpin oleh H. Agoes Salim dan Abdoel Moeis. Keduanya adalah tokoh partai Sarekat Islam.

Di harian *Neratja* Parada hanya sampai tahun 1923, kemudian dalam tahun yang sama ia mendirikan mingguan *Bintang Hindia*. Setelah merasa cukup mampu untuk mandiri, Parada dengan bantuan WR. Soepratman pada tahun 1926, menerbitkan mingguan *Bintang Timoer*, *Djawa Barat*. *Sinar Pasoendan*, semangat *De Volkscourant* dan *Vereenigde Uitgevers My*. Bersama dengan penerbitan mingguan *Bintang Timoer* ia juga mendirikan kantor berita Alpene (*Algemene Pers-en Niews Agentschap*). Meskipun kantor beritanya tidak bertahan lama, namun mingguannya berkembang menjadi surat kabar harian yang cukup berpengaruh pada masa itu. Perlu juga diketahui bahwa dr.

Abdoel Rivai sebagai perintis pers Indonesia, mempunyai peranan yang besar dalam mengangkat harian *Bintang Timoer* dan secara teratur mengirim karangannya dari Eropa.

Tahun 1933 Parada sempat melawat ke Jepang, sementara harian *Bintang Timoer* yang cukup terpancang mengalami kemunduran. Dalam tahun berikutnya ia kembali menerbitkan surat kabar *Tjaja Timoer* yang dia asuh hingga tahun 1942. Dengan kepergiannya ke Jepang, Parada sempat diisukan mempunyai hubungan rahasia dengan orang Jepang, tetapi korannya, *Tjaja Timoer*, ditutup setelah Jepang menduduki Indonesia. Sebelum hijrah ke Semarang dan menjadi pemimpin redaksi harian *Sinar Baroe* sampai kemerdekaan tiba, ia juga sempat bekerja pada kantor *Gunseikanbu* Jakarta hingga 1 September 1941.

Pada awal revolusi, ia bekerja sebagai pegawai tinggi Kementerian Penerangan dan mengelola surat kabar *Negara Baroe* milik pemerintah tetapi karena memperoleh sanggahan dari masyarakat, pemerintah kemudian menghentikan penerbitannya. Selanjutnya Parada ditugaskan kembali sebagai koordinator Jawatan Penerangan se Sumatra. Di sini ia pun hampir tidak pernah lupa akan pekerjaan yang sangat ia cintai. Ia juga sempat menerbitkan harian *Detik* di Bukittinggi. Pada tahun 1948, karena tugas ia pindah ke Ujungpandang dan memperoleh jabatan sebagai pegawai tinggi Kementerian Penerangan Negara Indonesia Timur. Dalam tahun 1953 ia kembali berusaha menerbitkan mingguan *Loekisan Doenia* sekaligus harian *Bintang Timoer*. Harian ini dijual kepada Partai Rakyat Nasional. Dalam perkembangannya harian ini lalu dibeli oleh Tahsin, Tom Anwar, dan Hasjim Rahman untuk dijadikan terompet simpatisan komunis.

Selain sebagai seorang wartawan yang tekun, dalam masa pergerakan nasional Parada juga sempat aktif membangkitkan semangat para pemuda Sumatera Tengah melalui Kongres Sumatera Tengah, di Sibolga (1921). Pada Desember 1927, ia juga ikut dalam PPPKI sebagai wakil dari Serikat Sumatera. Selain itu Parada juga aktif ikut dalam BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia), namun menje-

lang detik-detik proklamasi, ia tidak nampak aktif di dalam kejadian-kejadian politik penting ini. Hal ini disebabkan karena tugasnya sebagai seorang wartawan, sehingga tidak memungkinkan untuk tetap berada di satu tempat saja, atau mungkin karena pandangannya terhadap Jepang di dalam sidang BPUPKI yang cenderung membenarkan kabar burung pada tahun 1930-an yang mengatakan bahwa Parada mempunyai hubungan rahasia dengan orang-orang Jepang. Faktor lain yang juga memberikan isu tersebut ialah kepergian Parada ke Jepang sekitar tahun 1935.

Sesungguhnya kepentingan Parada ke Jepang merupakan gejala umum bagi para wartawan dan kalangan intelektual, yang memang sengaja diundang oleh Pemerintah Jepang sebagai salah satu usaha kampanye politik Jepang sebelum menduduki Indonesia. Jadi faktor ini tidak dapat dijadikan tolok ukur, karena ketika Jepang menduduki Indonesia korannya yang bernama *Tjaja Timoer* ditutup oleh Jepang. Untuk lebih jelasnya, apa yang menjadi visi politik Parada, kita kaji pandangannya di dalam sidang BPUPKI. Ia duduk di dalam Panitia Perancang Undang-undang Dasar.

Dalam sidang Panitia Perancang Undang-Undang Dasar 11 sampai 13 Juli 1945, Parada mengusulkan supaya di samping bendera juga ditentukan lambang negara. Usul ini disetujui, hanya harus diatur di dalam undang-undang istimewa. Selain itu Parada bersama Latuharhary juga mengajukan usul kepada ketua sidang untuk memperhatikan usul-usul yang masuk dan meminta kepada ketua untuk memberikan inti sari dari usul-usul yang masuk. Seperti kita ketahui selain bendera Merah Putih dan Bahasa Indonesia, Burung Garuda kini menjadi lambang negara kita.

Usul yang diajukan Parada tentang lambang negara, sepiantas lalu memang nampak tidak berarti, namun jika kita kaji lebih dalam, usulan tersebut bukan tidak mempunyai dasar bahkan sebaliknya, Parada melihat dengan tajam bagaimana masyarakat yang menghuni tumpah darah tercinta demikian heterogennya. Heterogenitas sebagai suatu kondisi yang objektif, baik dari segi agama, suku, etnis dan geografi yang berpulau-pulau,

Parada lebih cenderung melihat ke arah perpecahan daripada persatuan. Karena itu lambang negara mempunyai peranan yang sangat penting sebagai alat pemersatu, daripada hanya sebagai simbol atau identitas belaka.

Di dalam sidang yang sama, Parada memberikan pandangan umum mengenai rancangan undang-undang yang sedang disusun. Di dalam pandangan umumnya Parada menegaskan bahwa rancangan mukadimah undang-undang dasar itu disusun dengan kata-kata yang sederhana dan jelas, dan nampak segala kehendak serta bentuk serta sifat negara yang hendak didirikan. Selain itu juga terkesan segala keinginan bangsa Indonesia, dapat dikatakan sudah tercakup di dalamnya. Parada menegaskan kembali bahwa hanya ada satu hal yang mengingatkan kepadanya, bahwa :

”di dalam pesan *Gunseikan* diperingatkan kepada kita dan memang hal itoe tidak boleh kita loepakan ialah bahwa Negara Indonesia jang hendak kita dirikan itoe adalah salah satoe anggota ke-loearga Asia Timur Raja. Kita tidak boleh meloepakan negara kita sebagai mata rantai dari pada Asia Timur Raja. Keadaan ini dalam kenyataan tentoe kita akoei dan saja pertjaja tidak ada bangsa Indonesia memoengkiri, bahwa Indonesia sebagai negara merdeka dalam kedoedoean internasional, baik dipandang dari soedoet geopolitik maoepoen dari soedoet-soedoet lampirannja, tentoe adalah satoe bagian dari pada *Dia Toe*. Tapi alangkah baiknja, bilamana kita sebagai bangsa jang setoeroenan dengan Dai Nippon, bangsa jang tahoe berterima kasih dapat meninggalkan soeatoe riwayat daripada pendirian negara baroe ini, sehingga tidak oentoek sekarang saja, tapi oentoek toeroenan Dai Nippon dan oentoek tjutju kita, tertjat soeatoe hal jang tidak boleh diloepakan seperti jaitu janji jang telah kita berikan oentoek sehidoep semati dengan Dai Nippon sebeloen dan sesoedah negara kita merdeka”.

Dalam bagian lain pandangannja, Parada joega menegaskan,

”bahwa perjoengan kemerdekaan Indoensia soedah dimoelai sedjak berabad-abad jang laloe. Peperangan besar dan ketjil pada achirnya tersoesoen, hal ini karena adanja inspirasi perang Dai Nippon melawan Rusia. Tapi satoe hal tidak boleh diloepakan ialah langkah kita menoejoe pintoe gerbang kemerdekaan, meskipun bersifat kelandjoetan dari gerakan bangsa kita sendiri, tapi

adalah dibantoe dan disokong oleh Balatentara Dai Nippon. Hal ini saja minta, soepaja dapat kiranja tetap mendjadi peringatan di dalam salah satoe keterangan jang akan diboeat oleh komisi nanti. Djika saja batja disini oempamanja kata-kata "Bahwa sesoeng-goehnja kemerdekaan itoe ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itoe jajahan diatas doenia haroes dhapoeskan karena tidak sesoei dengan peri keadilan", maka itoe soeatoe keterangan kepada doenia, dan keterangan poela bahwa perdjoeangan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat bahagia, selamat dan sentosa. Rakjat Indonesia bersatoe, berdaoelat, adil dan makmur. Saja ingin soepaja di dalam kata-kata itoe, jang mengatakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat bahagia, selamat sentosa, ada kiranja nanti ditjantumkan sebagai soeatoe keterangan bahwa kita mengakoei dan memperingati bahwa tertjapainja kemerdekaan negara kita adalah joega dengan bantoean saoebara toea Balatentara Dai Nippon. Keterangan jang mengatakan bahwa atas berkat Allah jang maha koeasa dan dengan didorong oleh keinginan loehoer, soepaja berkehidoepan kebangsaan jang bebas, maka rakjat Indonesia menjatakan kemerdekaannya, pun adalah soeatoe keterangan kepada doenia. Alangkah moelianja kalaoe bangsa Indonesia mengakoe, bahwa disini terletak dorongan jang besar dari pada pemerintah dan bangsa Nippon.

Tanggapan Parada terhadap Rancangan Mukadimah Undang-Undang Dasar yang sedang disusun memperlihatkan pada prinsipnya ia menyetujui dan bahkan respek terhadap pembicaraan dari anggota BPUPKI. Dia mengomentari bahwa dengan kata-kata yang sederhana tersimpul segala kehendak dan sifat serta bentuk negara. Hanya ada satu hal yang ia ingatkan dan belum tersurat serta tersirat di dalamnya, yakni keinginannya untuk menegaskan bahwa Jepang sebagai saudara tua mempunyai andil dalam proses kemerdekaan Indonesia. Perkataan ini mestinya terdapat di dalam mukadimah, dan kita sebagai bangsa yang merdeka dan tahu terima kasih kepada Jepang, harus mengakui akan hal ini. Untuk meyakinkan anggota sidang, Parada juga menguraikan keterikatan kita sebagai saudara dan keturunan dengan bangsa Jepang, baik dari segi geografi maupun geopolitik di dalam kedudukan internasional. Selain itu Parada juga mengingatkan kepada hadirin, bahwa kita pernah berjanji kepada Jepang sebagai saudara tua akan sehidup semati hingga kemerdekaan tercapai. Atas tanggapan Parada ini, secara hakiki anggota sidang menerima kenyataan ini. Hanya anggota Yamin

yang juga memberikan pandangan umumnya, di dalamnya juga mengomentari pendapat Parada.

Menurut Muhammad Yamin, secara prinsip ia mengakui akan peranan Jepang sebagai saudara tua yang juga membantu tercapainya kemerdekaan Indonesia. Hanya dari segi etis hukum perkataan ucapan terimakasih tersebut tidak dapat dimasukkan di dalam Mukadimah Rancangan Undang-Undang Dasar yang kita susun ini. Yamin menyarankan agar pernyataan peranan Jepang sebagai saudara tua atas kemerdekaan Indonesia dapat ditegaskan di bagian lain dan diatur secara khusus.

Tokoh pejuang nasional, terutama dalam dunia jurnalistik ini wafat 11 Mei 1959 di Jakarta.

Mr. RM. SARTONO

Raden Mas Sartono adalah anak kedua dari tujuh bersaudara keluarga Raden Mas Martodikarjo, pegawai pemerintah Mngkunegaran Surakarta. Ia dilahirkan pada 5 Agustus 1900 di Wonogiri, Jawa Tengah. Sebagai anak keturunan bangsawan, Sartono dapat bersekolah di *Europeesche Lagere School* (ELS) di Surakarta pada tahun 1906 dan lulus pada 1923 dengan predikat nomor satu. Ia pun dengan mudah diterima di *Meer Uitgebreid Lagere School* (MULO) di kota yang sama. Pada 1916 ia berhasil melanjutkan studinya di *Rechtschool* di Jakarta.

Pada awal tahun masa studinya di *Rechtschool*, Sartono mulai mengenal dunia pergerakan dengan memasuki Tri Koro Dharma, sebuah organisasi pemuda Jawa, yang pada 1918 berubah menjadi *Jong Java*. Pada tahun 1921 Sartono menyelesaikan pelajarannya di *Rechtschool* dengan predikat peringkat kedua setelah Iwa Koesoema Soemantri. Sartono kemudian bekerja di Pengadilan Negeri Salatiga selama kurang-lebih empat bulan. Sebagai seorang pegawai negeri, sebenarnya ia mempunyai kesempatan memperoleh biasiswa untuk melanjutkan kuliah di Universitas Leiden di Negeri Belanda, tetapi karena tawaran itu tidak segera datang maka pada tahun 1922 ia berangkat dengan biaya sendiri. Di samping belajar, Sartono di Negeri Belanda juga menjadi anggota Perhimpunan Indonesia (1922 - 1925), suatu organisasi mahasiswa Indonesia yang banyak

memberikan sumbangan bagi ide dan gerakan nasionalis di Indonesia.

Sekembalinya di tanah air, Sartono memilih Bandung sebagai tempat mengamalkan ilmu untuk membela bangsanya yang masih terjajah. Bersama dengan Mr. Iskaq Tjokrohadisoerjo dan kawan-kawan, ia mendirikan Kantor Pengacara. Pada tahun 1928 Mr. Iskaq dan Mr. Sartono membuka kantor cabang di Jakarta.

Minatnya yang besar terhadap dunia pergerakan nasional diperlihatkan Mr. Sartono ketika ia mengikuti rapat-rapat pendirian PNI di tahun 1927. Sartono menjadi sekretaris kongres kedua PNI di Jakarta pada 18 -- 20 Mei 1929. Dengan mendasarkan pada nasionalisme Indonesia, dapat dimaklumi mengapa pemerintah kolonial selalu mencari-cari kesalahan serta mengawasi sepak-terjang terutama tokoh-tokohnya. Ketika aksi-aksi propaganda PNI makin mendapat dukungan yang luas dari rakyat Indonesia, pemerintah kolonial melancarkan pengeledahan di rumah dan penangkapan terhadap sejumlah tokoh tokoh PNI seperti Ir. Soekarno, R. Gatot Mangkoepradja, Maskun, dan Supriadinata yang kemudian diajukan ke Pengadilan di Bandung (1930).

Keterlibatan Mr. Sartono dengan peristiwa penangkapan dan pengajuan empat orang itu ke pengadilan adalah dengan cara menjadi pembela mereka. Bagi Mr. Sartono pembelaan itu bukan berarti sekadar membela teman-temannya, tetapi yang jauh lebih mendasar adalah membela bangsanya yang terjajah itu. Tim pembela selain Mr. Sartono adalah Mr. Sastromoeljono, R. Idih Prawiradipoetra, dan Mr. Soejoedi.

Pada 18 Agustus 1930, Mr. Sartono membacakan pembelaannya yang antara lain menyebutkan bahwa mereka (yang ditangkap itu) bersih dari perbuatan yang dituduhkan. Mengapa demikian? Untuk itu baik dikemukakan bagian pembelaan Mr. Sartono seperti berikut.

"Karena orang ada mendengar kabar angin jang boenjinja kira-kira permoeaan tahun 1930 atawa pada hari tahoen baroe akan berlakoe pemberontakan. Selama perkara ini didjalankan telah njata

dengan seterang-terangnja bahwa kabar angin itoe tiada beralasan sama sekali. Djadi proses ini dimoelai dan dilakoekan dengan alasan jang tipis sekali”.

Mr. Sartono berkeyakinan bahwa alasan mengajukan keempat tokoh nasionalis itu bersifat politik. Pada bagian akhir pembelaannya Mr. Sartono akhirnya menyimpulkan dengan mengatakan :

” . . . karena dalam soerat toedoehan (acte van verwijzing, jaitu soerat penjerahan kemoeka pengadilan ini) tiada dialamatkan toedoehan jang konkret dan jang tentu, maka soerat toedoehan itoe, berhoebongan dengan penoedoehan jang sebagian ini sadja, mendjadi batal.”

Seperti diketahui bahwa hasil persidangan pengadilan kolonial itu telah menjatuhkan hukuman penjara bagi keempat tokoh PNI itu. Insinyur Soekarno mendapat hukuman penjara empat tahun, R. Gatot Mangkoepradja dua tahun, Maskoen satu tahun delapan bulan, dan Soepriadinata satu tahun tiga bulan penjara.

Setelah penangkapan empat tokoh PNI itu, partai politik nasional itu membubarkan diri. Ada dua kelompok yang kemudian mendirikan organisasi yang memakai cara perjuangan yang berbeda tetapi mempunyai tujuan yang sama dalam upaya mencari kemerdekaan. Mereka yang percaya pada partai kader seperti Drs Mohammad Hatta dan Sjahrir, mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baru), sedangkan yang masih percaya dengan kekuatan massa mendirikan Partai Indonesia Raya (Partindo), Mr. Sartono memilih yang terakhir dan ia sendiri menjadi ketua muda (1931 -- 1936). Sewaktu Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) berdiri (1937 -- 1942), Mr. Sartono menjadi ketua muda pengurus besarnya. Pada tahun 1941 Mr. Sartono menjadi Pengurus Harian Majelis Rakyat Indonesia. Ketika Pemerintah pendudukan Jepang mendirikan Poesat Tenaga Rakyat, Mr. Sartono diangkat menjadi kepala Bagian Organisasi. Pada tahun 1943 ia kemudian diangkat menjadi anggota *Tjhuo Sangi-in* Menjelang proklamasi kemerdekaan, Mr. Sartono diangkat sebagai anggota BPUPKI. Ia duduk sebagai anggota Panitia Kecil untuk merancang UUD. Panitia ini terdiri atas 19 orang dan diketuai Ir. Soekarno.

Dalam sidang panitia perancang UUD 11 Juli 1945, Mr. Sartono mengatakan :

'Memandang perloe membitjarakan beberapa pihak doeloe karena tidak semoea anggota mengeloearkan pikirannya dalam Rapat Besar, sedang oesoel-oesoel jang disampaikan *Zimukyokuu* joega mengandoeng hal-hal jang beloem dioetjapkan dalam rapat besar seperti : Oenitarisme ataoe tidak, badan perwakilan ataoe badan lain, kebangsaan ataoe tidak, kerakjatan politik saja ataoe joega ekonomis. Kepala Negara seorang sadja ataoe beberapa orang (direktorioem). Saja mengoesoelkan soepaja merantjang satoe pernajaan kemerdekaan, ditambah dengan sikap terhadap peperangan Asia Timoer Raja dan keanggotaan dalam Asia Timoer Raja. Berkeberatan, djika hanya dimasoekkan hal-hal jang bisa didjalankan pada masa perang. Djoega hal-hal jang walaoepoen beloem bisa didjalankan, sebaiknja dimasoekkan poela, walaoepoen hanja pokok.

Setelah kemerdekaan Mr. Sartono menjabat menteri negara pada kabinet pertama pimpinan Soekarno-Hatta. Ketika terjadi aksi pemogokan Karung Goni di Delanggu (1948), Mr. Sartono menjadi ketua Angket Komisi Badan Pekerja KNIP dan ditugaskan untuk menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara itu.

Dalam Negara Kesatuan dengan sistem pemerintahan perlemen (1950 an), Mr. Sartono menjabat ketua DPR hingga terbentuk DPR hasil pemilihan umum. Ia terpilih dalam pemilihan Umum pertama itu (1955) dan menduduki kembali jabatan sebagai anggota lembaga terhormat itu sampai lembaga itu dibubarkan oleh Soekarno yang pernah dibelanya dulu. Ia bertanya tentang hal tersebut dan menolak untuk duduk (baca: diangkat) dalam lembaga bentukan Soekarno (baca: DPR—GR) itu. Kelihatannya ia berbeda pendapat dengan presiden pertama RI itu

KH. MAS MANSOER

Kiai Haji Mas Mansoer dilahirkan dari pasangan Kiai Mas Akhmad Marzoeqi dan Raoellah di Kampung Sawahan Surabaya, pada 25 Juni 1896. Kiai Mas Akhmad Marzoeqi, ayahnya, adalah seorang ulama dan ahli agama yang termashur di Jawa Timur bahkan sampai ke Pulau Madura.

Mansoer dibesarkan di alam Jawa Timur yang agamis dan yang terkenal dengan sejarah para walinya. Mansoer kecil bersama teman-temannya gemar sekali bermain sekolah-sekolahan dan ia selalu berperan sebagai gurunya. Ia juga seringkali menyusun bantal-bantal di sekitarnya dan setelah itu ia mulai berkhotbah seolah-olah seorang kiai bersama para santrinya. Tak jarang ia bermain perang-perangan memimpin teman-temannya. Kegemaran lainnya adalah membaca bermacam-macam buku terutama yang bersifat keagamaan atau mendedikasikan nasihat orang-orang tua. Buku-buku yang dibacanya dan nasihat-nasihat yang didengar, dengan cepat dapat diserap dan dicerna, karena itu tidak mengherankan apabila setelah menjadi kiai, nasihat-nasihat itu ia teruskan kepada saudara-saudara, teman-teman, anak-anak, dan bahkan murid-muridnya.

Pada awal abad ke-20, sebagaimana anak-anak santri pada zaman itu, pendidikan yang diperoleh Mansoer pertama kali di masa kecil adalah pendidikan di bawah asuhan ayahnya sendiri. Ini berlangsung sampai Mansoer berusia 12 tahun. Pada tahun

1908 Mansoer berangkat menunaikan ibadah haji, diteruskan dengan perjalanan ke Mesir untuk belajar dan bermukim di sana sampai tahun 1912 di saat usianya mencapai 16 tahun.

Pengalaman-pengalaman di negeri orang memperkaya pengalaman pribadi Mansoer sehingga ia berkesan lebih dewasa dari umurnya. Salah satu pengalaman yang sangat berguna dan membekas adalah ketika ia mengunjungi Pesantren Sjanggit di selatan Kota Tripoli. Pesantren Sjanggit adalah sebuah pesantren terkenal yang dipimpin oleh Sidi Abdoellah dan keluarganya. Di pesantren ini para santri dididik dengan disiplin yang keras selama lima tahun dalam hal keagamaan, dari pukul empat sampai pukul tiga keesokan harinya. Selain belajar di bidang keagamaan, para santri juga diajarkan cara-cara berenang dan berperang dengan menunggang kuda. Mansoer terkesan dengan cara pendidikan pesantren ini. Menurut Mansoer, sistem pesantren semacam itu akan sangat berguna jika diterapkan di tanah air untuk membina semangat pemuda-pemuda Indonesia agar berani menentang penjajah Belanda. Keberadaannya di luar negeri selama empat tahun tidak membuat luntur rasa keindonesiaannya, bahkan semakin mempertebal rasa cintanya kepada tanah air. Pengalaman-pengalaman yang diperoleh selama itu membuat Kiai Haji Mas Mansoer menjadi seorang ulama yang moderat, seorang pribadi yang keras bijaksana.

Pecahnya Perang Dunia I yang mulai terasa di Mesir, membawa Mansoer kembali ke tanah suci Mekkah dan bermukim di sana selama satu tahun. Selama bermukim di Mesir Mansoer juga banyak mempelajari pemikiran-pemikiran dan aliran-aliran para filosof Islam, antara lain Ibnu Taimiyah (hidup pada abad ke-13), Sayid Jamalludin al Afghani (1839 -- 1897) dan lain-lain. Pada umumnya filosof-filosof tersebut menganjurkan umat Islam untuk mengenyahkan kekolotan, menentang penjajahan bangsa-bangsa Barat terhadap negara-negara Islam, dan agar para ulama mewarisi tugas para nabi untuk membela kebenaran dan menegakkan keadilan. Setelah dirasa cukup menimba pengalaman, Mansoer kembali ke tanah air sebagai pemuda idealis sekaligus memiliki sifat sosial religius, keteguhan batin

dan watak yang kuat, serta cenderung memimpin. Dengan ilmu dan pengalaman internasional yang diperolehnya, ia menjadi seorang ulama yang berpikiran maju dan moderat.

Setibanya di tanah air, dunia yang menarik perhatiannya adalah pendidikan di samping politik; karena itu kegiatan pertama yang dilakukannya adalah terjun ke dunia pendidikan di Surabaya, yakni dengan mendirikan sekolah-sekolah agama seperti Nahdatul Wathan dan Taswirul Afkar. Ia juga membangun madrasah dengan sistem dan pola Mesir yaitu Madrasah Mufidah, suatu madrasah yang cukup modern pada saat itu. Bersama teman-temannya, Kiai Mas Mansoer juga memprakarsai berdirinya perkumpulan Ihjaus-Sunnah yang tujuannya mengamalkan ajaran Agama Islam sebelum cabang Muhammadiyah lahir di Surabaya tahun 1920. Di samping itu, karena kuatnya pengaruh pandangan-pandangan para filosof Islam seperti yang diterima di Mesir dahulu, maka Mansoer terjun juga ke bidang politik. Organisasi politik pertama yang ia masuki adalah Sarekat Islam (SI) pada tahun 1915. Kiai Haji Mas Mansoer diangkat menjadi penasihat pada Pengurus Besar SI dan pada tahun 1925 ia diangkat sebagai ketua Mukhtar Al—Alam Al Islami Far'ul Hindisi—Syurqiyah (MAIHS), dan berangkat ke Mekkah sebagai wakil Indonesia dalam Mukhtar Alam Islami sedunia.

Kiai Haji Mas Mansoer juga banyak dipengaruhi oleh tokoh besar Kiai Haji Achmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah). Dari Kiai Haji Achmad Dahlanlah ia banyak belajar tentang bagaimana memperbaiki dan memajukan umat Islam di Indonesia yang saat itu masih serba terbelakang. Keyakinannya terhadap kebenaran-kebenaran pendapat Kiai Haji Achmad Dahlan mendorong Mansoer untuk masuk menjadi anggota Muhammadiyah. Ia terpilih sebagai ketua Cabang Muhammadiyah di tahun 1924. Peranannya yang menonjol membawa dia untuk menduduki jabatan ketua Muhammadiyah yang keempat dalam usia 41 tahun. Ia kemudian bermukim di Yogyakarta, pusat organisasi Muhammadiyah. Ketika SI melakukan disiplin partai, ia tetap memilih duduk di organisasi ini. Ia juga sempat memimpin Partai Islam Indonesia bersama-sama dr. Soekiman dan kawan-kawan. Bersama Mr. Amir Syarifuddin, Muh. Husni Thamrin, dan

lain-lain, pada tahun 1939 ia duduk di meja pimpinan Gabungan Politik Indonesia (GAPI). Kiai Haji Mas Mansoer pernah pula ditunjuk sebagai ketua Majelis Rakyat Indonesia (MRI), tetapi menolak dan tetap memilih memimpin Muhammadiyah. Keaktifannya di bidang politik mendekatkannya pada tokoh-tokoh politik saat itu seperti Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Haji Agoes Salim dan tokoh-tokoh lainnya.

Kiai Haji Mas Mansoer ternyata juga seorang ulama yang tertarik dengan dunia tulis-menulis. Ia beranggapan bahwa komunikasi dengan umat Islam sangat penting untuk dibina dan diselenggarakan. Hal tersebut dapat melalui surat kabar, majalah, atau buku. Majalah yang sempat diterbitkannya adalah *Suara Santeri*, kemudian *Djinem*, sebuah majalah berbahasa Jawa dan menggunakan tulisan Arab. Ia sangat produktif dan memakai kata-kata yang sangat halus serta tidak menyinggung perasaan. Tulisannya sering kali dimuat dalam majalah *Hindia Timur* yang terbit di Jakarta, *Siaran* dan *Kentongan* masing-masing di Surabaya, *Penganjur*, *Islam yang Bergerak* di Yogyakarta, *Panji Islam*, *Pedoman* dan *Masyarakat* di Medan dan *Adil* di Surakarta. Buku-buku yang sempat ditulisnya antara lain *Syarat sahnya Nikah* (tahun 1928), dan *Adabul Bachs Wal Munadharah*. Selain tulis-menulis Kiai Haji Mas Mansoer juga sangat menggemari musik dan mencintai kebudayaan tradisional.

Peranannya yang menonjol pada zaman pendudukan Jepang di Indonesia ditandai dengan berhasilnya ia berdiri di barisan terdepan bersama para pemimpin Indonesia lainnya. Saat itu ia duduk dalam pucuk pimpinan organisasi Poesat Tenaga Rakyat (POETERA) di tahun 1942 bersama-sama dengan Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantara, yang lebih dikenal dengan sebutan Empat Serangkai. Semula Mansoer tidak ingin duduk dalam organisasi tersebut, akan tetapi hubungan pribadi yang sangat erat di antara mereka menyebabkan Mansoer menerima tugas tersebut, ditambah rasa tanggung jawabnya terhadap nasib rakyat Indonesia. Hal ini didukung pula oleh masih adanya rasa percaya pada itikad baik Jepang bahwa Indonesia akan merdeka kelak. Selain memimpin POETERA, Mansoer juga menjadi anggota *Tjhuo Sangi-in* pada tahun 1943.

Perkembangan sikap Jepang terhadap rakyat Indonesia kemudian membawa pula perubahan pada diri KH. Mas Mansoer. Perlakuan Jepang yang keras dan kejam pada rakyat Indonesia membuat ia memendam rasa tidak senang dan sedih, apa lagi ada di antara sanak-keluarga maupun murid-muridnya yang meninggal akibat kekejaman Jepang tersebut. Sudah lama pula ia sebagai umat Islam yang taat, tidak menyukai adat bangsa Jepang yang mengharuskan bangsa Indonesia membungkukkan badan ke arah Tokyo untuk menghormati kaisar Jepang, pada hal sebagai ulama, KH. Mas Mansoer diharuskan memberi fatwa kepada umat tentang keharusan tersebut. Sebagai seorang ulama, sulit baginya menjalankan politik Jepang semacam itu. Pertentangan batin dan rasa tidak puas yang kian hari kian menumpuk, membuat kesehatannya seringkali terganggu. Sikap optimis dan selalu gembira yang semula menjadi sifatnya telah hilang. Kiai Haji Mas Mansoer mengalami kegoncangan jiwa karena tertekan sehingga kondisinya cukup memprihatinkan. Ketidaksenangannya terhadap Jepang rupanya mulai tercium, sehingga ia mulai dicurigai dan diawasi karena dianggap berbahaya oleh Pemerintah Jepang. Kemunduran kesehatan KH. Mas Mansoer yang sangat cepat menyebabkan beredar isu (*sumour*) bahwa pembesar-pembesar Pemerintah Jepang telah memberikan suntikan-suntikan obat yang mempengaruhi kesehatannya. Dengan kondisi kesehatan yang rapuh ia menetap di Surabaya.

Menjelang kemerdekaan Indonesia, KH. Mas Mansoer berada di Jakarta dan duduk sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Di antara masalah-masalah yang muncul dan terus berkembang dalam perdebatan-perdebatan sejak sidang BPUPKI I dan II adalah mengenai masalah antara golongan Islam dan Nasionalis tentang negara dan agama. Untuk membahas masalah tersebut dibentuk suatu panitia khusus yaitu Panitia Sembilan. Walaupun KH. Mas Mansoer tidak termasuk dalam panitia ini, namun secara pribadi ia melontarkan pendapatnya, **"bahwa untuk hal ini kita harus berpikir secara kenegaraan dan kebangsaan"**. Ia juga mengupas masalah hubungan antara tanah air dan kebangsaan dalam Islam. Dalam hubungan ini ia berkata :

"Memang negara Islam tidak bertanah air tapi kaoem moeslimin jang bertanah air". Agama Islam tidak mengenal kebangsaan, tapi kaoem moesliminnja berbangsa-bangsa menoeroet tempat dan daerahnja".

Dengan demikian menurut tokoh ini betapa jelasnya kewajiban seseorang terhadap tanah airnya. Semua itu menunjukkan bahwa ia sangat memperhatikan azas nasionalisme. Pendapat-pendapatnya yang sangat moderat, yang sedikit banyak memberi ilham di dalam sidang-sidang BPUPKI, kemungkinan besar diungkapkan secara informal di luar persidangan, karena tidak adanya dari pandangan-pandangannya di dalam notulen sidang yang kemudian disusun dan diterbitkan oleh Mohammad. Dugaan kuat lainnya adalah faktor kesehatan yang tidak memungkinkan KH. Mas Mansoer untuk aktif dalam persidangan.

Dengan kesehatan yang terus berkurang, ia sempat mende-ngar pengumuman kemerdekaan Indonesia. Keadaan Jakarta yang semakin memanas dan teror NICA yang terus meningkat menyebabkan ia kembali ke Surabaya bersama keluarganya. Di sana kesehatannya berangsur-angsur membaik. Kiai Haji Mas Mansoer kerap kali berjalan kaki dengan lencana merah-putih di dada memasuki kampung-kampung menemui pemuda-pemuda yang bergerak di bawah tanah atau pemuda-pemuda Islam untuk memberi petunjuk-petunjuk dan kekuatan batin. Dengan tuduhan sebagai kolaborator Jepang, ia pernah ditangkap pihak Belanda. Pengaruh KH. Mas Mansoer yang cukup besar rupanya ditakui oleh Belanda, namun tuduhan tersebut tidak terbukti sehingga ia dibebaskan kembali, tetapi ia ditangkap kembali dengan tuduhan yang tidak jelas. Dalam keadaan sakit, tokoh pejuang Islam ini dikirim ke rumah sakit sebagai tawanan, dan di sanalah seorang diri KH. Mas Mansoer wafat (25 April 1946). Jenazahnya dimakamkan di Pemakaman Gipo, dekat Mesjid Ampel Surabaya.

DRS. KRMA. SOSRODININGRAT

Nama kecil Sosrodiningrat adalah Raden Mas Sawarno atau RM. Sosrosawarno. Ia lahir pada 1 Desember 1902 di Solo. Ia adalah putera KPAA. Djojonagoro, pepatih dalem Sri Paduka PB. V dan PB XI. Ia menempuh pendidikan sekolahnya pada *Europeesche Lagere School* di Solo. Selanjutnya masuk *Hogere Burger School V* di Semarang dan lulus pada tahun 1913. Dalam tahun yang sama Sawarno melanjutkan sekolah di Delft Nederland pada *Technische Hoogee School*. Baru satu tahun di Negeri Belanda, pecah Perang Dunia I sehingga menghambat studinya. Ayah Sosrodiningrat menginginkan dia untuk memperdalam pengetahuannya dalam bidang kepamongprajaan, tetapi keinginan tersebut belum saatnya ditekuni karena waktu itu untuk belajar Indologie masih tertutup bagi orang-orang Indonesia. Baru tahun 1918, setelah selesai Perang Dunia I, sekolah tersebut dibuka, dan Sosrodiningrat segera ke Leiden untuk mengejar harapannya itu. Pada tahun 1921 ia lulus ujian akhir dalam *Indische Administratieve Dienst* dengan hasil *cum laude*. Ketika belajar di Negeri Belanda, ia bersama-sama dengan Pangeran Hangabehi (kelak menjadi Paku Buwono VI) dan RM. Ario Soerjosoeparto (kelak menjadi Mangkunegoro VII).

Dalam tahun 1922 Sawarno kembali ke tanah air, dan bekerja sebagai *bertuursambtenaar* di Bojolali. Tiga tahun kemudian (Mei 1925), ia dipindahkan ke Wonogiri dengan kedudukan sebagai *controleur*. Tahun berikutnya (1926), ia dipindahkan ke

Kantor Pusat Urusan Tanah di Solo. Dalam tahun itu juga, karena ikatan dinas dengan Pemerintah Hindia Belanda selama lima tahun telah selesai, maka Sawarno dapat memangku jabatan dalam pemerintah Swapraja Surakarta. Pada bulan Februari 1927, ia diangkat menjadi bupati anom (*order-regent*) dengan gelar Raden Mas Tumenggung Sosrowadono.

Untuk mengetahui keadaan dan masalah pemerintahan di luar daerah swapraja, Sostrowadono didetasis selama sembilan bulan di Kabupaten Purwodadi (Grobogan) di mana terdapat tanah khusus untuk perkebunan. Sosrowadono kemudian mendapat tugas baru pada Dinas Kepolisian di Semarang. Pada bulan November 1929 ia kembali ke Solo diperbantukan pada bupati Kota Surakarta guna memimpin persiapan persiapan sensus tahun 1930. Sebelum tahun 1930, Kantor Urusan Agraria di Solo selalu berada di bawah pimpinan seorang Belanda. Pemerintah waktu itu memang bermaksud untuk menempatkan urusan tersebut di bawah pimpinan seorang pejabat dari pemerintah swapraja.

Pada bulan Juli 1932 Sosrodiningrat mendapat tugas belajar mengenai Indologie di Universitas Leiden. Tiga tahun kemudian (1935), ia mencapai gelar doktorandus dalam bidang Indologie. Sekembalinya di tanah air tokoh ini ditugaskan menjadi kepala Kantor Keuangan dan Penghasilan dari Pemerintah Pusat Swapraja Surakarta. Pada bulan April 1936 pangkatnya dinaikkan menjadi "bupati nayoko panumping bekel jawi" dengan gelar Drs. Kanjeng Raden Mas Tumenggung Tjondronagoro. Puncak kariernya ialah ketika ia menggantikan ayahnya (1 November 1939) menjadi "pepatih dalem" (*rijksbestuurder*) Surakarta Hadiningrat dengan sebutan Drs. Kanjeng Raden Mas Adipati Sosrodiningrat V.

Dalam masa pendudukan Jepang jabatan *rijksbestuurder* diganti dengan *solo-koci somu cogan*. Menurut peraturan pemerintah pendudukan Jepang, semua pegawai bekas Pemerintah Hindia Belanda dari Keresidenan Surakarta diserahkan kepada pemerintah Kesunanan dan Mangkunegaran antara lain ialah kehutanan, pendidikan dan pengajaran, pertanian dan lain-lain, sedangkan yang masih dikuasai oleh pemerintah pendudukan Jepang adalah dalam bidang ketentaraan dan kepolisian.

Semasa pendudukan Jepang, Sosrodiningrat ditetapkan menjadi anggota *Tjhuo Sangi-in*, yang secara periodik mengikuti rapat-rapat pleno di Jakarta. Ketika didirikan BPUPKI, Sosrodiningrat menjadi salah seorang anggota lembaga tersebut.

Setelah proklamasi kemerdekaan, pada bulan Maret 1946 Sosrodiningrat diminta oleh Pemerintah RI untuk memimpin Bank Negara Indonesia Cabang Surakarta merangkap sebagai kepala Bagian Ekonomi dari Bank Negara Pusat. Jabatan tersebut dipangkunya sampai akhir tahun 1950. Pada tahun berikutnya Sosrodiningrat diangkat menjadi penasihat Sri Paduka PB XII, dan dalam bulan Februari 1956 ditetapkan menjadi anggota Badan Penasihat Keraton Surakarta oleh Kementerian Dalam Negeri RI. Di samping memegang jabatan di keraton, Sosrodiningrat dengan penuh semangat mencurahkan perhatian dan tenaganya di bidang pendidikan dengan memberikan kuliah-kuliah di berbagai fakultas dari universitas-universitas yang ada di Solo, di antaranya Fakultas Ekonomi UII, FKIP Muhammadiyah, Universitas Saras Wati, Universitas Tjokroaminoto, SMEA Negeri I, dan Kursus B1 Negeri, sedangkan jabatan-jabatan yang pernah dipangkunya sejak tahun 1951 hingga tahun 1967 di kalangan perguruan tinggi antara lain dekan Fakultas Ekonomi UII dan dekan FKIP Muhammadiyah Surakarta.

Tokoh pejuang ini wafat pada 8 Februari 1967 dan dimakamkan di Astana Imogiri, Yogyakarta.

MR. R. SOEWANDI

Soewandi, seorang keturunan bangsawan, lahir 31 Oktober 1898 di Ngawi, Jawa Tengah. Ia memperoleh pendidikan pertamanya di *Hollands Inlandsche School* (HIS) yang diselesaikannya dalam tahun 1911 atau ketika ia berumur 13 tahun. Ia melanjutkan ke *Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaaren* (OSVIA) yang diselesaikan selama enam tahun (1917). Selepas dari sekolah ini Soewandi melanjutkan studi ke *Bestuur School* (BS) yang diselesaikan tahun 1919 dan kemudian di *Groot – Notaris* yang diselesaikan empat tahun kemudian (1923). Studinya lebih lanjut dapat berhasil dengan memperoleh gelar *meester en de rechten* (Mr) dari Sekolah Tinggi Hukum di Batavia (kini Jakarta) pada tahun 1938. Ketika itu ia telah berumur 40 tahun.

Di samping studi, Soewandi juga bekerja sejak tahun 1917, yaitu ketika ia berumur 19 tahun, selepas dari OSVIA sampai tahun 1938 pada Jawatan Pendidikan dan Kebudayaan. Ketika masih bekerja pada jawatan tersebut, pada tahun 1938 – 1939 Soewandi melakukan kunjungan ke Negeri Belanda dan Inggris untuk mempelajari sastra dan film di sekolah-sekolah kedua negeri tersebut. Sekembalinya dari luar negeri Soewandi menjabat administratur, kemudian sekretaris pada jawatan tersebut pada tahun-tahun menjelang kedatangan pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang pun ia

tetap bekerja di jawatan tersebut sebagai pegawai biasa. Pada 4 Oktober 1943 ia menjadi pegawai tinggi pada jawatan yang sama tempat ia meniti karirnya.

Di samping menjadi pegawai pemerintah, Soewandi juga menjabat ketua Perkumpulan Akademisi Indonesia serta menjadi pengurus Boedi Oetomo. Bersama Soetomo, ia juga ikut aktif dalam Partai Indonesia Raya (Parindra). Ia juga menjadi anggota BPUPKI.

Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Pemerintah Indonesia berdiri. Suatu realita yang tumbuh dari kesadaran berbangsa dan bernegara telah mendorong terjadinya perubahan dalam kepemimpinan pemerintahan. Pada bulan November 1945 dibentuk suatu kabinet (eksekutif) di bawah pimpinan Sutan Sjahrir. Kabinet ini mengalami jatuh-bangun dalam menyelesaikan masalah pertikaian Indonesia-Belanda seperti yang tertuang dalam perjanjian Linggarjati. Dengan kondisi yang ada pada saat itu, pada tahun 1946 itu permulaan Kementerian Pengajaran diubah menjadi Kementerian Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan. Pimpinannya pun mengalami beberapa kali pergantian.

Satu tahun setelah perubahan pola pertanggungjawaban pemerintah yang melahirkan Kabinet Sjahrir, Mr. R. Soewandi ditunjuk menjabat menteri pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kabinet Sjahrir III. Ia menduduki jabatan tersebut selama kurang lebih tujuh bulan (November 1946 sampai Juni 1947). Bersama-sama Soewandi, Ir. Goenarso pun diangkat sebagai menteri muda pada kementerian tersebut.

Soewandi kemudian membentuk Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia dengan 52 orang anggota. Anggota panitia ini diambil dari semua lapisan dan aliran yang ada serta mencakup semua lapangan dan tingkatan. Panitia ini bertugas menurut pengarahan Soewandi, yaitu: (1) merencanakan susunan baru untuk tiap-tiap macam sekolah (*schooltype*), (2) menetapkan bahan-bahan pengajaran dan menimbang keperluan yang praktis dan tidak terlalu berat, dan (3) menyiapkan rencana-rencana pelajaran untuk tiap-tiap sekolah dan tiap-

tiap kelas termasuk fakultas, dengan disertai daftar dan keterangan-keterangan yang langsung. Di samping itu hal-hal lain khususnya mengenai rencana pelajaran, perlengkapan sekolah, organisasi dan administrasi, serta pemeliharaan isi pendidikan dan pengajaran, termasuk soal-soal agama, budi pekerti dan budaya menjadi perhatian panitia pula.

Pembentukan panitia ini berdasarkan usul Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) pada akhir Desember 1945. Dalam usul tersebut dikemukakan tentang pentingnya secepat mungkin mengusahakan perubahan pendidikan dan pengajaran sesuai Undang-Undang Dasar. Usul tersebut memuat juga pedoman pelaksana antara lain.

1. Perlu disusun pedoman pendidikan dan pengajaran baru yang sesuai dengan dasar negara, jiwa pendidikan kolonial harus diganti secara revolusioner.

2. Untuk memperkuat kesatuan rakyat hendaklah diadakan satu macam sekolah untuk segala lapisan masyarakat.

3. Metodik yang berlaku di sekolah hendaklah berdasarkan sistem sekolah kerja.

4. Pengajaran hendaklah mendapat tempat yang teratur, seksama dan mendapat perhatian semestinya dengan tidak mengurangi kemerdekaan pemeluk agama. Madrasah telah lama berakar dalam masyarakat Indonesia, oleh sebab itu perlu mendapat bantuan dan tuntutan serta bantuan materiil dari pemerintah.

5. Kewajiban belajar yang lamanya enam tahun dilaksanakan secara berangsur dan dalam waktu 10 tahun tiap anak Indonesia sudah bersekolah.

6. Di sekolah rendah tidak dipungut uang sekolah.

Dalam masa jabatannya itu Soewandi membentuk juga suatu komisi yang bertugas untuk: (1) menetapkan istilah-istilah dalam Bahasa Indonesia, (2) menetapkan tata Bahasa Indonesia, dan (3) menetapkan kamus baru atau menyempurnakan kamus yang telah ada untuk keperluan Bahasa Indonesia di se-

kolah. Komisi atau disebut juga Panitia Pekerja dipimpin oleh Sutan Takdir Alisjahbana dengan lima orang anggota. Panitia berhasil melahirkan Ejaan Republik atau disebut juga Ejaan Suwandi (bukan Ejaan Soewandi) dengan 5.000 istilah baru. Perubahan ejaan ini merupakan salah satu segi dari politik bahasa nasional yang mendukung perkembangan kebudayaan nasional.

KH. A. WACHID HASJIM

Kiai Haji Abdul Wachid Hasjim dilahirkan pada 1 Juni 1914 di lingkungan Pesantren Tebuireng, Desa Tebuireng, Jawa Timur. Ia adalah anak kelima dari sepuluh bersaudara pasangan Kiai Haji Hasjim Asy'ari dan Nafiqah, puteri Kiai Ilyas dari Sewulan Madiun. Kiai Haji Hasjim Asj'ari, ayahnya, adalah seorang tokoh Agama Islam kharismatis yang disegani serta pendiri Pondok Pesantren Tebuireng Pondok pesantren yang didirikan tahun 1899 tersebut dibangun dengan berbagai tantangan, terutama dari masyarakat sekitar Desa Tebuireng yang tidak menghendaki adanya pesantren di lingkungan mereka. Penolakan tersebut dikarenakan kondisi sosial ekonomi yang melingkupi masyarakat sebagai akibat pelaksanaan politik ekonomi liberal kaum kolonial. Dibukanya perkebunan tebu dan pabrik gula menghasilkan pola hubungan produksi antara masyarakat dengan pabrik, tetapi sewa tanah, upah kerja dan ganti rugi penanaman padi yang rendah, sementara tuntutan pihak pabrik untuk meningkatkan produksinya sangat tinggi, sehingga menimbulkan masalah bagi penduduk. Akibat tekanan ekonomi, masyarakat Tebuireng mencoba melupakan kehidupan yang pahit dengan berbagai tindakan amoral seperti berjudi, merampok, dan lain-lain.

Berbagai permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat Desa Tebuireng justru mendorong KH. Hasjim Asj'ari untuk

menjalankan kegiatannya sebagai penyiar Agama Islam dengan misi mengubah sikap dan perilaku penduduk. Dengan kelebihannya dalam bidang ilmu agama, teknik penyiaran di samping pribadinya yang khas, akhirnya KH. Hasjim Asy'ri dapat mengembangkan Pesantren Tebuireng menjadi salah satu "pesantren induk" untuk penyebaran atau pembentukan pesantren baru. Melalui ayahnya pula, Wachid Hasjim menerima pendidikan Islam untuk pertama kalinya. Ia begitu cepat menguasai hafalan-hafalan dari berbagai kitab maupun karya-karya sastra Arab. Kehausan akan ilmu pengetahuan menjadikan Wachid Hasjim seorang "kutu buku". Kegemarannya membaca menyebabkan Wachid Hasjim mengoleksi dan berlangganan berbagai majalah serta surat kabar dari dalam maupun luar negeri, baik yang berbahasa Arab, Melayu, Belanda, maupun Inggris. Sebagai anggota perpustakaan di Surabaya, Wachid Hasjim melalap habis koleksi buku di perpustakaan tersebut. Dalam usia remaja, pengetahuannya telah demikian luas. Dengan cara belajar sendiri, Wachid Hasjim mempelajari banyak bidang ilmu pengetahuan seperti sejarah, filsafat, politik, ekonomi, pengetahuan alam, dan seni-budaya.

Setelah cukup memperoleh pendidikan di Pesantren Tebuireng, pada tahun 1932 Wachid Hasjim pergi ke Mekkah untuk memperdalam ilmu pengetahuan sekaligus menunaikan ibadah haji. Sekembalinya dari Mekkah, semakin bertambah pula pengetahuannya. Ayahnya pun secara diam-diam telah mengarahkannya untuk menjadi calon kiai muda. Kecerdasan, ketekunan, pemilikan pengetahuan yang luas serta penguasaannya terhadap berbagai bahasa, telah mendorong ayahnya, KH. Hasjim Asj'ari, mengangkat Wachid Hasjim sebagai asisten pendamping dalam menyiapkan dan mengerjakan tugas-tugasnya, mulai menyiapkan kurikulum, menjawab surat-surat yang berkaitan dengan hukum Islam hingga menghadiri berbagai ceramah dan pertemuan ilmiah. Ia tumbuh menjadi intelektual muda Islam.

Sementara itu Pondok Pesantren Tebuireng terus mengalami pembaharuan, apalagi setelah dipimpin oleh para kiai muda seperti KH. Mohammad Ilyas (sepupu Wachid Hasjim) dan KH.

Wachid Hasjim. Kiai Haji Mohammad Ilyas pernah memperoleh pendidikan di HIS Surabaya, karena itu ia menambah kurikulum pesantren dengan pelajaran-pelajaran yang ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan Barat. Berbagai pembaharuan yang dilakukan di Pesantren Tebuireng tidak berjalan mulus. Mereka yang tidak setuju banyak yang meninggalkan pesantren, tetapi kharisma dan kepandaian yang dimiliki KH. Wachid Hasjim dapat meyakinkan orang-orang bahwa pesantren adalah gabungan tempat pendidikan dan latihan agama, praktek dan pengabdian amal ibadah sekaligus tempat untuk menguasai ilmu pengetahuan umum. Menurut KH. Wachid Hasjim, pembaharuan tersebut meliputi pengorganisasian dan manajemen, penerapan kurikulum serta mengembangkan hubungan yang seimbang antara pesantren dengan masyarakat di luar pesantren. Di bawah kepemimpinan KH. Wachid Hasjim jumlah santri yang belajar di Pesantren Tebuireng meningkat hingga 2000 orang.

Pada tahun 1926 akan diselenggarakan kongres Islam sedunia di Hejaz. Kongres Al-Islam se-Indonesia menunjuk wakil-wakil yang akan menjadi anggota delegasi ke Hejaz. Ternyata wakil-wakil yang ditunjuk tidak mengikutsertakan golongan ulama tradisional. Utusan tersebut di antaranya HOS. Tjokroaminoto (intelektual Islam berpendidikan barat dari Sarekat Islam), KH. Mas Mansoer (golongan modernis Islam), dan wakil Muhammadiyah lainnya. Kekecewaan golongan ulama Islam tradisional menimbulkan tercetusnya keinginan untuk mengirim delegasi tersendiri ke Hejaz. Untuk merealisasi gagasan tersebut, kemudian diadakan pertemuan para ulama tradisional di Surabaya pada 31 Januari 1926. Ternyata pertemuan tersebut menghasilkan keputusan penting yang lain, yaitu tercetusnya gagasan dari KH. Hasjim Asy'ari untuk membentuk suatu organisasi sebagai wadah para ulama untuk membicarakan masalah-masalah penting, yang kemudian dikenal dengan nama Nahdlatul Oelama (NO).

Nahdlatul Oelama merupakan suatu organisasi di mana KH. Wachid Hasjim untuk pertama kalinya melibatkan diri. Karimnya di organisasi tersebut dimulai sebagai penulis ranting NO di Cukir, kemudian ketua NO cabang Jombang, dan tahun 1940

diangkat menjadi anggota Pengurus Besar NU bagian Ma'arif (bagian pengajaran). Di bagian Ma'arif, KH. Wachid Hasjim menemukan tempat yang sesuai dengan bakat yang dimilikinya sebagai ulama sekaligus intelektual muda Islam yang begitu menaruh perhatian terhadap pendidikan di kalangan santri Kiai Haji Wachid Hasjim menginginkan adanya pembaharuan pada madrasah-madrasah di Indonesia. Meskipun menerima berbagai kritik, KH. Wachid Hasjim tetap konsisten dengan konsep pendidikannya yang cukup radikal. Ia mencoba menjelaskan konsep-konsepnya tersebut melalui berbagai tulisan di majalah organisasi ataupun ceramah-ceramah. Akhirnya cita-cita KH. Wachid Hasjim untuk mengadakan reorganisasi pada madrasah-madrasah di Indonesia, memperbaharui kurikulum, dan kualitas tenaga pengajar, disetujui untuk dijadikan pedoman bagi madrasah-madrasah se-Indonesia.

Meskipun pada mulanya lebih menekankan diri pada penyiaran agama, tetapi situasi politik yang terjadi menjelang keruntuhan Pemerintah Hindia Belanda tidak luput dari perhatian kiai muda dari Nahdlatul Oelama itu. Berbagai politik pergerakan pun mengadakan federasi dengan membentuk Gabungan Politik Indonesia (GAPI) dalam rangka mengantisipasi kondisi politik terakhir di tanah air. Sementara Nahdlatul Oelama bersama organisasi Islam lainnya membentuk federasi MIAI (Majelis Islam Ala Indonesia) di tahun 1937. Ketika GAPI melakukan manuver politik dengan mengadakan resolusi yang bertujuan mengubah susunan ketatanegaraan dengan semboyan "Indonesia Berparlemen", MIAI mendukung resolusi tersebut, tetapi resolusi tersebut ditolak *Volksraad* pada tahun 1940. Penolakan tersebut dijawab oleh GAPI dan MIAI dengan mengadakan konferensi Kongres Rakyat Indonesia di Yogyakarta pada September 1940 yang telah menghasilkan dibentuknya Majelis Rakyat Indonesia. Kiai Haji Wachid Hasjim terpilih sebagai anggota dewan pimpinan mewakili MIAI.

Serangan militer Jepang secara kilat dapat meruntuhkan kekuatan-kekuatan kolonial di Asia Tenggara pada tahun-tahun pertama perang dunia kedua. Terbentuknya pemerintahan militer Jepang segera diikuti dengan tindakan dan berbagai kepu-

tusan politik yang memberatkan rakyat Indonesia, termasuk di antaranya keputusan untuk melakukan *seikerei* (menghormat dengan membungkukkan badan 90 derajat) kepada *Tenno Heika*, yang wajib dilakukan oleh segala lapisan masyarakat setiap pukul tujuh pagi. Keputusan ini sungguh tidak disukai umat Islam yang berpatokan pada hukum Islam, bahwa membungkuk hanya untuk menyembah Allah. Banyak tokoh nasional dan kalangan ulama yang dituduh menentang berbagai kebijaksanaan Jepang ditangkap dan dipenjarakan termasuk KH. Hasjim Asy'ari, ayahanda KH. Wachid Hasjim. Kiai Haji Wachid Hasjim berusaha membebaskan ayahandanya, dan berkat pertolongan rekannya berkebangsaan Jepang yang beragama Islam, Abdulhamid Ono yang berpengaruh di kantor rahasia Jepang, akhirnya KH. Hasyim Asy'ari dibebaskan Jepang.

Ketika posisi Jepang mulai terdesak dalam perang Pasifik, mereka mencoba merangkul kembali para tokoh nasionalis dan tokoh Islam Indonesia. Untuk Umat Islam dibentuk badan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dengan KH. Hasyim Asj'ari sebagai ketua pengurus besar dan KH. Wachid Hasjim sebagai ketua muda. Kiai Haji Wachid Hasjim menyadari bahwa badan tersebut akan digunakan Jepang sebagai alat propaganda dan pengerahan tenaga *romusha*. Untuk itu ia mengajak para intelektual muda Islam seperti Mohammad Natsir, Harsono Tjokroaminoto, Prawoto, dan Zaenal Arifin untuk bergabung dan mengorganisasi persiapan-persiapan ke arah perlawanan rakyat Aktivitas; lain KH. Wachid Hasjim adalah menerbitkan majalah *Suara Muslimin Indonesia* dan mendirikan Badan Propaganda Islam yang giat melakukan propaganda melalui corong radio, rapat umum, ceramah perjuangan dan latihan kedisiplinan.

Dalam BPUPKI di mana Wachid Hasjim menjadi anggota, ia ikut terlibat dalam Panitia Sembilan. Panitia ini menghasilkan rumusan Piagam Jakarta yang kemudian menjadi bagian dari Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) dan menjadi salah satu agenda pembicaraan pada persidangan kedua BPUPKI dari 10 hingga 16 Juli 1945. Tugas tersebut diserahkan kepada Panitia Perancang UUD, dengan KH. Wachid Hasjim sebagai

salah satu anggotanya. Pembahasan di sini cukup alot, terutama ketika membahas kalimat pada rencana Pembukaan UUD tersebut, yaitu kalimat, "**. . . . berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya**". Terjadi perdebatan di mana Mr. Latuharhary berkeberatan atas pemenggalan kalimat, "**. . . . dengan kewajiban dan seterusnya . . .**", yang menurutnya dapat berakibat tidak menyenangkan bagi masyarakat agama lain. Dalam persoalan tersebut KH. Wachid Hasjim sebagai tokoh Islam dihadapkan pada pilihan yang cukup rumit, tetapi dengan jiwa besar, pandangannya yang moderat, dan sikap bijaksananya, terutama karena keyakinannya pada pandangan Hatta, akhirnya ia bersama wakil-wakil golongan Islam lainnya sepakat menghapuskan kalimat tersebut.

Dalam rapat Panitia Perancang UUD 13 Juli 1945, jiwa besar KH. Wachid Hasjim kembali diuji. Ketika ia mengajukan usulan agar pasal 4 ayat 2 UUD ditambah dengan kata-kata, "**. . . . yang beragama Islam**". Argumen KH. Wachid Hasjim didasarkan pandangan, jika Presiden beragama Islam, maka perintah-perintah yang berbau Islam akan besar pengaruhnya. Usul KH. Wachid Hasjim berikutnya mengenai pasal 29, agar diubah sehingga berbunyi, "**agama negara ialah agama Islam**". Hal ini menurut KH. Wachid Hasjim erat kaitannya dengan pembelaan, karena menurut ajaran agama Islam, nyawa hanya boleh diserahkan untuk ideologi agama. Usulan-usulan tersebut ditolak H. Agus Salim yang memandang usulan tersebut mementahkan lagi kompromi yang telah disepakati sebelumnya antara golongan Islam dengan golongan nasionalis. Setelah melalui perdebatan yang juga melibatkan dr. Sukiman, R. Oto Iskandar Di Nata, Wongsonegoro dan Prof. Dr. P.A.H. Djajadiningrat, akhirnya KH. Wachid Hasjim dengan jiwa besar membatalkan usulan tersebut demi terciptanya Negara Indonesia merdeka yang bersatu padu.

Di berbagai sidang BPUPKI kemudian Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), KH. Wachid Hasjim bersama-sama para pendiri negara lainnya menyumbangkan pikiran dan tenaganya demi terciptanya dasar bagi masa depan kehidupan Indo-

nesia merdeka. Di zaman kemerdekaan pun, tenaga dan pikiran KH. Wachid Hasjim tetap dibutuhkan. Ia pernah menjabat menteri negara dalam Kabinet Soekarno–Hatta, menteri agama Kabinet Moh. Natsir tahun 1950), dan menteri agama (Kabinet Sukiman tahun 1951). Menjelang akhir hayatnya, KH. Wachid Hasjim juga mencurahkan waktunya sebagai ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Oelama. Berkaitan dengan posisinya tersebut, dalam perjalanan menghadiri rapat Nahdlatul Oelama di Sumedang, ia mengalami kecelakaan di daerah Cimindi. Setelah dirawat di RS. Boromeus, Bandung, akhirnya KH. Wachid Hasjim meninggal dunia pada 19 April 1953 dalam usia relatif muda (38 tahun).

Karya dan pengabdianya untuk bangsa serta negara tidak diragukan lagi, terutama dalam penyusunan dan perubahan rancangan UUD, ketika tercapai kompromi bersejarah antara golongan nasionalis dengan golongan agama, yang terjadi dalam sidang-sidang BPUPKI di bulan Juli 1945 itu, dan saat-saat pengesahan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945.

P.F. DAHLER

Dahler lahir 21 Februari 1883 di Semarang. Tidak terdapat informasi dasar tentang latar keluarga dan pendidikan yang pernah ditempuh tokoh ini. Kalau melihat namanya diperkirakan ia seorang Indo-Belanda, dan jika diikuti pemikirannya dapat diduga tokoh ini beragama Islam. Sementara rangkaian pemikiran dan keterlibatannya dalam masa pemerintahan kolonial Belanda, memperlihatkan tokoh ini mempunyai latar pendidikan jenjang pamong praja. Perhatikan saja tokoh ini menjadi pejabat pamong praja dalam tahun 1903-1917. Selanjutnya selama tujuh tahun menjadi pejabat di kantor Volkslektuur (Bahasa dan Kebudayaan). Dalam lapangan politik, tokoh ini menjadi anggota Volksraad mewakili insulinde dalam masa 1922-1924, 1925, 1927, dan 1929-1930

Tokoh pejuang nasional ini tampil dalam persidangan BPUPKI dan 10 Juli 1945. Dalam kesempatan tersebut, Dahler mengemukakan pendiriannya tentang bentuk negara yaitu bentuk kerajaan. Ia mengemukakan pendapatnya itu berdasarkan, atau tepatnya beralasan, filsafat ketimuran. Dalam filsafat tersebut kerajaan merupakan corak kemajuan bersama, kemajuan agama dan kemajuan segala-galanya. Menurut Dahler raja itu selalu mejadi wakil Allah di dunia ini. Dahler melihat keadaan bangsa Indonesia secara umum masih bertalian teguh dengan adat-istiadat dahulu kala, tetapi yang menarik dari

ungkapan penting Dahler dalam persidangan tersebut adalah soal kemerdekaan. Dalam soal yang satu ini, Dahler amat setuju dengan preambule (pembukaan) yang telah dibicarakan dalam Panitia Sembilan dari rencana Pernyataan kemerdekaan itu. Ia tegaskan sikapnya tentang keinginan yang sudah lama terpendam itu, Indonesia Merdeka.

Dahler tampil berbicara lagi dalam rapat kedua Panitia Perancang Undang-undang Dasar 15 Juli 1945. Dalam rapat tersebut Dahler mempersoalkan tentang, "Siapa yang menjadi warga negara dan apa syaratnya". Ia mempersoalkan pendapat yang dikemukakan sebelumnya oleh Liem Koen Hian. Menurut Liem, "semua orang Tionghoa pada saat ini menjadi warga-negara, tetapi diberi kemerdekaan, boleh setuju yang tidak suka boleh menolak". Untuk itu Dahler mengusulkan agar dalam UUD disebutkan siapa-siapa yang menjadi warga-negara --ialah orang Indonesia asli -- untuk selanjutnya ditetapkan dengan undang-undang. Dahler menekankan sekali tentang "orang Indonesia asli" itu.

Pendapat Dahler ini menyimpulkan adanya tiga pendapat dalam rapat tersebut. Ketiga pendapat itu adalah (1) usul Liem Koen Hian, (2) usul Yamin yang sama dengan usul Liem, dan (3) usul Dahler dengan materi "syarat yang mengenai warga-negara ditetapkan dengan undang-undang", bahkan Dahler menegaskan agar terlebih dahulu ditetapkan siapa yang menjadi warga negara dan apa syarat-syaratnya.

Pandangan Dahler ini membuka pembahasan yang menajam diantara para anggota sidang. Dua pembicara (R Soekardjo Wirjopranoto dan Mr. Soetardjo Hadikoesoemo) mempersoalkan ketegasan Dahler itu, dan seorang anggota lainnya, Mr. A.A Maramis, meminta agar tetap dipertahankan rumusan pasal 26 yang diusulkan oleh panitia (dalam hal ini diwakili oleh Mr. Soepomo). Rumusan usul panitia didukung oleh Yamin, dan ia menarik usul yang tadinya sama dengan usul Liem. Dengan penarikan usul Yamin, tercapailah kesepakatan (mufakat) bulat tentang hal warga negara itu.

Dalam pembicaraan tentang warga-negara itu, Dahler dianggap mewakili golongan Eropa. Hal ini ditegaskan oleh

Yamin dalam penarikan usulnya yang menyebut "saya sebenarnya bermaksud untuk memberi pintu kepada golongan Dahler, Baswedan dan Tionghoa". Baswedan mewakili peranakan Arab.

Sumbangan lain dari Dahler dalam persidangan BPUPKI adalah usulnya yang menjembatani perbedaan pendapat tentang masalah jaminan negara terhadap pelaksanaan agama yang dianut oleh warga negara yang ada. Dalam perdebatan yang melibatkan beberapa anggota (Abdul Fatah Hasan, Soepomo, Sanoesi dan J. Latuharhary) muncul masalah merumuskan kalimat yang tepat untuk pasal 28 ayat kedua. Para anggota tersebut saling meragukan kepastian jaminan negara nantinya tentang kemerdekaan dalam menjalankan agama yang saling berbeda dalam masyarakat, bahkan keraguan itu dikemukakan juga oleh Wongsonegoro dengan mengingat materi pembicaraan dalam rapat Panitia Kecil perancang Undang-undang Dasar. Adalah Hatta yang mendukung usul Dahler sehingga dapat dicapai perbaikan kalimat yang dapat memenuhi rasa jaminan itu. Rumusan Dahler itu, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memilih agamanya dan akan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing" diperbaiki oleh Soepomo tanpa mengubah substansi materinya.

Dalam masa mempertahankan kemerdekaan, Dahler menjabat ketua Balai Bahasa yang dibentuk oleh Menteri PP & K Ali Sastroamidjojo (Kabinet Amir Syarifuddin I). Maksud didirikan Balai Bahasa sesuai dengan politik bahasa yaitu kebijaksanaan di dalam menentukan pilihan terhadap satu atau lebih bahasa dan bagaimana menggunakan serta mengembangkannya demi kepentingan masyarakat atau bangsa. Balai ini mempunyai empat seksi yaitu seksi Bahasa Indonesia, seksi Bahasa Jawa, seksi Bahasa Sunda, dan seksi Bahasa Madura. Balai Bahasa bertugas meneliti Bahasa Indonesia dan Daerah, memberi bimbingan kepada masyarakat tentang penggunaan Bahasa Indonesia dan Daerah, dan mengusahakan adanya kesatuan dalam segala persoalan Bahasa Indonesia. Dalam kegiatannya, balai ini menerbitkan majalah *Medan Bahasa*.

DR. SUKIMAN WIRJOSANDJOJO

Sukiman adalah anak bungsu empat bersaudara dari keluarga Wirjosandjojo, yang lahir pada tanggal 19 Juli 1898 di Kampung Beton, Solo. Ayahnya lebih dikenal sebagai Saudagar bahan pangan seperti beras dan lain-lainnya. Usaha Wirjosandjojo ini tidak hanya bergerak di Kota Solo bahkan relasi dagangnya terdapat di kota-kota lain. Sehingga terjadilah persahabatan antara Wirjosandjojo dan Van Der Wal seorang pensiunan tentara Belanda yang mencurahkan perhatiannya pada bidang pendidikan dengan mengurus suatu asrama khusus untuk anak-anak yang sekolah di Boyolali.

Secara resmi Sukiman agak terlambat memasuki bangku pendidikan. Ia dimasukkan ayahnya ke Europese Lagere School. Untuk melapangkan jalan, Sukiman diambil menjadi anak angkat oleh Van Der Wal dan tinggal di tempat orang tua angkatnya itu. Ia bersekolah selama tujuh tahun di ELS itu.

Setelah lulus dari Europese Lagere School, Sukiman melanjutkan studinya ke STOVIA di Batavia (kini Jakarta). Di sekolah yang baru ini, Sukiman memperoleh beasiswa dari Pemerintah Hindia Belanda.

Sewaktu belajar di STOVIA itu, ada sebuah tawaran pekerjaan dari Perusahaan Kereta Api yang hampir menggoyahkan iman Sukiman untuk meninggalkan studinya. Akan tetapi setelah mendapat persetujuan dari orang tuanya yang bersedia

membiayainya untuk meneruskan studinya sampai Art (baca : dokter) penuh di Negeri Belanda, maka ia bersedia melanjutkan sampai selesai.

Dalam masa studinya di Stovia itu, ia ikut dalam Tri Koro Darmo yang kemudian berubah menjadi Jong Java. Di dalam setiap kesempatan baik di dalam forum resmi atau ditempat terbuka ia turut menyampaikan ide dan buah pikirannya untuk kepentingan Jong Java. Sukiman turut berpartisipasi dan memberikan andil dalam pertumbuhan Jong Java. Oleh karena dedikasi dan perhatiannya terhadap perkembangan Jong Java, maka Kongres Jong Java di Solo pada tanggal 21 – 27 Mei 1922 memutuskan untuk menawarkan anggota kehormatan kepada Sukiman.

Selain aktif di Jong Java, Sukiman tidak melupakan pelajarannya di STOVIA Batavia. Ia berhasil meraih gelar Indische Art pada tahun 1922.

Di saat Kongres Jong Java di Bogor, Sukiman menyampaikan pidato dengan menjelaskan apa artinya persatuan, dan bagaimana membinanya supaya berjalan dan memberi faedah dan manfaat. Pidato ini mengandung makna yang menggugah hati dan membangkitkan semangat persatuan bangsa diantara para hadirin.

Dalam perkembangan selanjutnya, setelah berumah tangga dan mempunyai seorang anak, Sukiman meneruskan studinya di tingkat doktoral pada Fakultas Kedokteran di kota Amsterdam, dan ia berhasil mendapat gelar Art penuh.

Kehadiran Sukiman di Negeri Belanda membawa perubahan dalam perkembangan Perkumpulan Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa yang ada di negeri Belanda sehingga menjadi Indonesische Vereniging (Perhimpunan Indonesia) di bawah pimpinan Iwa Koesoema Soemantri ketika itu. Pada periode kepengurusan Nazir Datoek Pamoentjak (1922 – 1923) Sukiman mendapat kepercayaan menjadi ketua panitia peringatan ke 15. Ia merencanakan kegiatan menerbitkan sebuah Buku Peringatan (Geden Boek) yang akan dikeluarkan dua tahun kemudian.

Pada periode kepengurusan Nazir Datoek Pamoentjak (1924 – 1925) dengan suara bulat terpilih Sukiman Wiryosandjoyo sebagai ketua perkumpulan, dan pada awal kepengurusannya bahasa Indonesia dipakai secara resmi dalam rapat atau pertemuan dalam organisasi yang dipimpinnya itu. Ia juga menyetujui usul Ahmad Soebardjo bahwa setiap bangsa Indonesia dengan tidak mengenal suku dan perbedaan agama diharuskan mengenakan kopiah.

Pada pertengahan tahun 1925, diterbitkan Buku Peringatan (Geden boek) dalam bahasa Indonesia dan bahasa Belanda. Dalam buku itu Sukiman dan kawan-kawan mengetengahkan tentang kegoncangan dan kegelisahan sosial yang timbul di tanah jajahan, seperti peranan golongan komunis dalam kalangan pekerja dan serikat-serikat buruh.

Sekembalinya dari Negeri Belanda (1926), Sukiman oleh pimpinan PKU Muhammadiyah, dr. Soemawidigdo, ditarik dalam lingkungan organisasi bidang kesehatan organisasi sosial Islam itu. Sukiman mengabdikan di Rumah Sakit PKU Yogyakarta selama dua tahun sesudah itu ia mendirikan Spesialis paru-paru.

Selain bekerja dalam bidang profesinya itu, Sukiman membagi perhatiannya pada bidang politik. Ia masuk Partai Sarekat Islam dengan alasan bahwa pilihan itu adalah bagian dari keyakinannya dan melihat mayoritas yang menderita adalah Umat Islam di Indonesia. Sukiman menjadi tokoh atas bimbingan HOS Tjokroaminoto dan Haji Agoes Salim.

Pada tahun 1930 Partai Sarekat Islam berubah menjadi Partai Serikat Islam Indonesia (PSII). Namun dalam perkembangannya, Sukiman kurang sepaham dengan sikap dari tokoh-tokoh PSII yang terlalu ketat berpegang pada disiplin partai dan politik hijrah. Ketika itu Sukiman dan Soerjopranoto sebagai pimpinan dan wakil pimpinan Perserikatan Pegawai Pegadaian Hindia (PPPH) sedang berjuang keras membela nasib para pegawai tersebut agar mendapat gaji yang layak dari pemerintah Belanda. Perjuangan Sukiman merugikan nama baik HOS

Tjokroaminoto yang segera membawa masalah ini ke dalam Kongres PSII pada bulan Maret 1933 di Jakarta. Ternyata Kongres memutuskan bahwa Sukiman dan kawan-kawannya dikeluarkan dari keanggotaan PSII. Hal ini diprotes Sukiman yang menganggap keputusan tersebut berat sebelah, sehingga pada akhirnya Sukiman diskors dari PSII. Namun kegiatan membela para pegawai pengadilan di PPPH tidak dilepas begitu saja oleh Sukiman. Dalam hubungan dengan usaha tersebut Sukiman dan H Agoes Salim berangkat ke Jenewa sebagai utusan Indonesia dalam Kongres Buruh Internasional.

Setelah Sukiman menyatakan keluar dari PSII, ia bersama tokoh-tokoh Islam serta dukungan kuat dari Muhammadiyah membentuk Partai Islam Indonesia (PARI) yang tujuannya mencapai Indonesia merdeka berdasarkan Islam. Partai ini kemudian dilebur menjadi PII (Partai Islam Indonesia) di Solo pada tahun 1938 dan ketuanya adalah Raden Wiwoho.

Sukiman juga turut berperan dalam pembentukan perserikatan dari partai-partai yang ada di Indoneia. Ia aktif dalam MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia), tempat umat Islam membicarakan dan memutuskan persoalan yang dipandang penting bagi kemaslahatan umat dan agama Islam. Namun sejak pecah perang Pasifik, anggota-anggota PII ditangkap dengan tuduhan bekerja sama dengan Jepang untuk menggulingkan pemerintah Hindia Belanda.

Pada masa pendudukan Jepang, Sukiman lebih banyak mencurahkan perhatian pada bidang politik, meskipun tidak begitu menonjol, kecuali pada masa-masa akhir kekuasaan Jepang. Kegiatan Sukiman ketika itu hanya pada MIAI dan Poetera cabang Yogyakarta sebagai anggota pimpinan. Hal ini karena mendapat kekangan yang ketat dari pemerintah pendudukan Jepang.

Sukiman menjadi anggota BPUPKI. Dalam kesempatan bicara pada rapat 30 Mei 1945, Sukiman menyampaikan pandangannya, sebagai orang Islam, sebagai berikut :

Disitu kita mendapat kesan dari pada perjalanan perjuangan antara kekuasaan negara dengan kekuasaan rakyat, hingga di dalam negara seperti Inggris yang dulu di perintah secara dispo-

tisch, secara paksaan oleh pihak raja, sekarang terdapatlah suatu bentuk yang di dalam hakekatnya adalah republikein, akan tetapi di dalam Merknnya dinamakan Kerajaan, yaitu hanya symbolish atau sebagai etiket saja.

Selain itu Sukiman sangat sepaham bahwa pimpinan negara tidak turun-temurun dan dipilih dalam waktu tertentu dan bentuk negara Islam adalah mirip dengan bentuk negara republik.

Dalam sidang tanggal 15 Juli 1945, Sukiman mendapat kesempatan lagi untuk menyumbangkan buah pikirannya dalam membahas rancangan Undang-Undang Dasar yang telah disusun oleh Panitia Perancang materi tersebut. Sukiman memfokuskan perhatiannya pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan mengusulkan supaya memilih MPR dan DPR dimasukkan dalam UUD, mengingat pentingnya kedudukan MPR. Seiring dengan itu ia meminta Presiden dipilih oleh MPR, dan hal ini *"buat sementara waktu tidak langsung oleh rakyat"*. Sukiman juga mengusulkan tentang hak warga negara untuk dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar sebagai pendorong untuk membesarkan jiwa rakyat Indonesia yang tertekan oleh adanya penjajah. Disamping itu Sukiman tak lupa memperjuangkan nasib umat Islam Indonesia dengan mengusulkan bahwa hak-hak kemerdekaan agama tiap-tiap penduduk sebagai aturan ketentuan bentuk Negara Indonesia Merdeka. Hal ini berkaitan dengan adanya sikap kalangan Islam, dari akibat perkembangan dalam Volksraad, yang syak wasangka dengan kalimat *"kenetralan dalam hal agama"*.

Setelah Indonesia merdeka, Sukiman duduk dalam Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Sukiman kemudian menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Selain duduk dalam pemerintahan, Sukiman tampil dalam partai Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia). Partai ini bertujuan untuk melaksanakan ajaran dan hukum Islam di dalam kehidupan orang seorang, masyarakat dan Negara Republik Indonesia menuju keridhoan Illahi, menuju Baldatun Thaibatun wa Robbun Gafur.

Dalam kabinet Hatta (Januari 1948), Sukiman diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri. Tetapi dengan adanya Agresi Militer Belanda II, Sukiman dan sejumlah menteri lainnya berhasil meloloskan diri dan berkedudukan sementara di Solo dan bergabung dengan anggota Partai Masyumi lain untuk meneruskan perjuangan dengan cara bergerilnya bersama KH Masjoer dan Soesanto Tirtopradjo di sekitar Jawa Tengah.

Sukiman ikut serta dalam KMB sebagai anggota delegasi bersama Mohammad Roem. Keduanya dari Masyumi. Dalam masa Republik Indonesia Serikat yang terbentuk dan di setujui dalam KMB, Sukiman duduk menjadi anggota DPR-RIS.

Dalam masa politik dan pemerintahan parlementer (1950-an), Sukiman ditunjuk menjadi Perdana Menteri menggantikan kabinet Natsir. Sukiman dapat bekerja sama dengan orang yang berlainan ideologi, kecuali dengan Komunis (PKI). Beliau adalah orang yang paling keras dalam menentang PKI.

Dalam perkembangan masa Sukiman lebih banyak mencurahkan perhatiannya pada bidang pendidikan di Yogyakarta. Beliau menjadi penasehat Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Di samping itu Sukiman mendapat kepercayaan menjadi Rektor Universitas Tjokroaminoto Yogyakarta. Tokoh pejuang nasional yang Islami ini meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 1972 di Yogyakarta. Almarhum dimakamkan di Makam Taman Siswa Celeban, Yogyakarta, sesuai dengan permintaan almarhum semasa hidupnya, berdampingan dengan makam almarhum Ki Hadjar Dewantara.

MR. KRMT. WONGSONEGORO

Wongsonegoro adalah putra RM. Ngabehi Tjitodiprodjo. Ia lahir pada 20 April 1895 di Surakarta. Nama kecil Wongsonegoro adalah RM. Soenardi. Ia menempuh pendidikan pertamanya di *Standardschool* kemudian ELS dengan diploma tahun 1911. Ia melanjutkan sekolahnya ke MULO yang diselesaikan pada tahun 1914. Selepas dari sekolah ini RM. Soenardi melanjutkan pelajarannya di Sekolah Menengah Kehakiman dengan diploma pada tahun 1917. Ia kemudian bekerja sebagai pegawai pemerintah keswaprajaan Kesunanan Surakarta. Ia berhasil memperoleh bia siswa dari Pemerintah Belanda untuk belajar di *Rechts Hooge School* (Sekolah Tinggi Hukum) di Batavia dan selesai pada tahun 1919. Di Batavia ia aktif dalam kegiatan pemuda, yaitu pergerakan mahasiswa dan himpunan murid *Jong Java*. Pada tahun 1928 Soenardi ikut dalam suatu badan fusi bernama Indonesia Muda. Di dalam Komisi Besar Indonesia Muda tersebut Mr. Wongsonegoro dipilih menjadi penasihat. Badan tersebut dibentuk pada 23 April 1929.

RM. Sunardi bekerja sebagai pegawai Landraad di Solo (1917). Pada tahun berikutnya (1918) menjadi sekretaris Landraad Solo. Tiga tahun kemudian (1921) menjabat bupati anom jaksa persidangan perdata merangkap ajun di kantor kepatihan bagi Karesidenan Solo. Ia kemudian menjabat "bupati najoko" Kantor Kepatihan Solo bagi pangreh praja dan Keha-

kiman merangkap hakim keluarga Seri Paduka Solo—Koo. Di samping bekerja sebagai pegawai pemerintah, Soenardi juga aktif di bidang politik misalnya menjadi ketua Boedi Oetomo cabang Solo (1923 -- 1924). Sejak 1939 sampai datangnya pemerintah pendudukan Jepang, Soenardi atau Wongsonegoro menjabat bupati Sragen.

Ketika pemerintah pendudukan Jepang membentuk BPUPKI, Wongsonegoro menjadi salah seorang anggota badan tersebut. Ia duduk dalam Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Ia ikut berperan dalam mempersiapkan perumusan pasal 29 UUD 1945 (tentang agama). Ia ikut pula dalam perdebatan tentang hal tersebut.

Dalam perdebatan tersebut terlihat pandangan dan pemikiran tokoh ini. Ia mendukung dan meminta segera saja diumumkan kemerdekaan itu. Di bagian lain tokoh ini meminta kejelasan tentang perlu adanya tingkatan dalam pemerintahan. Hal ini dikaitkan dengan perlu adanya penentuan (*votum*) dari rakyat tentang pilihan kepada bentuk negara, Republik.

Pada bagian lain lagi Wongsonegoro menyampaikan pula pendapat dan pandangan tentang masalah warga negara. Hal ini berkaitan dengan pandangan Liem Koen Hian. Menurut Wongsonegoro, perlu ada perumusan tentang warganegara di antara dua unsur sebelumnya, yaitu penduduk asli dan orang asing. Wongsonegoro tidak mengonkritkan pendapatnya itu, karena ia percaya hal itu nantinya dapat diselesaikan.

Wongsonegoro tampil lagi dalam masalah perumusan pasal-pasal dari UUD yang direncanakan oleh BPUPKI. Ia dan Djajadiningrat memperingatkan, dalam kaitan dengan preambuli dan batang tubuh UUD, "seolah-olah memaksa menjalankan syariat bagi orang-orang Islam". Dalam perkembangan selanjutnya, Wongsonegoro duduk dalam Panitia Kecil perancang UUD.

Dalam pembicaraan di panitia kecil ini, Wongsonegoro mengemukakan pendapatnya tentang masalah perumusan "menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya". Tokoh ini berkesan menerima hal tersebut, dengan anggapan "negara boleh

memaksa orang Islam menjalankan syariat agama". Ia mengusulkan penambahan kata-kata "dan kepercayaan" antara kata-kata "agamanya" dan "masing-masing". Usul Wongsonegoro ini diterima oleh panitia sehingga perumusan pasal 29 butir 1 dan 2 seperti yang ada sekarang, diletakkan pada tidak adanya perubahan preambule seperti yang dihasilkan oleh Panitia Sembilan pada 22 Juni 1945 itu.

Ketika proklamasi dikumandangkan, Wongsonegoro menjabat fuko syutjokan di Semarang. Dua hari setelah proklamasi, Wongsonegoro mengumumkan melalui radio bahwa mulai saat ini semua kekuasaan atas daerah Semarang dinyatakan masuk Wilayah Republik Indonesia. Wongsonegoro kemudian diangkat menjadi wakil gubernur Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang. Di samping itu ia juga menjadi ketua Komisi Nasional Indonesia cabang Semarang, sedangkan R. Pandji Soeroso yang menjadi gubernur Jawa Tengah.

Ketika Belanda melakukan Agresi Militer II tahun 1948, Mr. Wongsonegoro ikut bergerilya di sekitar Gunung Sumbing. Setelah Agresi Belanda II berakhir, Mr. Wongsonegoro kembali memegang jabatannya dalam pemerintahan tersebut, di samping aktif bergerak di lapangan politik. Mula-mula ia aktif berperan dalam Partai Nasional Indonesia (PNI), tetapi karena dirasa PNI makin bergeser ke kiri, Wongsonegoro dan beberapa orang kawannya memutuskan untuk keluar dari PNI. Mereka mendirikan partai bernama Persatuan Indonesia Raya (PIR) dengan Wongsonegoro sebagai ketuanya.

Dalam Kabinet Hatta II, Mr. Wongsonegoro memegang jabatan menteri dalam Negeri Republik Indonesia. Sementara dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Wongsonegoro terpilih menjadi ketua delegasi gencatan senjata. Setelah Konferensi Meja Bundar berakhir, Wongsonegoro diangkat oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi sekretaris jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Di dalam Kabinet Natsir, Wongsonegoro menjabat menteri kehakiman. Sementara dalam Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) tersebut, PIR di bawah pimpinan Wongsonegoro mempunyai tiga orang wakil.

Dalam kabinet Sukiman, Wongsonegoro ditunjuk sebagai menteri pendidikan, pengajaran dan kebudayaan. Ia berperan aktif dalam suatu pertemuan (April 1974) di Surakarta yang membahas masalah-masalah pendidikan.

Dalam masa jabatannya sebagai menteri pendidikan, pengajaran dan kebudayaan, Wongsonegoro berhasil menerapkan Undang-Undang pokok Pendidikan dan Pengajaran No. 4 tahun 1950 yang telah dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia, membuka sekolah guru luar biasa di Bandung pada tahun 1951 yang mempunyai bagian pendidikan anak buta, bisu, tuli dan lemah ingatan, memperbaiki peraturan bersama antara menteri pendidikan, pengajaran dan kebudayaan dan menteri agama tentang pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri. Peraturan tersebut antara lain, bahwa di sekolah-sekolah rendah pendidikan guru agama dimulai di kelas empat dan diberikan sebanyak dua jam pelajaran dalam satu minggu, sedangkan di lingkungan istimewa pendidikan agama dapat dimulai di kelas satu, memperbaiki hubungan antara guru-guru agama dengan kepala sekolah yang bersangkutan yang diatur dalam peraturan bersama yang dikeluarkan di Jakarta pada 16 Juli 1951 oleh Menteri PP dan K Wongsonegoro dan Menteri Agama Wachid Hasjim Wongsonegoro juga berhasil mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan pemerintah pusat dalam lapangan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan kepada provinsi-provinsi.

Dalam menghadapi krisis pembentukan Kabinet, setelah jatuhnya Kabinet Wilopo, Wongsonegoro diangkat sebagai formatur dan berhasil membentuk pemerintahan pada 30 Juli 1953. Dalam kabinet baru ini Mr. Wongsonegoro menjadi wakil perdana menteri I. Perdana Menteri Mr. Ali Sastroamidjoyo ketika itu berada di Washington. Ia juga berusaha menggabungkan PIR dengan Parki dan Sarekat Kerakyatan Indonesia (SKI) menjadi FPP (Federasi Partai Partai Kebangsaan) pada tahun 1952.

Dalam masa ikut memimpin dalam kabinet itu, partai politik yang dipimpinnya pecah akibat perbedaan paham di antara

para pemimpin partai tersebut. PIR pecah menjadi dua, yaitu PIR-Hzzairin dan PIR-Wongso. Jabatan terakhir Mr. Wongsonegoro dalam bidang pemerintahan adalah gubernur yang diperbantukan pada Departemen Dalam Negeri. Ia memasuki masa pensiun pada tahun 1971. Setelah Pemilu 1971, ia terpilih menjadi anggota DPR-RI mewakili daerah Jawa Tengah.

Di samping sejumlah jabatan yang pernah didudukinya, Mr. Wongsonegoro juga banyak menaruh perhatian di bidang kepercayaan. Pada tahun 1955 -- 1970 ia menjadi ketua Badan Kongres Kebatinan Indonesia. Kemudian menjabat sebagai ketua umum Sarekat Kerjasama Kebatinan (SKK) tahun 1970 -- 1971. Ia adalah pendiri Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) sekaligus menjadi ketua umumnya (1946 -- 1973) dan sejak tahun 1977 ia diangkat sebagai sesepuh IPSI.

Mr. Wongsonegoro wafat pada 4 Maret 1974 di Jakarta dan jenazahnya dimakamkan di Makam Keluarga Istana Kendaran di Desa Tirip, Kabupaten Sukoharjo, Surakarta.

R. OTO ISKANDAR DI NATA

Raden Oto Iskandar di Nata dilahirkan di Bojongsoang, Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung pada 31 Maret 1897. Oto adalah putera Nataatmadja atau dikenal dengan nama Raden Haji Adam Rakhmat. Ibunya bernama Siti Hadijah. Oto Iskandar di Nata adalah anak ketiga dari sembilan orang bersaudara.

Kehidupan keluarga Raden Haji Adam Rakhmat termasuk keluarga yang maju pada saat itu. Mereka secara sadar menyekolahkan anak-anaknya. Oto Iskandar memulai pendidikan sekolahnya di HIS di Bandung. Kegemarannya berolah raga adalah bermain sepakbola hingga ia dewasa. Tak heran apabila ia pernah menjadi pimpinan klub sepakbola yang terkenal di Jawa Barat yaitu Persib.

Setelah tamat dari HIS, Oto melanjutkan sekolahnya ke *Kweekschool Onderbouw* di kota yang sama. Setiap murid di sekolah ini diharuskan masuk asrama. Di asrama tersebut Oto dianggap sebagai seorang anak nakal karena suka menentang gurunya. Ia sering mendapat hukuman dilarang ke luar dari kamar oleh pimpinan asrama. Oto yang mempunyai banyak inisiatif dan kreativitas dianggap sebagai anak yang suka melawan.

Oto berhasil menamatkan pelajarannya di *Kweekschool Onderbouw*, kemudian *Hogere Kweekschool* di kota lain, Purwo-

rejo, Jawa Tengah. Setelah meningkat dewasa mulai tumbuh perasaan nasionalismenya. Hal ini didukung oleh kegemarannya membaca terutama buku-buku dan surat kabar yang berbau politik, antara lain surat kabar *De Express* asuhan dr. Douwes Dekker (dr. Setiabudi) yang isinya seringkali mengecam Pemerintah Hindia Belanda. Tentu saja membaca surat kabar itu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, karena sekolah melarang murid membaca surat kabar. Dalam perkembangannya nasionalisme Oto mulai tumbuh. Ia mulai pandai berpidato. Jika berpidato kata-katanya tajam dan langsung mengenai sasarannya. Sejak itu ia pun mulai tertarik pada masalah-masalah kemasyarakatan, kebangsaan, dan perjuangan bangsa.

Setelah lulus Sekolah Guru Atas, Oto Iskandar Di Nata memulai pengabdianya sebagai guru HIS di Banjarnegara (1920 – 1921), kemudian di HIS bersubsidi, dari Perguruan Rakyat di Bandung (1921 – 1924). Di Kota Bandung, tempat ia mengajar Oto mulai aktif dalam pergerakan politik. Ia diangkat menjadi wakil ketua Boedi Oetomo Cabang Bandung. Di sana ia terpilih menjadi anggota *Gemeente Raad* (Dewan Kota) pada tahun 1921. Dalam lembaga ini Oto bersama beberapa orang kawannya termasuk dalam daftar hitam Pemerintah Hindia Belanda karena keberaniannya dalam memperjuangkan hak dan kebenaran, karena itu tidak mengherankan apabila setiap mereka mengadakan pertemuan selalu diikuti PID (*Politiek Inichtingen Dienst = Polisi Rahasia Hindia Belanda*).

Pada bulan Agustus 1928 Oto dipindahkan ke Batavia (Jakarta) untuk mengajar di HIS Muhammadiyah, tetapi keluarganya tetap tinggal di Bandung. Di sini ia lebih aktif di bidang politik dan menjadi wartawan. Karena berbagai kesibukannya, maka dengan berat hati profesinya sebagai guru ditinggalkan pada tahun 1933, walaupun perhatiannya tidak terlepas dari bidang pendidikan. Pada bulan Juli 1928 Oto menjadi pimpinan Pagoejoeban Pasoendan Cabang Jakarta sekaligus menjadi sekretaris pengurus besarnya. Organisasi ini didirikan pada 22 September 1914 dan bergerak dalam bidang kebudayaan. Lima tahun kemudian (1919) organisasi ini bergerak di bidang politik. Pagoejoeban Pasoendan berdiri atas dasar keyakinan bahwa

bangsa Indonesia mempunyai kekuatan untuk berdiri sendiri dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Pada bulan Desember 1929 Oto terpilih menjadi ketua Pengurus Besar Pagoejoeban Pasoendan di Bandung. Jabatan ini dipangkunya hingga tahun 1945. Dalam masa jabatannya Pagoejoeban Pasoendan mengalami kemajuan pesat dengan bergerak pada bidang politik, ekonomi, sosial, pers, dan pendidikan.

Pada Kongres Pagoejoeban Pasoendan yang diadakan di Tasikmalaya, Oto sebagai ketua mengajukan permohonan kepada Pemerintah Hindia Belanda untuk menjadi *reclasseringsoe-reeniging* yaitu suatu badan yang mengurus dan membantu orang-orang yang dibebaskan dari penjara. Berkat keuletannya, permohonan ini disetujui Pemerintah Hindia Belanda. Karena pentingnya peranan wanita dalam membantu perjuangan, Oto sebagai ketua tidak lupa mendirikan Cabang Pagoejoeban Pasoendan khusus wanita disebut Pasoendan Bagian Istri (PBI) pada 30 April 1930. Organisasi ini bertujuan mempertinggi derajat kaum wanita Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya PBI Bandung berubah nama menjadi Pasoendan Istri (PASI) pada tahun 1931.

Pada pertengahan Juni 1931 Oto menjadi anggota *Volksraad* (Dewan Rakyat) mewakili Pagoejoeban Pasoendan. Oto menjadi anggota *Volksraad* dalam tiga periode, yaitu periode kelima 1931 – 1934, periode keenam (1935 – 1938), dan periode ketujuh 1938 – 1942.

Sebagai organisasi politik yang kooperatif Pagoejoeban Pasoendan menitikberatkan perjuangannya di *Volksraad*. Oto mewakili Pagoejoeban Pasoendan di *Volksraad*. Ia masuk dalam Fraksi Nasional yang dipimpin oleh Moh. Hoesni Thamrin. Dalam tahun 1921 – 1924 wakil Fraksi Nasional dipegang oleh Kosasih Soerakoesoemah, R. Oto Iskandar Di Nata, Koesoema Soebrata, dan R. Idih Prawirodipoe tra. Iskandar Di Nata merupakan wakil yang paling berani sehingga ia terkenal dengan julukan "**Si Jalak Harupat**". Julukan itu diberikan karena Oto orangnya lincah dan berani, diibaratkan kelincahan dan keberaniannya seperti seekor burung jalak, dalam setiap sidang di Dewan Rakyat.

Hal itu terlihat ketika Oto Iskandar Di Nata mempertegas cita-cita Indonesia Merdeka Hoesni Thamrin dalam ungkapan-nya sebagai berikut :

Seperti orang beriman pertjaja akan adanja Allah, begitoelah djoega saja pertjaja akan datangnya Kemerdekaan bagi semoea negara terdjadjah, djoega bagi Indonesia. Dengan sendirinja djika kebebasan itoe dicapai Indonesia dengan kekerasan maka perpi-sahan antara negeri Belanda dan Indonesia akan seperti moesoeh. Peroesahaan-peroesahaan dan hak milik orang Belanda disini akan dirampas. Perdagangan Belanda akan dilarang ataoe dipersoeelit. Memperoleh Kemerdekaan dengan ataoe tanpa kekerasan seperti dikatakan akan tidak sedikit bergantoeng kepada Bangsa Belanda sendiri. Akan tetapi saja pertjaja pada Toean Ketoea, bahwa bangsa Toean yang dikenal sebagai bangsa tenang berpikir akan tahoe memilih antara doea kemoengkinan ini, mengoendoerkan diri ataoe dioesir.

Dalam sidangnya yang lain Oto Iskandar Di Nata menyatakan bahwa hasrat untuk bebas itu sudah menjadi sifat manusia. Hal itu diungkapkan Oto Iskandar Di Nata dalam ungkapan-nya sebagai berikut :

Saja kira, Toean ketoea tak oesah diberi petoendjoek lagi tentang keadaan alam jang penoeih dengan contoh-contoh jang memperlihatkan bahwa hasrat oentoek bebas itu soedah menjadi sifat. Tjobalah lihat, hewan biarpoe diikat atau dikoeroeng, tetapi mereka tetap mentjoba akan melepaskan diri. Sedjarah tiap negara coekoeop memberi peladjaran bahwa setiap bangsa jang di-djadjah mengorbankan segala sesoeatoe oentoek meningkatkan deradjat bangsa dan tanah airnja jang dalam keadaan dihina. Tanah air Toean sendirilah jang dapat dikemukakan sebagai tjontoh jang paling menarik.

Dalam sidang *Volksraad* lainnya, R. Oto Iskandar Di Nata menyatakan sebagai berikut :

Banjak orang mengatakan, bahwa tanpa adanja paksaan, tidak moengkin Nederland maoe melepaskan Indonesia, karena memiliki Indonesia itoe besar sekali manfaatnja bagi Nederland, tetapi biarpoe banjak sekali jang mengatakan demikian, saja pertjaja bahwa pada soeatoe waktue bila soedah tiba waktoenja, negeri Belanda tentoe akan melepaskan Indonesia dengan ichlas demi keselamatannja.

Berkat keberaniannya dalam mengemukakan pendapat, Oto Iskandar Di Nata mendapat julukan seorang non-kopoperator di tengah-tengah kopoperator; maksudnya, walaupun ia seorang kopoperator tetapi suara yang dibawakannya adalah suara non-kopoperator. Menjelang berakhirnya pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, peranan Oto Iskandar Di Nata dengan Pagoejoeban Pasoendan yang kooperatif menjadi sangat menonjol.

Setelah PPPKI berdiri (27 Desember 1927), atas dasar persamaan cita-cita antara PPPKI dengan Pagoejoeban Pasoendan, Oto Iskandar Di Nata menggabungkan organisasi yang dipimpinnya ke dalam PPPKI demi persatuan bangsa menghadapi kemerdekaan Indonesia, tetapi PPPKI tidak berkembang dan akhirnya bubar dengan sendirinya. Keinginan bekerjasama di antara partai-partai politik untuk menyatukan kekuatan perjuangan ditempuh dengan membentuk Gabungan Politik Indonesia (GAPI). Dalam organisasi ini, Oto beserta Pagoejoeban Pasoendan ikut pula.

Kemudian diajukan suatu mosi yang ditandatangani oleh Moh. Hoesni Thamrin, Soangkoepon, dan Oto Iskandar Di Nata yang pada prinsipnya menghendaki : (1) secepatnya diadakan perubahan dalam kedudukan rakyat Indonesia, dalam arti pemerintahan, perekonomian, dan kecerdasan pikirannya, sehingga ia dapat memperoleh hak yang luas dalam segala urusan negeri, (2) perubahan tersebut di atas harus telah terbukti ketika menyiapkan armada yang diusulkan itu.

Pengajuan usul mosi ini diterima oleh *Volksraad* dengan perbandingan suara 30 setuju dan lainnya abstain. Adapun mengenai perubahan ketatanegaraan dibicarakan dalam sidang *Volksraad* 19 Agustus 1940. Sebagian besar anggota Belanda menolak, namun setelah pendirian anggota Mussert dibantah oleh Oto Iskandar Di Nata dengan mengutip pendapat Prof. Struken yang menyatakan dengan memorandumnya dapat menunjukkan bahwa penduduk negeri pada umumnya sedikit *zakelijk* menerima kepentingan-kepentingan yang mengenai urusan negara. Beberapa anggota Belanda mengusulkan penundaan sampai sehabis perang. Hal ini ditolak oleh Oto Iskandar Di Nata dengan ungkapan sebagai berikut :

Tak ada artinya boeat manoesia peroebahan tata negara sampai habis perang. Boleh djadi nanti telat, toh Reggering Nederland kini memerintah tanpa parlemen, sehingga mengatoer sesoeatu dengan Koninklijk Besluit dalam peristiwa ini dapatlah diadakan.

Setelah Jepang menduduki Indonesia, semua partai politik dilarang karena bertentangan dengan fasisme. Untuk menyela-matkan harta kekayaan Pagoejoeban Pasoendan, Oto Iskandar Di Nata mendirikan Badan Oesaha Pasoendan dengan ketuanya H. Sanusi Hardjadinata. Oto Iskandar Di Nata sendiri mendu-duki jabatan pimpinan surat kabar *Tjahaja* di Bandung, meng-gantikan surat kabar *Sipatahoenan* yang dilarang terbit oleh Jepang.

Kemudian ketika *Jawa Hokokai* dibentuk, Oto Iskandar Di Nata ikut menjadi anggota badan resmi pemerintah ini. Tokoh ini duduk pula sebagai pimpinan Barisan Pelopor bersama-sama Ir. Soekarno, RP. Soeroso, dan dr. Boentaran Martoatmojo. Badan ini bertugas memberikan latihan-latihan militer, di sam-ping ceramah-ceramah politik untuk menggerakkan massa rak-yat, memperkuat pertahanan dan hal-hal yang berhubungan de-ngan kesejahteraan rakyat.

Oto Iskandar Di Nata adalah anggota *Tjhuo Sangi-in* yang kemudian menjadi anggota BPUPKI. Ia ikut berbicara ketika si-dang BPUPKI membahas wilayah Negara Indonesia Merdeka yang mereka inginkan itu. Ia menjadi komisi pemungutan suara untuk menentukan wilayah negara itu. Ia juga menjadi anggota panitia perancang UUD. Dalam rapat panitia ini ia kemukakan bahwa sari usul-usul sudah masuk dalam preambuli yang mereka rancang itu. Ia mendukung pandangan Djajadiningrat tentang presiden Indonesia beragama Islam.

Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, Oto menjadi salah seorang anggota PPKI. Ia terlibat banyak dalam merumuskan pasal-pasal dari UUD. Sumbangan yang terbesar adalah, usulnya tentang pemilihan presiden dan wakil presiden yang disetujui dengan suara bulat oleh semua anggota. Usul itu adalah sebagai berikut :

"Berhoeboeng dengan keadaan waktoe saja harap soepaja pemilihan Presiden ini diselenggarakan dengan aklamasi dan saja madjukan sebagai tjalon jaitu Boeng Kamo sendiri. Poen oentoek pemilihan wakil Kepala Negara Indonesia saja oesoelkan tjara jang baroe ini didjalankan. Dan saja oesoelkan Boeng Hatta menjadi wakil Presiden.

Dalam sidang kedua (19 Agustus 1945), Oto Iskandar Di Nata ditunjuk sebagai ketua dari Panitia Kecil yang membuat rancangan tentang urusan rakyat, pemerintah daerah, kepolisian dan tentara kebangsaan. Ia dibantu oleh Mr. Ahmad Soebardjo, Sajoeti Melik, Mr. Iwa Koesoema Soemantri, RAAM. Wiranatakoesoemah, Dr. Muh. Amir, Hamidhan, Dr. Ratulangi dan I Gusti Ketut Pudja. Panitia ini menghasilkan usulan tentang pembentukan daerah-daerah atau provinsi, penunjukan gubernur untuk masing-masing provinsi. Susunan kepolisian, pembentukan tentara, urusan rakyat, pembentukan departemen.

Dalam perkembangan selanjutnya Oto Iskandar Di Nata menjabat sebagai menteri negara urusan keamanan. Kemudian terjadi peristiwa tragis yaitu peristiwa penculikan pada diri tokoh pejuang ini di bulan Oktober 1945. Hal ini akibat tuduhan bahwa Iskandar Di Nata berkompromi dengan Jepang untuk meminta senjata yang ada di pabrik senjata Bandung berakhir dengan tidak memuaskan bagi sementara pemuda.

Pada bulan Desember 1945, terdengar berita bahwa ia telah dibunuh di Pantai Mauk, Banten Selatan 20 Desember 1945, sedangkan jenazahnya tidak berhasil diketemukan. Semuanya ini karena salah paham sebab di tempat kediaman Oto Iskandar Di Nata diketemukan banyak uang kertas Belanda. Pada waktu itu dianggap cukup bukti, bahwa Oto Iskandar di Nata adalah kaki tangan Belanda. Kemudian ada seorang yang bernama Mudjिता mengaku sebagai pembunuh R. Oto Iskandar Di Nata, tetapi setelah diajukan ke pengadilan tetap tidak berhasil diungkap siapa yang berdiri di belakang pembunuhan Tokoh pejuang nasional ini.

Pesan terakhir Oto sebelum peristiwa ini kepada istrinya adalah sebagai berikut :

"Saja pertjaja, kamoe bisa mengoeroes anak-anak dan tidak akan menghadapi kesoelitan dalam melaksanakan kewadajibanmoe itu. Dan kalaoe kamoe yakin bahwa apa jang dikerdjakan itoe benar, kerdjakanlah, Insya Allah selamat dan Tuhan akan selaloe menolong"

AR. BASWEDAN

Abdul Rachman Awad Baswedan, seorang perintis kemerdekaan, wartawan, sastrawan, politikus, *da'ie*, dan pendiri Persatuan Arab Indonesia. Ia dilahirkan di Sura Ngampel, 9 September 1908. Ayahnya, Awad, adalah seorang yang taat menjalankan perintah Agama Islam. Ibunya bernama Alijah binti Abdoellah Djarhum. AR. Baswedan bersaudara tujuh orang. Di antara anak-anak Awad, AR. Baswedan-lah yang sangat disayang oleh keluarganya bahkan dipanggil "Bagus" karena wajahnya yang tampan.

AR. Baswedan mulai menerima pendidikan sejak umur lima tahun. Pada mulanya ia masuk Madrasah Al-Khairiyah yang berdekatan dengan Mesjid Ngampel, Surabaya. Dengan kemauan keras ia masuk ke madrasah itu tanpa disuruh. Ia mengikuti kakaknya yang sudah duduk di kelas terakhir. Selama di sekolah itu ia berkelahi dengan salah seorang pengurus madrasah dari keluarga Al Katiri. AR. Baswedan kemudian pindah belajar di Madrasah Al Irsyad Jakarta pimpinan Seh Ahmad Sjoorkati. Ia tidak lama berada di Jakarta karena ayahnya sakit keras di Surabaya. Begitu kembali ke Surabaya, AR. Baswedan melanjutkan ke *Hadramaut School*. Di sekolah ini pengajaran Bahasa Arab dan sastra amat menyenangkan hatinya.

Dalam tahun 1920, AR. Basedan masuk kursus *Nederlands Nerbond*. Pelajarannya membaca dan menulis huruf latin. AR.

Baswedan rajin membaca di samping bekerja keras di toko. Pendidikan non-formal memiliki arti penting dalam pembentukan pribadi AR. Baswedan. Pendidikan secara langsung yang dialami dengan meniru apa yang dilakukan ayahnya itu tertanam kuat di dalam hati sanubarinya. Masih banyak lagi bimbingan yang serupa dari ayahnya agar ia menjadi orang yang rajin bekerja, hemat, dan tekun. Sedemikian rajin ayah Abdul Rachman mendidik anaknya di toko, hingga diberinya pelajaran membaca dan menulis huruf latin yang tak diajarkan di Sekolah Arab di masa itu. Dari sana Abdul Rachman selain menguasai Bahasa Arab, juga dibacanya buku dalam Bahasa Indonesia (terbitan Balai Pustaka) sehingga ia mampu menerbitkan majalahnya pada tahun 1936 dalam Bahasa Indonesia. Kegemarannya membaca tak terhenti, meski ia sudah menikah dan bekerja di toko ayahnya.

Di samping menjadi juru dakwah, AR. Baswedan juga menjadi anggota dan aktif di dalam *Jong Islamieten Bond* (JIB). Karena banyak mengerti tentang agama, maka ia ditugaskan untuk memberi ceramah dan kursus-kursus bagi JIB bagian wanita, JIB DA (*Dames Afdeeling*). Keaktifannya dalam organisasi itu karena tertarik pada buku-buku yang berisi gerakan wanita Mesir karangan Qosim Amin. Buku ini banyak dikutip majalah *Sadar* (1936) yang pada masa itu buku tersebut menggemparkan seluruh dunia Arab dan Islam. Isi buku itu memberikan pemikiran-pemikiran baru tentang kedudukan wanita dalam Islam.

Dalam masa itu timbul ide mendirikan Partai Arab Indonesia. Hal ini berkaitan erat dengan pengajuan prinsip tanah air Indonesia bagi kaum peranakan Arab. Ide mendirikan Partai Arab Indonesia dengan pengakuannya, tentang tanah air bagi peranakan Arab, tercetus dan dikembangkan serta diperjuangkan oleh AR. Baswedan. Cetusan ide ini merupakan "revolusi pikiran". Untuk merealisasi terwujudnya cita-cita itu bukanlah hal mudah dan ringan, tetapi harus diperjuangkan dengan menanggung segala resiko, pada hal sebelum itu AR. Baswedan sendiri termasuk pemuda yang berkobar-kobar semangat kebangsaan kearabannya dan fanatik pada satu golongan (Al Irsyad) yang bertentangan dengan kalangan bangsa Arab yang lain

yaitu Ar Rabitah.

Pada tahun 1932, untuk memenuhi permintaan mertuanya yang mulai membuka usaha rokok kretek, ia pergi ke Surabaya untuk memasarkan barang dagangan mertuanya itu. Di Surabaya, Liem Koen Hian, pemimpin redaksi harian *Tionghoa Melajoe*, menawarkan pada AR. Baswedan untuk bekerjasama dalam staf redaksi surat kabarnya. Tak ayal lagi Baswedan menerima tawaran tersebut dan keesokan harinya ia mulai bekerja pada harian *Sin Tit Po* yang pro pergerakan nasional.

Sejak semula AR. Baswedan melihat adanya perbedaan-perbedaan antara Arab peranakan dan Arab totok. Di antara dua golongan ini memang ada nuansa tingkah laku, adat-istiadat, dan lain-lain. AR. Baswedan memastikan bahwa tidak ada jalan lain untuk menghilangkan keruwetan Arab peranakan dan Arab totok kecuali mengadakan suatu gerakan khusus Arab peranakan. Dengan demikian mereka dapat terbebas dari masalah sosial dan politik yang mengganggu persatuan di antara mereka. AR. Baswedan mencetuskan anjuran tentang pengakuan Indonesia sebagai tanah air yang menjadi azas Partai Arab Indonesia (PAI) dengan menulis artikel dalam surat kabar *Matahari* berjudul *Peranakan Arab dan Totoknya*.

Selanjutnya AR. Baswedan mengadakan pertemuan di Semarang dengan pimpinan surat kabar *Pewart Arab*, Nooh Alkaf. Berkat pendekatan secara pribadi, Nooh Alkaf menyetujui kompromi yang diciptakan Baswedan, dan disetujui pula oleh tokoh Baalwi Idrus Al Jufri, seorang tokoh Arab Semarang. Walau keduanya dari golongan Baalwi, tetapi pro pada pergerakan Arab peranakan. Mereka sepakat mengadakan pertemuan di Jakarta.

Kesepakatan ini direalisasi dalam pertemuan antara AS. Alatas dan tokoh-tokoh lain di rumah Hasan Argubi, pada 11 September 1934. Pertemuan ini dihadiri oleh Hasan Argubi, kapten Arab (Al Irsyad), Abdurrahman Alaydrus (Ar. Rabitah), Abdullah Bajreri (Al Irsyad), Husen Basmamus, dan AR. Baswedan. Mereka adalah inti dari tokoh-tokoh Arab peranakan dari pihak Al Irsyad dan Ar Rabitah yang sudah lama menginginkan persatuan, namun segala usaha mereka selalu gagal.

AR. Baswedan dengan panjang lebar menyampaikan maksud kedatangannya di Batavia, yaitu membicarakan angan-angannya untuk membangun suatu pergerakan di kalangan kaum Arab peranakan. Ia menceritakan lebih jauh perjalanannya untuk maksud ini. Setelah menyelidiki situasi kalangan Arab, khususnya kaum peranakannya di Semarang, Pekalongan, Surabaya, dan Betawi, Baswedan sampai pada kesimpulan bahwa *Indo Arabische Verbond* yang didirikan oleh Alamudi bagi Arab peranakan di samping induknya yaitu *Arabische Verbond* untuk menuntut satu angan-angan politik tidak mempunyai dasar yang tegas dan sama sekali lain dengan PAI yang akan didirikan.

Dalam permulaan Oktober 1934 masyarakat Arab seluruh Indonesia digemparkan adanya Konferensi Peranakan Arab di Semarang. Pada 3 Oktober 1934, hari pertama konferensi dimulai, tibalah di Semarang orang-orang Arab peranakan terkemuka dari pihak Al Irsyad dan Ar Rabitah. Mereka adalah orang-orang yang aktif dalam mengambil bagian-bagian penting di dalam pertentangan-pertentangan di antara dua perkumpulan tadi. Mereka datang dari Surabaya, Semarang, Pekalongan, Solo, dan Jakarta dengan jumlah kurang lebih 40 orang.

Pada 5 Oktober 1934, konferensi memperdebatkan soal bentuk dan sifat organisasi, terutama masalah orang totok diterima atau tidak untuk menjadi anggota. Putusan terakhir ialah menyetujui dibentuknya organisasi khusus untuk Arab peranakan saja, sedangkan Arab totok boleh diterima sebagai anggota penyokong (donatur) dengan tidak mendapat hak suara. Dengan demikian lahirlah organisasi Persatuan Arab Indonesia. Kata "persatuan", oleh AR. Baswedan digunakan untuk menonjolkan soal persatuan yang merupakan inti anjuran AR. Baswedan bagi golongan Arab peranakan. Perkataan "persatuan" sengaja dipilih sebagai lambang persatuan Arab peranakan, mengingat selalu terjadi permusuhan antara dua kubu yang ada, Al Irsyad dan Ar Rabitah, sebelum lahirnya PAI.

Sejak tahun 1934 dimulai kebangkitan peranakan Arab. Setahun kemudian sudah dapat dilangsungkan konferensi pertama di Kota Pekalongan yang berlangsung dengan hebat dan teratur. Konferensi pertama dari cabang-cabang PAI menyusun

organisasi dan mengadakan konsolidasi serta mengesahkan anggaran rumah tangganya. Selanjutnya tiap-tiap tahun diadakan kongres di Surabaya, Cirebon, Semarang dan Solo. Sebelum kongresnya yang kelima di Jakarta, menjelang pecah Perang Dunia II, lahirlah persatuan Arab peranakan bagian wanita yang disebut PAI Istri. Di samping itu dibentuk pula bagian pemuda-nya yang disebut Lasykar PAI. Nama "persatuan" juga diganti dengan "partai", sehingga menjadi Partai Arab Indonesia.

Pada zaman Jepang, Kantor Berita Antara yang berkedudukan di Jakarta dijadikan pusat *Domei Hegemeru Natsumoto*. Pemimpin surat kabar dan berbagai pembantunya datang dari Tokyo ke Jakarta. Kedatangan mereka dengan maksud agar semua Kantor Berita Antara dilikuidasi dan diganti dengan nama *Domei*. AR. Baswedan yang hadir bersama-sama Sipahutar menyatakan keberatan mereka. Karena sikapnya yang keras itu, AR. Baswedan direncanakan untuk ditangkap oleh pemerintah pendudukan Jepang tetapi waktu itu ia berada di Solo sehingga terlepas dari rencana penangkapan. Ia bersyukur kepada Allah atas segala kemurahannya.

Dalam perkembangan selanjutnya, Ir. Soekarno selaku ketua *Jawa Hokokai* mengangkat Baswedan sebagai anggota Badan Persaudaraan Bangsa-bangsa. Dalam badan tersebut duduk seorang Indo-Belanda (PF. Dahler), Indo Tionghoa (Oey Tiang Tjoei), dengan pimpinan Mr. Sartono.

Karena AR Baswedan seorang orator, maka ia bersama Wangsa Widjaja dibawa oleh wakil ketua *Jawa Hokokai*, seorang Jepang, untuk berkeliling ke berbagai kota di Jawa dalam usaha memberi keterangan kepada masyarakat. Daerah yang didatangi ialah Surakarta, Banyuwangi dan sekitarnya. Wangsa Widjaja mengakui kepandaian AR. Baswedan dalam berpidato, sehingga dapat menarik masyarakat. Isi pidatonya bukan propaganda Jepang, tetapi serangan terhadap kolonialisme Belanda.

Dalam masa pendudukan Jepang itu, AR. Baswedan menjadi anggota *Tjhuo Sangi-in* dan juga BPUPKI. Dalam persidangan BPUPKI, Baswedan mengemukakan pandangannya tentang keikutsertaan peranakan Arab dalam perjuangan menuju Indo-

nesia Merdeka. Dengan tegas tokoh ini mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan melihat kaum peranakan Arab sebagai rakyat Indonesia. Ia duduk dalam panitia ekonomi dan keuangan di bawah pimpinan Mohammad Hatta.

Pada permulaan kemerdekaan, Baswedan menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. Ia kemudian diangkat menjadi menteri muda penerangan di dalam Kabinet Sjahrir. Sebagai menteri muda penerangan, ia ikut ke Mesir bersama-sama dengan HA. Salim, Mr. Nasir, Sutan Pamuncak, dan M. Rasyidi untuk memenuhi undangan Liga Arab yang mengakui Republik Indonesia secara *de facto* dan *de jure*.

AR. Baswedan masuk Masyumi sejak dibentuknya DPR—RI tahun 1950 di Jakarta. Ia memilih Masyumi dalam sidang pertama penyusunan fraksi-fraksi. Ada kemungkinan hal ini berkaitan erat dengan masa lalunya sebagai anggota JIB, dan pandangannya tentang peranakan Arab yang Indonesia itu.

Dalam Kongres Kebudayaan Indonesia di Solo pada tahun 1954, AR. Baswedan masuk dalam salah satu anggota bersama Mr. Soenario Kolopaking dan Mangunsarkoro. Kejadian itu menarik perhatian yang hadir. Mangunsarkoro baru menyadari bahwa mereka yang tergabung dalam Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat) itu banyak bekas murid Taman Siswa. Mereka terseret dalam gerakan kebudayaan yang komunistic, karena itu suasana dalam kongres keras sekali menentang Lekra yang mau merebut pimpinan konferensi. Sejak saat itu terdapat gerakan kebudayaan nasional yang dipimpin Mangunsarkoro, sedangkan yang Islam dipimpin Hamka.

ABDOEL KADIR

Abdoel Kadir dilahirkan pada 6 Juni 1906 di Binjai, Sumatera Utara, sebagai anak keempat dari enam bersaudara keluarga Dokter Raden Tarunomihardjo, seorang dokter rumah sakit Pemerintah Hindia Belanda di Binjai. Masa kecil Abdoel Kadir dilalui dengan memperoleh dasar pendidikan yang baik. Dari ayahnya yang keturunan bangsawan sekaligus intelektual berpendidikan, Abdoel Kadir ditempa menjadi anak yang sopan, jujur, berdisiplin dan terutama untuk tekun menuntut ilmu di sekolah. Di dalam keluarga selalu ditanamkan sikap saling menghormati sesama saudara. Dari lingkungannya Abdul Kadir banyak bergaul dengan anak-anak dari berbagai lapisan sosial. Ini bisa dimengerti, karena sebagai dokter pemerintah, ayahnya sering berpindah tempat tugas, dan terakhir ditempatkan di Karawang.

Ayahnya yang sering berpindah tugas tidak berdampak bagi pendidikan formal Abdoel Kadir dan saudara-saudaranya. Pendidikan dasar Abdul Kadir dijalannya di *Europesche Lagere School* Sukabumi hingga lulus di tahun 1920. Atas anjuran orang tuanya, Abdoel Kadir melanjutkan sekolahnya ke *Hogere Burger School*. Setelah empat tahun di situ karena ia bercita-cita ingin menjadi pamong praja, Abdul Kadir pindah ke *Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaaren* (OSVIA) di Serang. Abdul Kadir lulus dari OSVIA tahun 1927. Pengalaman menarik Abdoel Kadir selama bersekolah di OSVIA adalah seringnya ia

terlibat perkelahian melawan anak-anak Belanda yang mengejek pelajar-pelajar OSVIA. Di usianya yang masih manja Abdoel Kadir telah tumbuh menjadi manusia yang memiliki rasa harga diri sebagai putera bangsa serta sifat kepemimpinan yang menonjol.

Setelah menyelesaikan studi di OSVIA, Abdul Kadir bekerja pada Pemerintah Hindia Belanda sebagai magang pada kantor kabupaten Jatinegara. Mengabdikan tanpa digaji tetapi tetap bekerja dengan tekun, akhirnya dalam usia relatif muda, 22 tahun, Abdoel Kadir diangkat sebagai mantri Kabupaten Jatinegara. Dalam perkembangan selanjutnya di tahun 1931 Abdoel Kadir diangkat menjadi asisten wedana Ciputat, dan tahun 1934 sebagai jaksa di Tasikmalaya.

Tahun-tahun pertama kehadiran pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia (1942) membawa perubahan pada struktur pemerintahan yang ada dan ini berakibat pula bagi karir Abdoel Kadir. Tokoh ini kemudian menjadi seorang militer. Jabatan terakhir Abdoel Kadir sebagai pamong praja adalah wedana yang diperbantukan di kantor gubernur Batavia.

Perubahan karir yang dialami Abdoel Kadir terjadi karena Pemerintah Militer Jepang dalam upaya menghadapi kekuatan Sekutu, memobilisasi seluruh potensi pemuda dan masyarakat Indonesia dalam pusat-pusat pendidikan militer untuk direkrut menjadi tenaga cadangan militer bila kelak diperlukan. Untuk keperluan tersebut, dibentuklah tentara sukarela Pembela Tanah Air (PETA) yang juga memiliki struktur komando. Proses perekrutan tenaga untuk PETA ternyata berdasarkan posisi, kedudukan jabatan, dan tingkat pendidikan si calon di masyarakat atau pemerintahan. Banyak pemuda Indonesia yang memasuki PETA dan Abdoel Kadir yang saat itu bekerja sebagai staf *Batavia Tokubetsu Shico (Walikota Istimewa Batavia)*, ditunjuk atasannya untuk masuk PETA. Karena Posisinya di pemerintahan yang cukup tinggi, maka Abdoel Kadir dididik sebagai calon *daidanco* di pusat latihan Korps Latihan Pemimpin Tentara Sukarela PETA di Bogor pada bulan Oktober 1945.

Selesai pendidikan Abdoel Kadir berusaha membentuk karakter anak buahnya agar menjadi prajurit yang memiliki

semangat kebangsaan. Meskipun Abdoel Kadir sangat tegas dan berdisiplin terhadap anak buahnya, tetapi satu hal yang penting, ialah Abdoel Kadir pernah mengancam akan meninggalkan atribut keperwiraannya karena ia membela anak buahnya yang diperlakukan kasar oleh instruktur Jepang. Karena pembawaannya yang tegas dan berwibawa, maka pada tahun 1944 ia diangkat menjadi staf *Boei Giyugun Shidobu* (kantor bimbingan tentara sukarela PETA di Jakarta. Dalam hubungan dengan keduanya itu, Abdoel Kadir terpilih sebagai salah seorang anggota BPUPKI.

Karena pengalamannya dalam bidang kemiliteran terutama selama di PETA, maka Abdoel Kadir ditunjuk untuk duduk sebagai anggota Panitia Pembelaan Tanah Air yang merupakan satu di antara tiga badan panitia yang dibentuk oleh BPUPKI. Keaktifan dan partisipasi Abdoel Kadir dalam mempersiapkan terbentuknya Negara Indonesia merdeka dilengkapi dengan terpilihnya dia sebagai anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Sumbangan pikiran dan tenaga Abdoel Kadir terus berlanjut setelah berdirinya Republik Indonesia. Sebagai negara yang baru merdeka, tentu Republik Indonesia memerlukan alat pertahanan untuk menjaga ketertiban dan keamanan negeri tersebut. Pembentukan kepolisian dan tentara kebangsaan merupakan tindakan yang mendesak, bukan saja untuk kepentingan keamanan di dalam negeri tetapi juga terhadap kemungkinan intervensi pihak asing. Untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan pembentukan kepolisian dan tentara kebangsaan, Presiden Soekarno membentuk tim yang terdiri atas Abdoel Kadir Oto Iskandar Di Nata, dan Mr. Kasman Singodimedjo. Kali ini Abdoel Kadir bertindak sebagai pemikir militer yang berusaha melahirkan konsep-konsep untuk meletakkan dasar-dasar sistem struktur organisasi kepolisian dan tentara kebangsaan. Tugas mereka akhirnya diserahkan kepada sidang PPKI pada 22 Agustus 1945 sehingga terbentuklah Badan Keamanan Rakyat.

Dasar pemikiran agar dibentuk suatu badan keamanan terbukti juga, yaitu setelah kedatangan pihak Sekutu ke Indonesia dengan mengikutsertakan pula orang-orang *Netherlands Indies Civil Administration* (NICA). Berbeda dengan maksud kedatangan pasukan Sekutu yang bertujuan mengurus tawanan

perang dan menjaga *status quo* di Indonesia, pihak NICA memperlihatkan sikap-sikap permusuhan dan bermaksud mengembalikan kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia. Kontak-kontak senjata antara pejuang Indonesia melawan pihak Sekutu dan pasukan Belanda tidak terhindarkan. Keadaan ini juga melibatkan Abdoel Kadir secara fisik dan emosional dalam perang mempertahankan kemerdekaan tersebut.

Revolusi kemerdekaan bukan saja melibatkan dua pihak bersengketa yang secara esensial memiliki kepentingan politik berbeda, yaitu Indonesia dan Belanda, tetapi juga kepentingan berbagai kekuatan ekonomi dan politik di dalam unsur-unsur masyarakat. Kondisi demikianlah yang harus dihadapi perwira militer Abdoel Kadir, yang setelah reorganisasi dan terbentuknya Tentara Keamanan Rakyat, diangkat sebagai staf Komandemen I Jawa Barat dengan pangkat Kolonel. Tugas berat pertama Kolonel Abdoel Kadir adalah menyelesaikan perbedaan pendapat yang disebabkan penolakan para prajurit dan pejuang Bandung untuk menghentikan kontak senjata dengan pihak Sekutu. Abdoel Kadir mengadakan tukar pikiran dan membujuk mereka untuk mematuhi seruan pemerintah. Berikutnya adalah peristiwa Bogor, Desember 1945, ketika sekelompok rakyat revolusioner mengambil alih pemerintahan setempat (Karesidenan Bogor), sekali lagi Kolonel Abdoel Kadir turun tangan untuk menyelesaikannya.

Dedikasi Kolonel Abdoel Kadir dalam tugas mengantarkan kejenjangkepangkatan tertinggi selama karir kemiliterannya. Kolonel Abdoel Kadir ditunjuk sebagai panglima Divisi II dengan pangkat dinaikkan menjadi jenderal mayor. Ia menjadi panglima dengan wilayah tugas meliputi Cirebon, Tasikmalaya, Tegal, dan Banyumas. Terpilihnya Abdoel Kadir berkaitan dengan terjadinya konsolidasi dan reorganisasi di tubuh Tentara Keamanan Rakyat, yang berubah menjadi Tentara Republik Indonesia sejak 24 Januari 1946.

Mayor Jenderal Abdoel Kadir merupakan sosok pribadi yang berwibawa, tegas dan tidak ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Hal ini dimungkinkan karena Abdoel Kadir memiliki rasa percaya diri yang besar, dan merupakan ahli strategi

dalam mengambil keputusan di medan perang. Bulan Juni 1946 ketika pasukan Sekutu dan Belanda melakukan ofensif militer hingga Karawang, Mayor Jenderal Abdoel Kadir dan pasukannya memberikan perlawanan sengit, antara lain dengan menghancurkan jembatan kereta api Tambun sehingga untuk sementara dapat dihentikan gerak maju pasukan Sekutu dan Belanda. Kecakapan taktik dan strategi Mayor Jenderal Abdoel Kadir terlihat pula ketika terjadi aksi militer Belanda pertama, Juli 1947. Setelah Gombong digempur habis-habisan, kedudukan ibukota Yogyakarta menjadi terancam. Pemerintah menunjuk Abdoel Kadir sebagai komandan Front Gombong untuk mempertahankan wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan kepercayaan penuh pemerintah terhadap kemampuan Abdoel Kadir, dan ia langsung memimpin anak buahnya mengadakan perang gerilya. Abdoel Kadir segera memobilisasi rakyat, melakukan bumihangus dan memasang rintangan-rintangan untuk memutuskan jalur komunikasi musuh.

Perjuangan bangsa Indonesia untuk mengusir kolonialis Belanda tidak saja dilakukan secara fisik, tetapi juga melalui cara-cara diplomasi. Kedua cara tersebut saling mendukung dan melengkapi. Berjuang dengan cara diplomasi, selain untuk memperoleh simpati dan dukungan dunia internasional, juga untuk memperkenalkan Republik Indonesia agar terintegrasi dalam pergaulan antarbangsa. Sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia hanya memiliki sedikit tokoh diplomat penting, dan di antaranya yang sedikit tersebut adalah Abdoel Kadir. Keterlibatan pertama Jenderal Mayor Abdoel Kadir dalam arena diplomasi adalah saat ia memimpin delegasi Indonesia dalam perundingan dengan pihak Sekutu untuk membahas pengangkutan tawanan perang di Yogyakarta 2 April 1946

Terjun sebagai diplomat bukanlah hal yang mudah, karena selain perlunya dukungan intelektual tertentu, seorang diplomat layaknya berwawasan luas dan menguasai seluk-beluk hukum internasional. Setelah pemerintah menunjuk Abdoel Kadir sebagai salah satu anggota delegasi Indonesia ke pertemuan *Inter-Asian Relation Conference* di New Delhi, 23 Maret – 2 April 1947, ia ditunjuk kembali sebagai anggota delegasi Indonesia

yang diketuai H. Agus Salim untuk berkeliling ke beberapa negara di Timur Tengah. Misi delegasi Indonesia tersebut cukup berhasil, karena di beberapa negara Timur Tengah yang dikunjungi, selain ditandatangani suatu perjanjian persahabatan, juga diperoleh pengakuan secara *de facto* atas kemerdekaan Indonesia.

Pemerintah Indonesia menganggap Abdoel Kadir cukup berhasil dalam menjalankan politik diplomasinya saat mendampingi H. Agoes Salim melakukan misi diplomatik ke Timur Tengah, karena itu pemerintah mengangkat Jenderal Mayor Abdoel Kadir sebagai kepala Kantor Perwakilan Republik Indonesia di Kabul, Afghanistan. Di sini terlihat kebesaran jiwa Jenderal Mayor Badul Kadir untuk menerima tugas dan tanggung jawab yang diletakkan pemerintah di pundaknya, sebab tugas tersebut menuntut pengabdian dan pengorbanan yang tidak sedikit. Bisa dimengerti, sebagai negara yang baru merdeka dan sedang dilanda perang kemerdekaan, perekonomian Republik Indonesia begitu buruk, sehingga setiap kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dibiayai dengan dana yang sangat minim.

Setelah Konferensi Meja Bundar yang menghasilkan pengakuan kedaulatan terhadap Indonesia pada 27 Desember 1947, terjadi perubahan status yang bersifat struktural atas kantor-kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Pada tahun 1950 Abdoel Kadir dilantik sebagai duta besar Republik Indonesia untuk Mesir.

Karir diplomatik terakhir Jenderal Mayor Abdoel Kadir, di tahun 1960, ketika ia bertugas sebagai anggota komisi perdamaiian Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Congo. Sebelumnya, di tahun 1958, ia dilantik sebagai duta besar Republik Indonesia untuk India menggantikan LN. Palar. Dalam kedudukannya sebagai duta besar itu, Jenderal Mayor abdoel Kadir selalu berusaha memperkenalkan kesenian tradisional Indonesia kepada tamu-tamu asing. Ia sering mempergelarkan kesenian tradisional di kedutaan, dengan melibatkan putera-puteri dan staf kedutaannya. Amat disayangkan tokoh ini terserang penyakit *diabetes melitus*. Akhirnya Tuhan memanggil Jenderal Mayor Abdoel Kadir (21 Januari 1961), setelah dirawat di rumah sakit militer di Jakarta.

DR. SAMSI SASTROWIDAGDO

Samsi Sastrowidagdo dilahirkan pada 13 Maret 1894 di Solo. Ia bersekolah di HIS, kemudian di *Kweekschool* dengan diploma pada tahun 1912. Selepas dari sekolah ini ia melanjutkan ke *Handels Hoogeschool* di Rotterdam dengan diploma doktoral pada tahun 1925. Seiring dengan itu ia juga menempuh ujian *doctor in de handelswetenschappen*, diploma *lager acte*, *hoofd act* dan diploma *maleische taal* dan *volkenkunde*.

Tokoh perjuangan nasional ini tidak begitu tampil dalam percaturan politik, walaupun sumbangannya cukup besar dalam usaha-usaha merintis kemerdekaan Indonesia. Perjuangan tokoh ini telah dimulainya sejak berada di luar negeri (baca: Negeri Belanda). Ia menjadi anggota Perhimpunan Indonesia (PI), di samping juga menjadi pengajar Bahasa Jawa pada Fakultas Sastra di bawah Prof. Hazeu di Universitas Leiden. Ada kemungkinan dengan kedudukan sebagai pengajar dapat dimengerti kenapa Samsi tidak begitu menonjol, apalagi dalam diri tokoh ini terdapat sifat pendiam dan tidak pandai berpidato.

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Negeri Belanda, dikabarkan tokoh ini mengalami gangguan jiwa sehingga dirawat di rumah sakit. Tiga tahun kemudian, setelah dirawat dua bulan menjelang keberangkatannya, ia kembali ke tanah air, dan setahun kemudian bergabung dengan beberapa tokoh pejuang nasional lainnya seperti Ir. Soekarno, Ir. Anwar, Mr. Iskaq,

Mr. Sartono, dan Mr. Soenario untuk mendirikan Partai Nasional Indonesia. Untuk membiayai hidup mereka, didirikan usaha jasa konsultasi tentang bangunan dan arsitektur, advokat (pengacara), ekonomi dan akuntansi.

Dalam perkembangan selanjutnya, Samsi ikut prihatin dengan dibubarkannya PNI sebagai akibat ditangkapnya Ir. Soekarno. Sejak pembubaran organisasi itu, Samsi pindah ke Surabaya. Ia kemudian masuk Partai Indonesia (Partindo). Ia bekerja dan lebih mengutamakan bidang perhatian ilmu yang dikuasainya, sambil mengembangkan kemampuan di bidang jurnalistik. Sejumlah jabatan pernah dipangku oleh tokoh yang satu ini.

Samsi menjabat ketua *Raad van Commissarissen* dari Firma Setia di Surabaya, penasihat (*adviseur*) Badan Perusahaan PCI di Jakarta dan Surabaya, *commissaris hoofdbestuur* PNI dalam urusan ekonomi, penasihat "Persatoean Serikat Sekerja Indonesia" di Surabaya, ketua "Pendidikan Rakjat" bagian perdagangan, sekretaris "Pergoeroean Rakjat" di Surabaya, pembantu surat kabar *Soeara Oemoem* dan *SRI* di Surabaya, pembantu surat kabar *Oesaha* di Makassar, *administratur Obligatie leening* dari Gedung Nasional Indonesia di Surabaya, penasihat koperasi-koperasi di Surabaya dan Gresik, dan memberikan nasihat gratis kepada kaum koperasi dari Banyuwangi sampai Maos termasuk yang melalui surat-menyurat. Ia juga menjabat ketua Perhimpoean Kalijah Islam di Surabaya.

Dalam masa pendudukan Jepang, Dr. Samsi duduk sebagai anggota majelis pertimbangan Poetera dan menjadi anggota *Tjhuo Sangi-in*. Kelihatannya pengangkatan tersebut didasarkan pada jabatannya sebagai ketua Perhimpoean Kalijah Islam di Surabaya itu. Ketika itu Samsi adalah pimpinan kantor partikelir, tata usaha dan pajak di Surabaya. Hal yang menarik perhatian adalah adanya usul mosi Samsi dan Mr. Sartono pada sidang ke-6 *Tjhuo Sangi-in*. Usul mosi dimaksudkan untuk memperkuat keputusan Permusyawaratan Asia Timur Raya yang diadakan setahun sebelumnya (6 November 1943). Usul mosi ini melahirkan lima pedoman hidup (disebut *Panca Dharma*) untuk bangsa Indonesia.

Pada permulaan kemerdekaan, Samsi menjabat menteri keuangan pada Kabinet Presidensial Soekarno—Hatta. Ia kemudian duduk sebagai anggota Komite Nasional Indonesia (KNI) mewakili PNI dan beralamat di Malang.

MR. AA. MARAMIS

Alexander Andries Maramis dilahirkan pada 20 Juni 1897 di Manado, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara pasangan Andi Maramis dengan Charlotte Ticoalu. Keluarga Maramis berasal dari Tonsea, sebuah daerah di Minahasa, Sulawesi Utara. Keluarga ini cukup terpendang di Minahasa, selain karena kekayaannya juga karena dari keluarga ini telah lahir para ahli hukum yang bekerja sebagai pembela keadilan. Salah satunya adalah Alexander Andries Maramis.

Tidak banyak cerita tentang masa kecil AA. Maramis yang biasa dipanggil Alex Maramis. Sekolah dasar ditempuhnya di *Europeesche Lagere School* (ELS) di Manado. Setamat dari ELS, Alex meneruskan sekolahnya di *HBS koning Willem III* di Batavia selama lima tahun. Di Batavia, Alex tinggal pada sebuah keluarga Belanda, karena itu ia sangat fasih berbahasa Belanda. Pendidikan hukum ditempuhnya melalui Sekolah Tinggi Hukum di Leiden, Negeri Belanda, dan lulus tahun 1924.

Semasa di Belanda, Alex aktif di dalam Perhimpoean Indonesia, suatu organisasi mahasiswa-mahasiswa Indonesia di sana. Di sinilah semangat patriotisme Alex Maramis mulai berkembang. Salah satu tulisannya yang berbau politik dimuat di dalam *Gedenk Boek* yang diterbitkan oleh Perhimpoean Indonesia tahun 1942. Artikel itu berisi gugatan terhadap eksistensi Pemerintah Hindia Belanda dilihat dari sudut hukum internasional. Tulisan ini kemudian sangat berpengaruh baik di dunia

internasional, di dalam Negeri Belanda sendiri, dan di kalangan pergerakan di tanah air.

Sepulangnya ke tanah air dengan menyandang gelar *meester in de rechten*, Alex Maramis larut dalam kegiatan politik di Indonesia. Ia aktif di dalam organisasi pemuda, partai politik, perkauman Kawanua sampai organisasi gerejani. Pada bulan Maret 1933, bersama dr. Sam Ratoelangi dan dr. Toembelaka, Alex Marimis berhasil mendirikan Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM), sebuah gereja perjuangan di Manado.

Meskipun Alex lulusan sekolah Belanda, tetapi ia tidak mau bekerja sebagai pegawai pemerintah Alex memutuskan untuk bekerja sebagai pengacara. Mula-mula di Semarang, kemudian Palembang, dan selanjutnya di Jakarta. Baginya, pengacara merupakan suatu profesi yang memungkinkannya bebas bekerja dan bertindak lebih luas dibanding bila bekerja pada pemerintah. Lagi pula ia melihat, tidak ada untungnya bagi seorang patriot jika ia memilih bekerja pada pemerintah kolonial, sementara di sisi lain berjuang menentangnya. Alex Maramis pun menolak keras menjadi anggota *Volksraad* sekalipun ia pernah ditawarkan untuk posisi itu. Ini merupakan salah satu cerminan sikap non-kooperatif dari Perhimpunan Indonesia yang masih dipegang oleh Alex Maramis. Ia memang terkenal sebagai seorang yang berkepribadian kuat, pendiam, pintar, dan keras kepala.

Semasa pendudukan Jepang, Alex Maramis tetap bekerja sebagai pengacara. Dengan keahlian dan profesinya tersebut ia duduk dalam keanggotaan Poetera, kemudian diangkat sebagai salah satu anggota *Tjhuo Sangi-in*. Ia selalu menyuarakan tema demokrasi dan persatuan melalui forum ini. Bersama Soekarno, Hatta, Ahmad Soebardjo, Sutan Sjahrir, dan lain-lain, Alex Maramis juga mengajar di Asrama Indonesia Merdeka, suatu lembaga pendidikan kader politik.

Ketika Pemerintah Jepang membentuk BPUPKI, Alex Maramis termasuk salah satu anggota yang diangkat. Alasan pengangkatannya sebagai anggota BPUPKI kemungkinan besar karena pendidikannya yang berwawasan internasional (Alex Maramis

ahli hukum internasional), serta pengalaman kegiatan-kegiatan politiknya di masa-masa sebelumnya.

Alex Maramis adalah anggota BPUPKI yang sangat aktif ikut serta dalam persidangan-persidangan. Ia ikut dalam Panitia Sembilan yang membuat pembukaan rancangan UUD Indonesia Merdeka, dan merupakan satu-satunya anggota yang beragama Kristen. Terpilihnya Alex Maramis dalam panitia tersebut kemungkinan besar adalah inisiatif dari Soekarno yang ingin memperkuat "Fraksi Nasional" dalam panitia yang dipimpinnya itu, antara lain dengan memilih Alex Maramis yang pernah menjadi anggota PNI (Partai Nasional Indonesia).

Dalam sidang II BPUPKI hangat dibicarakan masalah warga negara yang termaktub dalam pasal 26 Bab V "Hukum Dasar". Adapun usul dari Alex Maramis berkenaan dengan masalah ini adalah "tetap adanya pasal 26 tersebut, hanya ditambah dengan satu pasal yang menetapkan bahwa orang-orang selain orang Indonesia seperti peranakan Arab, Belanda atau Tionghoa yang mempunyai kedudukan *Nederlandsch Onderdaan* dianggap sebagai warga negara". Selain masalah warga negara, masalah lain yang diperdebatkan adalah masalah batas-batas wilayah Negara Indonesia. Ketika Belanda menyerah kepada Jepang, ada suatu kesatuan wilayah yang utuh yang pernah mereka kuasai sebelumnya, yaitu Hindia Belanda, inikah yang dianggap Tanah Air Indonesia? Pendapat Alex Maramis tentang hal itu adalah dengan melihat hukum internasional selain pada sejarah bangsa Indonesia sendiri. Karena Pemerintah Hindia Belanda sudah tidak ada lagi, maka wilayah bekas jajahannya dapat dianggap sebagai wilayah Indonesia. Akan tetapi untuk daerah-daerah Malaka, Borneo Utara, Timor Portugis dan sebagian Papua, masih menjadi milik Inggris dan Portugis, karena pemerintahan mereka masih berdiri.

Dengan berdirinya Negara Republik Indonesia, 19 Agustus 1945, diumumkan susunan kabinet Republik Indonesia yang pertama. Dalam susunan tersebut Alex Maramis duduk sebagai menteri negara, dan juga sebagai wakil menteri keuangan bahkan kemudian ia menggantikan dr. Samsi sebagai menteri keuangan. Ketika menjadi menteri keuangan itulah Alex Maramis

merancang, membuat, dan menandatangani uang Republik Indonesia yang pertama, Oeang Republik Indonesia (ORI). Pencetakan uang itu dimaksud untuk menyehatkan sistem moneter Indonesia.

Kegiatan lain Alex Maramis adalah usaha membentuk dan memelopori para pemuda Sulawesi, khususnya Minahasa, untuk menggalang front persatuan bernama KRIS (Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi). Bersama Mohammad Hatta, Alex Maramis merintis terbentuknya Palang Merah Indonesia (PMI) sekaligus menjadi wakil ketua untuk periode Januari -- Juli 1947. Selain itu Alex Maramis juga mengajar di Fakultas Hukum di Jakarta. Posisi lain yang pernah didudukinya antara lain sebagai menteri keuangan pada masa Kabinet Amir Sjarifuddin I (3 Juli -- 11 November 1947), juga pada masa Kabinet Amir Sjarifuddin II (11 November 1947 -- 29 Januari 1948). Alex Maramis juga sempat ditunjuk sebagai perdana menteri bagi Pemerintah dalam Pengasingan (*Exile Government*) di New Delhi, yang dirancang oleh Soekarno-Hatta untuk menjaga kemungkinan gagalnya Pemerintahan Darurat RI (PDRI) di Bukittinggi.

Masa-masa selanjutnya dilalui Alex Maramis sebagai diplomat. Di samping itu, dengan pengetahuannya yang mendalam tentang hukum internasional, ditambah bekal penguasaan sejumlah bahasa asing, menempatkan Alex Maramis sebagai diplomat yang handal. Beberapa jabatan duta besar pernah dipegangnya antara lain duta besar untuk Filipina, Jerman Barat, dan Uni Soviet.

Di masa-masa Orde Lama, Alex Maramis banyak berselisih pendapat dengan Soekarno, sehingga ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari kegiatan politik dan menetap di Swiss. Di sana ia sering kali jatuh sakit.

Dalam rangka rumusan penjabaran Pancasila untuk pengalaman praktis, pemerintah membentuk sebuah panitia kecil yang beranggotakan antara lain Ahmad Soebardjo dan Alex Maramis. Ia mengikuti kegiatan panitia melalui korespondensi dari Swiss, hingga ditandatanganinya hasil rumusan tersebut pada tahun 1975. Pada tahun 1976 dengan bantuan pemerin-

tah, Alex Maramis dan keluarga kembali ke tanah air setelah menetap puluhan tahun lamanya di Swiss. Hal itu dapat melepas kerinduannya pada saudara dan teman-temannya, tetapi penyakit yang terus menggerogotinya sejak tinggal di Swiss membawa Alex Maramis menghembuskan nafasnya yang terakhir di Rumah Sakit Angkatan Darat Jakarta pada 31 Juli 1977.

MR. SAMSOEDDIN

Samsoeddin lahir di Sukabumi pada 1 Januari 1908. Ia menempuh pendidikan pertamanya pada sekolah agama selama dua tahun. Selepas dari sekolah ini ia melanjutkan sekolahnya ke *Europeesche Lagere School* (ELS) pada tahun 1922. Lulus dari ELS, ia melanjutkan ke *Algemeene Middelbare School* (AMS) di Bandung dengan diploma pada tahun 1929. Ia kemudian meneruskannya ke sekolah hukum selama dua tahun di Jakarta, sedangkan gelar *meester in de rechten* diperolehnya di Negeri Belanda, setelah ia melanjutkan sekolah hukumnya di sana pada tahun 1935.

Sebelum pergi ke Belanda, Samsoeddin sudah menjadi anggota **Partai Rakyat Indonesia** dan turut aktif mengurus surat kabar *Berita Oemoem*. Pada tahun 1938, tiga tahun setelah lulus dari Negeri Belanda, Mr. Samsoeddin menjadi wakil walikota (*loco burgemeester*) di Bogor. Tahun 1940 ia pun menjadi anggota *Volksraad*.

Pada masa pendudukan Jepang, Mr. Samsoeddin merupakan salah satu tokoh pendiri dan pemimpin Gerakan Tiga A. Selain itu juga merupakan salah satu anggota yang diangkat menjadi anggota *Tjhuo Sangi-in*. Sebagai anggota *Tjhuo Sangi-in*, suaranya cukup tajam. Salah satu di antara usulnya ialah agar diadakan perbaikan di kalangan petani dengan memikirkan kebutuhan petani itu sendiri. Ini merupakan usul sekaligus kritik terhadap sikap Pemerintah Jepang yang memperlakukan petani

dengan sewenang-wenang. Sebagai konsekuensi dari kritiknya tersebut, Mr. Samsuoddin diberikan tugas untuk menjabat wali-kota (*shico*) Sukabumi. Dengan demikian ia tidak lagi menjadi anggota *Tjhuo Sangi-in*.

Jabatan lain yang pernah dipangku adalah kepala bagian Keselamatan dari POETERA. Dengan diadakannya kongres pemuda seluruh Jawa yang diadakan pada 16 Mei 1945 di Bandung, Angkatan Muda Indonesia (AMI) Bogor juga mengadakan rapat besar dua minggu sesudahnya. Dalam rapat tersebut Mr. Samsuoddin banyak mengupas tentang kepincangan-kepincangan cara hidup orang-orang Barat, tentang kemerdekaan Indonesia, dan lain-lain. Ketika Pemerintah Jepang membentuk BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia), Mr. Samsuoddin diangkat sebagai anggota lembaga tersebut.

MR. R. SASTROMOELJONO

Tokoh ini lahir 16 Oktober 1898, di Kudus, Jawa Tengah. Ia memulai pendidikan sekolahnya di *Europese lagere School* (ELS) yang diselesaikan tahun 1912. Selepas dari sekolah ini ia melanjutkan pendidikannya di Sekolah Hukum (*Rechtshool*) yang diselesaikan pada tahun 1918. Setamat dari *Rechtschool* ia pergi ke Negeri Belanda untuk masuk Universitas Leiden bagian Hukum. Ia memperoleh gelar *meester en derechteen* di tahun 1922.

Sebelum belajar ke Negeri Belanda, di tahun 1918 -- 1919 Sastromoeljono menjabat pegawai kantor agraria di Pekalongan. Pada tahun 1919 -- 1920 menjabat *fiscal griferf* Batavia. Sepulang dari Negeri Belanda, tokoh ini selama 16 tahun (1924 -- 1940) menjadi *advokat* (pengacara) pada pengadilan di Semarang, termasuk juga dalam tahun 1937 -- 1940 menjadi anggota luar biasa pengadilan tinggi di Semarang. Di samping itu di tahun 1928 -- 1931 ia menjabat *Lid. Gem. R. Tegal*, sekaligus juga menjabat *Lid. Prov. R. Midden -- Java* (1930 -- 1940) dan pada tahun 1935 -- 1940 menjabat *Lid. college van gedeputeerden Midden Java*. Jabatan yang paling menonjol ialah ketika menjadi pembela Ir. Soekarno dan kawan-kawan di depan pengadilan Bandung pada tahun 1930. Menjelang kedatangan Jepang (1940 -- 1942), Sastromoeljono menjabat kepala kantor dari Direktorat Kabinet van den G.G.. Dalam masa pendudukan Jepang, ia menjadi hakim Pengadilan Jakarta (29 April 1942),

kemudian hakim Pengadilan Tingkat Tinggi (27 September 1942), hakim Pengadilan Tertinggi (3 April 1943) sampai ia diangkat menjadi anggota BPUPKI.

Di samping sejumlah jabatan dalam pemerintahan yang di pangku Sastromoeljono juga aktif dalam perkumpulan-perkumpulan tertentu (1921 -- 1922) sekaligus menjadi anggota pengurus Perhimpoean Indonesia di Gravenhage, Negeri Belanda. Sekembalinya dari Negeri Belanda ia menjadi anggota pengurus besar Boedi Oetomo antara tahun 1925 -- 1935 dan juga ketua perkumpulan radio SRV cabang Semarang, kemudian anggota pengurus perkumpulan advocat Semarang selama tiga tahun (1937 -- 1940) sekaligus anggota pengurus *Stichting Tjandifonds* Semarang; anggota pengurus sekolah Van Deventer, Semarang, sekretaris badan pengawasan AMS Semarang, ketua Perhimpunan Kesenian Rakyat Sobo Karti, Semarang, dan anggota *Raad van toezicht en hif-stand v.d. volkscredietbank Semarang*.

Dalam masa pendudukan Jepang, Sastromoeljono mengemukakan pikirannya tentang Negara Indonesia Merdeka. Menurutny, ada tiga syarat kemerdekaan, yaitu kehendak merdeka yang menyala-nyala, pengakuan dari satu atau dua negara di luar Kerajaan *Dai Nippon*, dan kecakapan untuk mempertahankan kemerdekaan tanah air.

Sastromoeljono tampil sebagai pejabat pemerintah dengan memegang jabatan walikota Pemerintah Nasional Kota Jakarta dalam masa pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS). Pada saat itu ia membentuk "Panitia Tujuh" yang pada 9 Maret 1950 mengambil langkah-langkah dan keputusan tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintahan Kotapraja Jakarta terdiri atas:
 - a. Dewan Perwakilan Kota Sementara (DPK)
 - b. Badan Pemerintah Harian (BPH)
 - c. Walikota.
2. Dewan Perwakilan Kota Sementara terdiri atas 25 orang yang diketuai oleh walikota, sedang anggotanya diangkat oleh menteri dalam negeri.

3. Badan Pemerintah Harian terdiri atas walikota sebagai ketua merangkap anggota dan dibantu empat anggota lain yang dipilih dari anggota-anggota DPK Sementara.
4. Dengan harapan pemilihan umum akan segera diadakan, maka masa kerja DPK Sementara dan BPH dibatasi hanya selama tiga bulan, dengan catatan selambat-lambatnya pada 1 Juli 1950 sudah harus meletakkan jabatan mereka.

Keputusan di atas disahkan oleh Menteri Dalam Negeri RIS Mr. Anak Agung Gde Agung pada 16 Maret 1950, dua minggu sesudah Mr. Sastromoeljono diganti oleh Soewirjo.

KH. ABDUL FATAH HASAN

KH. Abdul Fatah Hasan dilahirkan pada tahun 1912 di Bojonegara, Cilegon, Banten, Jawa Barat. Keluarganya taat beragama Islam. Dari pernikahannya dengan gadis Sufiah telah dikaruniai dua orang putra, Sutomo AF. Hasan dan Rifki AF. Hasan.

Abdul Fatah memulai pendidikannya pada tahun 1924 di Sekolah Rakyat. Pada tahun 1932 ia masuk Madrasah Sana-wiyah enam tahun, berijazah. Dalam tahun 1933 – 1938 ia memasuki Fakultas Hukum Islam di al-Azhar Cairo – Mesir. Tahun 1933 – 1939 dapat menyelesaikan sarjana hukumnya dan mendapat gelar *alimiyah*.

Masa pergerakan dan perjuangannya diawali sejak tahun 1931 sampai tahun 1933, sebelum ia berangkat ke Cairo untuk melanjutkan studinya. Ketika itu ia menjabat sebagai komisarisi Organisasi Nahdatus Syubanul Muslimin di Banten. Dalam tahun 1933 – 1939 ia menjabat sebagai anggota organisasi pelajar "Perpindom" (Persatuan Pelajar Indonesia Malaya di Cairo). Kemudian ia masuk organisasi politik Perhimpunan Indonesia Raya di Cairo. Selanjutnya tahun 1938 – 1939 ia menjabat pimpinan Barisan Pelopor Daerah Banten sekaligus sebagai ketua BPP (Badan Pembantu Pembela) tanah air di Banten.

Jabatan-jabatan lain yang pernah dipegang antara lain, pada tahun 1931 – 1933, sebelum berangkat ke Mesir Abdul Fatah

menjadi guru pada Perguruan Islam Al-Khairiyah. Dalam tahun 1940 – 1942, sekembalinya dari Mesir ia kembali menjadi guru pada Perguruan Islam Al-Khairiyah. Ia juga menjadi anggota *Regent Schaap Raad* Serang atau Dewan Kabupaten. Pada tahun 1942 -- 1945 menjabat sebagai anggota *Syosangikai* atau Badan Keresidenan Banten. Selanjutnya pada tahun 1945 ia ditunjuk menjadi anggota *Dokuritzu Zyumbi Chosakai* atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan RI. yang menyusun UUD 1945, sebagai anggota Pengganti No. 40.

Pada tahun 1945 – 1948 ia menjabat sebagai anggota KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat), kemudian sebagai *acting* bupati republik Kabupaten Serang. Pada 21 Desember 1948, waktu pendudukan Tentara NICA di Banten, Abdul Fatah bersama pimpinan-pimpinan RI yang lain turut bergerilya. Pada bulan Juli 1949 Abdul Fatah ditangkap tentara Belanda kemudian ditawan. Sejak itu sampai sekarang nasibnya tidak diketahui dengan pasti.

R. ASIKIN NATANEGARA

Asikin Natanegara dilahirkan pada 23 Desember 1902 di Bogor. Ia menempuh pendidikan pertamanya HIS, kemudian MULO yang diselesaikan pada tahun 1920. Setamat dari MULO, ia melanjutkan ke AMS di Yogyakarta dengan diploma yang dicapainya tiga tahun kemudian (1923). Setelah itu ia memasuki Sekolah Polisi (*Politie School/Commisaris vaan Politie*) dengan diploma yang diperoleh empat tahun kemudian (1927).

Masih dalam masa studi, Asikin sudah bekerja sebagai *Gediplomeerd Ambtenaar Inlandsche Bestuur* (GAIB) pada tahun 1924 -- 1925. Ia kemudian menjadi *Comisaris* di Yogyakarta selama dua tahun (1925 -- 1927). Tiga tahun kemudian ia ke Jakarta bekerja pada *Stads Politie* dengan jabatan sebagai kepala *afdeeling* selama tiga tahun (1930 -- 1933). Jabatan itu merupakan bagian dari *waarnemend adjunct Hoofd Commisaris van Politie* di *Hoofd Bureau*. Ia menjabat sebagai *technisch leider veld politie Residentie* Jakarta pada tahun 1933 -- 1934. Setelah itu, selama dua tahun (1934 -- 1936) ia bertugas sebagai *waarnemend adjunct Hoofd Commisaris Stadt Politie* Semarang. Selanjutnya selama lima tahun (1936 -- 1941) ia berada di Purwokerto sebagai *technische leider veld politie Residentie Banyumas* dan *hoofd Stads Politie Purwokerto*. Ketika Pemerintah Pendudukan Jepang mulai masuk Indonesia, Asikin menjabat *onderdirecteur Politie School Sukabumi* (1941 -- 1942). Sejak 1 September 1942 ia menjabat *ikyu keishi* pada Departemen Kepolisian. Tokoh ini tercatat sebagai anggota BPUPKI.

GPH. SOERJOHAMIDJOJO

Gusti Pangeran Hario Soerjohamidjojo yang pernah menjabat rektor pertama dan sekaligus pendiri Konservatori Karawitan Indonesia di Surakarta adalah putra ke-34 Sunan Paku Buwono X dari selir. Pada waktu kecil ia bernama Gusti Raden Mas Soediro, dilahirkan pada 13 Oktober 1905 di Surakarta. Ia seorang bangsawan yang dalam hidupnya dekat dengan rakyat, terutama di lingkungan Keraton Solo. Ibunya bernama Raden Ayu Pradaparukmi. Tata cara adat kehidupan keraton menjiwai dirinya, termasuk perilaku kehidupan pemerintahan keraton. Ia menjadi ajudan Sunan Paku Buwono X, oleh karena itu pergaulannya dengan bangsa Barat memberi pengalaman baru baginya. Sunan Paku Buwono X, ayahnya, memang seorang raja yang mau membuka diri dalam pergaulan dunia modern. Hubungannya dengan Pemerintah Belanda makin erat, karena itu tidak aneh apabila kebudayaan Barat berpengaruh dan berkembang di kalangan pegawai-pegawai keraton dan keluarga raja. Di situlah GPH. Soerjohamidjojo dididik dan dibesarkan.

Ketika kanak-kanak, GRM. Soediro dididik di sekolah Taman Kanak-kanak khusus bagi putra-putra raja (disebut Sekolah Raja) dan keluarganya di lingkungan keraton ("jero beteng") yaitu di Baluwarti. Sekolah semacam ini tidak terbatas pada tingkat Taman Kanak-kanak saja. Pendidikan tingkat Sekolah Dasar juga diberikan oleh guru-guru yang terpilih di kesunanan. Setelah mendapat asuhan pendidikan tingkat Kanak-

kanak atau Sekolah Raja itu, pada usia delapan tahun GRM. Soediro masuk *Eropese Lagere School* (ELS) dan berhasil menamatkan sekolahnya itu pada tahun 1920. Setamat dari ELS, ia melanjutkan ke MULO Kesatrian di Kota Solo. Pendidikan ini diselesaikan pada tahun 1924. Di MULO ia masuk organisasi Kepanduan Boedi Oetomo. Setelah itu GRM. Soediro yang kemudian bergelar GPH. Soerjohamidjojo tidak lagi melanjutkan sekolahnya. Pada tahun 1924 ia dipilih menjadi ketua *Jong Java* di Samping memimpin organisasi kepanduan dan menjadi *hopman* kepanduan.

Pengabdian GPH. Soerjohamidjojo tidak terlepas dari peranannya sebagai pembesar Kantor Sekretariat Pemerintahan Keraton Solo. Antara tahun 1924 -- 1938 ia bertugas pada Kantor *Comptabiliteit* Keraton termasuk Kantor Hasil Perusahaan Keraton dan Kantor Keuangan Keraton. Jabatan-jabatan lain yang dipangkunya antara tahun 1928 -- 1939 ialah sekretaris *Commissie* Perjamuan Keraton Solo, sedangkan dalam tahun 1930 menjadi pemimpin Kesenian Keraton Solo bernama "Langentoja".

Dalam kepengurusan organisasi, ia pernah menjabat wakil ketua Boedi Oetomo cabang Solo antara tahun 1925 sampai 1928. Kecuali itu ia juga menjadi pembesar Kesenian Tari Keraton dan Negeri Surakarta sampai tahun 1939. Di sini ia juga menjabat ketua Narpa Wandawa yaitu suatu organisasi kerabat keraton dan pejabat-pejabat Keraton Surakarta. Karena rajin bekerja dan banyak berinisiatif, maka hampir semua urusan keraton di bidang sosial ia yang mengurus. Di lingkungan pendidikan, GPH. Soerjohamidjojo pernah bertugas sebagai ketua Pengawas Sekolah Keraton dari tahun 1928 sampai tahun 1940. Pekerjaan sampingannya ialah mengurus *Raad Balai Agung* yaitu suatu majelis negara yang ada di Solo antara tahun 1935 -- 1939. Pengalamannya banyak, terutama dalam organisasi baik kegiatan sosial maupun olah raga dan kesenian. Pada zaman Hindia Belanda, tepatnya antara tahun 1934 -- 1937, ia mendirikan Siaran Radio Indonesia dengan nama *Filantropische Zender Siaran Radio Indonesia* (SRI). Ketika itu ia sudah menjadi anggota majelis *Nederlandsch Radio Omroep Maatschappij* (NIROM).

Dalam bidang pergerakan nasional pada mulanya ia bergerak sebagai pengurus *Yong Java*, Boedi Oetomo, dan Partai Indonesia Raya pada saat dibentuk sebagai fusi dari Boedi Oetomo, Persatoean Bangsa Indonesia, Sarekat-sarekat Soematera, *Yong Ambon*, dan *Yong Celebes*. Gusti Pangeran Hario Soerjohamidjojo bersama Pangeran Hadiwidjojo serta Pangeran Koesoemojoedo ikut aktif di dalamnya. Pada tahun 1939 Parindra menyelenggarakan kongres di Solo dengan cabang Solo sebagai penyelenggara.

Dalam tahun 1939 itu, di kalangan kaum pergerakan, telah merencanakan untuk mengangkat Soerjohamidjojo menjadi raja Indonesia di kemudian hari. Kemauan baik ini tercetus di dalam pertemuan rahasia para pemimpin pergerakan kebangsaan terutama dari Parindra yang dipelopori dokter Soetomo.

Dalam kegiatan sosial dan ekonomi yang ada hubungannya dengan pelestarian nilai-nilai seni dan pengembangannya, Soerjohamidjojo pada tahun 1937 diminta menjadi pelindung Perikatan Perusahaan Batik Boemi Poetra Soerakarta (PPBBS). Pada tahun berikutnya ia menjadi anggota Majelis Rumah Sakit (*Ziekensorg*) di Solo. Di bidang olah raga peranannya cukup menonjol terutama tennis. Sejak tahun 1934 sampai tahun 1941 ia menjadi pelindung Persatuan Lawn Tennis Indonesia (PELTI). Kemudian meningkat menjadi ketua umum Persatuan Lawn Tennis Indonesia itu antara tahun 1941 sampai tahun 1968.

Dalam lingkungan Keraton Solo, ia menjadi ajudan Sunan Paku Buwono X sampai Sunan Paku Buwono XII, sedangkan pada tahun 1939 -- 1945 menjadi pembesar Kantor Sasowilopo yaitu Kantor Kabinet Sri Susuhunan Paku Buwono XI. Di lingkungan kemajuan budaya, ia tidak mengabaikan peranan *Radya Pustaka*, karena itu dalam tahun 1934 -- 1939 ia menjabat ketua Paheman Radya Pustaka sekaligus menjabat *Raad van Beheer* Taman Sriwedari Surakarta sejak tahun 1929.

Pada zaman pemerintahan militer Jepang di Indonesia, ia tergolong ahli "turonggo". Kedudukannya dalam tahun 1942 adalah sebagai "weda panegar gamel" Keraton Surakarta. Di

samping itu dalam tahun 1943 -- 1945 Soerjohamidjojo menjabat sebagai ketua *Keimin Bunka Shidosho* Jawa Tengah. Kemudian pada tahun 1945 sebelum diangkat menjadi anggota BPUPKI, ia menjadi penasihat *Solo Ko Nokomon*. Karena kegiatannya baik dalam pergerakan nasional maupun dalam usaha-usahanya memperbaiki ekonomi, sosial dan kebudayaan, maka ia diangkat menjadi anggota BPUPKI.

BPUPKI mengadakan persidangan untuk merumuskan Undang-Undang Dasar. Dalam persidangan ini, Soerjohamidjojo berada dalam kelompok perumus bersama Mr. Soepomo. Ia ikut bersuara terutama yang erat hubungannya dengan bentuk negara serta sifat-sifat kekuasaan dari kepala negara. Soerjohamidjojo mengemukakan pendapat tentang masalah pembentukan wilayah/daerah dari Indonesia Merdeka yang akan merdeka itu. Ia cenderung meminta agar hal ini dimasukkan ke dalam UUD negara, terutama tentang keistimewaan sesuatu wilayah tertentu. Pada bagian lain, Soerjohamidjojo menekankan pentingnya masalah kebudayaan dan bahasa daerah. Hal ini pun ia inginkan agar masuk dalam UUD yang mereka bicarakan itu.

Soerjohamidjojo menjadi anggota PPKI setelah BPUPKI dibubarkan sebelumnya. Pada awal kemerdekaan Indonesia, Soerjohamidjojo ikut berjuang di bidang kemiliteran. Pada bulan November tahun 1945 ia menjadi opsir penghubung Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dengan pangkat kolonel. Pada saat itu pernah ia menggerakkan pasukan (lasykar kesunanan) dari Solo ke Surabaya di dalam pertempuran bulan Oktober 1945, demikian pula ketika terjadi pertempuran Lima Hari di Semarang dalam pertengahan bulan Oktober 1945. Pasukan di bawah Hamidjojo dari Solo terlibat pertempuran melawan Jepang di Semarang itu. Peranan yang ia lakukan antara tahun 1947 -- 1948 adalah sebagai ketua *Fonds* Perang dan Kemerdekaan. Tugasnya berusaha mengumpulkan dana untuk membantu para korban perang kemerdekaan. Di samping itu ia juga berusaha mengumpulkan dana untuk Penumpasan PKI Madiun.

Suatu prestasi yang tidak dapat dilupakan dalam pengabdianya terhadap Bangsa dan Tanah Air adalah sebagai penye-

lenggara Pekan Olahraga Nasional pertama (PON I) di Kota Solo. Pada bulan-bulan sebelumnya, Komite Olimpiade Republik Indonesia bersama Persatuan Olahraga Republik Indonesia yang masing-masing berada di bawah pimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Mr. Widodo Sastrodiningrat menyelenggarakan konferensinya di Soerio Hamidjajan. Konferensi di rumah beliau itu diselenggarakan pada tanggal 2 -- 3 Mei 1948. Pekan Olahraga Nasional itu akhirnya diadakan pada 8 -- 12 September 1948. Soerjohamidjojo dalam Dewan Pimpinan Harian menjabat sebagai ketua umum. Pekan Olahraga Nasional yang diselenggarakan itu ternyata berhasil membangkitkan pemuda-pemuda pelajar untuk berprestasi dalam suasana memanasnya perang kemerdekaan. Situasi politik di Kota Solo waktu itu benar-benar makin panas karena sudah tampak tanda-tanda akan meletusnya pemberontakan PKI-Muso.

Dalam tahun-tahun sebelumnya, tepatnya pada tahun 1949, ia menjabat sebagai kepala Kantor Sosial Keresidenan Surakarta. Kehidupan dan perkembangan kebudayaan Jawa mendapat perhatiannya juga, karena itu antara tahun 1950 sampai tahun 1961 ia mendirikan sekaligus memimpin Konservatori Karawitan Indonesia Surakarta. Bersama tokoh-tokoh seniman dan budayawan Surakarta, Bali, dan lain-lain daerah dipimpinnya konservatori itu sampai berhasil mendidik kader-kader seniman muda.

Peranannya dalam masa-masa menjelang usia senja antara lain menjabat ketua Yayasan Dharma Bhakti Kepanduan. Di samping itu pada tahun 1961 ia juga dipercaya untuk memimpin Rombongan Kesenian Indonesia dalam Pameran Terapung ke Negara-negara Pasifik dan Asia Tenggara. Pengalamannya itu diperkaya oleh kedudukannya sebagai presiden *Rotary Club International* Surakarta. Kemudian antara tahun 1961 -- 1965 ia menduduki jabatan sebagai wakil ketua Dewan Pariwisata Indonesia (DEPARI) Jawa Tengah. Hal ini dilakukan setelah memasuki masa pensiun pada 31 Oktober 1961.

Di dalam masa pensiun itu ia masih saja terpilih untuk mengurus organisasi sosial di lingkungan keluarga keraton. Pada awal tahun 1962 ia terpilih menjadi "pangarsa" (ketua)

Panitia Putra-Putri Dalam Keraton Surakarta sampai menjelang wafatnya. Kemudian ia diangkat kembali sebagai pegawai negeri diperbantukan pada menteri Perhubungan Darat, Pos dan Telekomunikasi Pariwisata. Jabatannya sebagai pegawai tinggi ini dipangku sejak tahun 1962 sampai tahun 1965. Tugasnya ini erat dengan peranannya dalam Dewan Pariwisata Indonesia Jawa Tengah. Kegiatan di dalam kerabat keraton tidak dapat ditinggalkan begitu saja, karena itu pada tahun 1964 ia mengurus Yayasan Pahlawan Nasional Paku Buwono VI dengan jabatan wakil ketua.

Ketika pecah peristiwa G-30-S/PKI, keadaan wilayah Kesunanan Surakarta cukup gawat. Setelah keadaan normal kembali dan pemerintahan Orde Baru mulai menyusun kekuatan, Soerjohamidjojo aktif di dalam Sekretariat Bersama GOLKAR/Kokarmendagri unit Keraton Surakarta. Pada tahun 1971 Soerjohamidjojo terpilih menjadi wakil ketua Sekber Golkar/Kokarmendagri unit Keraton Surakarta. Kemudian dalam tahun berikutnya, 1972, Soerjohamidjojo menjadi anggota Dewan Pembina Golkar Kotamadya Surakarta sampai wafatnya pada tahun 1974.

IR. P. MOHAMMAD NOOR

Pangeran Mohammad Noor, bangsawan Kalimantan, lahir 24 Juli 1901 di Martapura, Kalimantan. Ia menempuh pendidikan *Standaard School* dengan mencapai diploma pada tahun 1911. Kemudian melanjutkannya ke HIS dengan mencapai diploma pada tahun 1917. Tokoh ini meneruskan studi ke MULO dengan diploma pada tahun 1921, dan kemudian memasuki HBS dengan mencapai diploma dua tahun kemudian (1923). Selanjutnya selama empat tahun ia studi di THS (*Technisch Hooze School*) dengan diploma insinyur sipil di tahun 1927.

Selepas studi di Sekolah Teknik itu, Noor bekerja sebagai kepala kantor *irrigatie afdeling* "Pemali Comal" di Tegal, kemudian *sectie Kantor Irrigatie afdeling "Brantas"* di Malang, selanjutnya pada *Irrigatie Tangerang werken Jakarta* pada Departemen *werken* Jakarta. Ia bekerja juga pada kantor *waterstaat* di Banjarmasin dan selanjutnya pada Departemen *Verkeer en Waterstaat* (Perhubungan dan Pengairan) *irrigatie* Bandung, pada *sectie* kantor *irrigatie* pada "Pekalen Sampean" di Lumajang (1941) sekaligus dalam *sectie ingenieur afdeeling* pada "Pekalen Sampean" di Banyuwangi.

Di samping bekerja pada kantor Pemerintah Belanda, Noor juga menjadi anggota *Volksraad* (1931 – 1939), dan dalam masa itu di tahun 1936 ia menjadi anggota *College Van Gedelegeerden*

(Badan Pekerja dari *Volksraad*) di Batavia (kini Jakarta). Dalam masa pendudukan Jepang, Noor tercatat sebagai anggota BPUPKI.

Selepas proklamasi kemerdekaan, Noor menjadi gubernur Kalimantan yang pertama. Ia menjadi pencetus gagasan irigasi di provinsi yang dipimpinnya itu. Hal ini baru berwujud puluhan tahun kemudian. Dalam masa politik dan pemerintahan parlementer (1950 -- 1959) Noor menjadi anggota DPR mewakili fraksi Masjumi dan duduk dalam kabinet pimpinan Djuanda yang menyebabkan tokoh ini diberhentikan dari organisasi politik yang dimasukinya sebelumnya.

MR. MAS BESAR MARTOKOESOEMO

Martokoesoemo lahir 8 Juli 1883 di Brebes. Ia menempuh pendidikan pertamanya di ELS dengan mencapai diploma pada 1909. Kemudian ia melanjutkan sekolahnya ke *Rechtschool* dengan diploma tahun 1915 dan selanjutnya Universitas Leiden dengan diploma pada tahun 1922.

Setelah menyelesaikan studinya di *Rechtschool*, tokoh ini bekerja sebagai *fiscaal griffier land gerecht* Pekalongan (1917 -- 1918). Pada tahun berikutnya (1919 -- 1921) menjadi *lid landraad* Semarang. Ia juga bekerja sebagai atb. (*Ambtenaar ter Beschikking*) atau pegawai yang diperbantukan pada *landraad* Pekalongan (1935 -- 1938). Selanjutnya menjadi *advocaat* dan *procureur* pada *Raad van Justitie* Semarang (1924 -- 1942). Sementara dalam tahun 1930 -- 1941 menjadi anggota RR (*Regentschap Raad*) Tegal, dilanjutkan sebagai anggota *college van gecomm* RR Tegal, dan dalam tahun 1939 -- 1941 anggota *Provinciale Raad* Jawa Tengah.

Selain bekerja pada kantor pemerintah, pada tahun 1935 -- 1939 Maartokoesoemo menjabat ketua Boedi Oetomo cabang Tegal, dan pada tahun 1939 -- 1940 menjabat ketua Parindra cabang Tegal. Menjelang kemerdekaan Indonesia, Martokoesoemo diangkat menjadi salah seorang anggota BPUPKI.

Dalam persidangan BPUPKI yang membicarakan tentang wilayah negara, Martokoesoemo meminta perhatian bahwa sebelum di-"stem" (pemungutan suara) supaya dijelaskan dahulu wilayah yang akan dijadikan Negara Indonesia Merdeka itu. Ia kemukakan hal tersebut karena menurutnya pertanggung jawab mereka kepada rakyat. Tokoh ini duduk sebagai anggota panitia ekonomi dan keuangan yang diketuai Mohammad Hatta dalam BPUPKI itu.

ABDOEL KAFFAR

Abdoel Kaffar lahir pada 14 Mei 1913, di Sampang. Ia menempuh pendidikan di HIS dengan mencapai diploma di tahun 1927. Selanjutnya ia bersekolah ke MULO dan Sekolah Opsir di Pamekasan dalam *Korporal aspirant officier* dengan diploma yang dicapai dua tahun kemudian (1929). Selanjutnya ia menjalankan studinya pada *sergeant aspirant officier* dengan mencapai diploma di tahun 1931. Tiga tahun kemudian ia menempuh *sergeant majoor aspirant officier* (1934) dan sekolah senapan *mitrailleur* serta memasuki sekolah racun (gas) di tahun 1939.

Dalam masa delapan tahun (1934 -- 1942) Kaffar menjadi *luitenant kl 2* sampai *commandant 2 compagnie* Barisan I di Bangkalan. Ia menjabat kapten Barisan Madura. Dalam masa pendudukan Jepang, tokoh ini menjadi anggota tambahan dalam BPUPKI.

Dalam sidang BPUPKI, tokoh ini mengemukakan kegembiiraannya tentang adanya wakil masyarakat Madura dalam badan tersebut. Ia kemukakan keinginan sebagian besar masyarakat yang diwakilinya tentang bentuk negara yang Republik itu, dan juga keinginan mereka yang memilih bentuk kerajaan walaupun dengan jaminan kesetiaan yang ikhlas dan jujur dari kalangan ini untuk setuju dengan pemerintahan yang dihasilkan oleh persidangan BPUPKI itu.

Dengan beralasan pada pengetahuan dan pengalaman dalam bidang militer, termasuk pandangan dari sudut strategis, Kaffar mendukung usul masuknya wilayah tertentu (baca: Borneo Utara) yang berada dalam pengawasan Inggris ketika itu. Ia mendukung pandangan dan pendapat Muhamad Yamin tentang wilayah Indonesia Merdeka yang mereka bicarakan itu. Kaffar duduk sebagai anggota panitia pembelaan tanah air yang diketuai oleh Abikoesno Tjokrosoejoso.

PENUTUP

Upaya pengumpulan biografi tokoh Badan Menyelidiki Os-saha-oesaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (kemudian Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia disingkat BPUPKI) seperti yang diperlihatkan dalam urian sebelumnya, dimaksudkan untuk mengetahui latar (lingkungan awal yang berpengaruh pada tokoh tersebut, pendidikan formal dan non-formal serta juga pengalaman pribadi), pemikiran dan keterlibatan (kecendrungan politik, peranan dan pengalaman) tokoh-tokoh dalam organisasi yang mengantarkan bangsa Indonesia ke gerbang kemerdekaan di tahun 1945 itu.

Pada umumnya tokoh-tokoh dalam badan itu adalah kaum nasionalis. Dikatakan demikian karena mereka mempunyai cita-cita yang sama yaitu Indonesia Merdeka, walaupun dengan visi dan kepentingan politik yang berbeda, bahkan perbedaan yang ada itu lebih didorong oleh pemakaian contoh-contoh yang kurang lengkap dipahami makna dan maksud dari perum-pamaan itu. Memang secara sederhana tetapi tajam dikemukakan adanya dua kelompok utama dalam persidangan lembaga terhormat itu, yaitu kalangan kebangsaan dan kalangan Islam. Pengelompokan ini lebih didasarkan pada argumentasi tat kala berlangsung pembahasan suatu materi tertentu, tetapi mereka mempunyai tujuan yang sama tentang hal-hal yang diperde-batkannya itu.

Keenampuluh delapan dokoh yang diuraikan dalam Buku I & II, di luar beberapa anggota istimewa dari kalangan Jepang sendiri, dan mereka dianggap mewakili seluruh lapisan masyarakat yang ada, dengan dua di antaranya menjadi pimpinan sidang, terlihat mengembangkan pikiran mereka tidak semata-mata sesuai dengan permintaan *saiko shikikan* (panglima tertinggi) Tentara Pendudukan Jepang yang membentuk badan ini. Para tokoh itu berdebat mengemukakan pandangan dan pikirannya dengan latar tertentu, di samping keinginan dan kepentingan politik tertentu pula. Perhatikan saja pengelompokan masalah atau persoalan dan upaya mencapai permufakatan di antara mereka tentang masalah yang diperdebatkan itu. Perhatikan pula interaksi di antara tokoh-tokoh itu dalam mencapai kesepakatan tertentu bagi membuat landasan falsafah hidup bangsa dan negara di negeri tercinta ini. Banyak alternatif yang dapat dikembangkan dari persidangan yang amat singkat itu.

Berbagai interpretasi dapat dikembangkan dewasa ini. Jarak dari peristiwa menjelang proklamasi itu mulai menjauh menurut ukuran waktu. Sejarah sendiri di samping rekaman peristiwa, juga merupakan materi pelajaran bagi generasi kini dan mendatang. Dengan demikian suatu peristiwa dapat saja dikaji ulang dengan ditemukannya naskah atau sumber baru. Pandangan semacam ini tentu melegakan hati dan pikiran, sekaligus merangsang adanya penulisan baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Aboebakar, H., *Sejarah Hidup K.H.A. Wachid Hasyim dan karyanya tersiar*, Jakarta: Panitia Buku Peringatan K.H.A. Wachid Hasyim, 1957.
- Amin, M. Mansyur, *HOS Tjokroaminoto, Ilmu dan Nasionalisme di Indonesia*, Yogyakarta: Nur Cahaya, 1980.
- Anderson, BRO'G., *Revoloesi Pemoeda, Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944 – 1946*, Jakarta: Sinar Harapan, 1988.
- Anshari, ES., *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional antara Nasionalis Islami dan Nasionalis "Sekuler" tentang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945–1959*, Bandung: Pustaka Antara, 1981.
- Anwar, R (ed.), *Mengenang Syahrir*, Jakarta: Gramedia, 1980.
- Basri, Yusmar., *Petisi Sutarjo (usul Indonesia Berdiri Sendiri). Seminar Sejarah Nasional II*, Yogyakarta, 1970.
- Benda, Harry J., *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam pada masa pendudukan Jepang, 1942–1945*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1980.
- Brugmans I.J., *Geschiedenis van het Onderwijs in Nederland Indie*, Djakarta: Groningern, 1957.
- Darmosugito, Pitoyo., *Menjelang Indonesia Merdeka*, Jakarta PT. Gunung Agung 1982.

- Darmosugito, Pitoyo., *Ensikloped Nasional Indonesia*. Jilid 10. Jakarta: PT Cinta Pustaka, 1990.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *KH. Mas Mansjur*. 19.. (?)
- Dewantara, KH., *Pendidikan*, Jilid I, Cetakan kedua, Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- Dewantara, KH., *Kenang-kenangan; Dari Kebangunan Nasional sampai Proklamasi Kemerdekaan*, Jakarta: Penerbitan Endang, 1952.
- Dewantara, KH., *Masalah Kebudayaan: Kenang-kenangan promosi doctor honoris cuasa*, M.L. Persatuan T.S., 1957.
- Dewantara, KH., *Demokrasi dan Leiderschap*, M.L. Persatuan T. S. cet. ke- 2. 1959.
- Dewantara, KH., *Karya: (Pendidikan)*. Yogyakarta: M.L. Persatuan T.S., 1962.
- Dewantara, KH., *Karya Ila (Kebudayaan)*. Yogyakarta: M.L. Persatuan T.S., 1967.
- Djajadiningrat, Achmad., *Herinneringer*,. Amsterdam, Batavia: C. Kolif en Co, 1936.
- Djojoadisurjo, A.S., *Lahirnya Republik Indonesia*, Jakarta: PT. Kinta, 1972.
- Djojoadisurjo, A.S., *Kesadaran Nasional: sebuah otobiografi*. Jakarta: Gunung Agung, 1974.
- Djojohadikusumo, Margono., *Kenang-kenangan Dari Tiga Zaman* (Satu Kisah Kekeluargaan Tertulis), PT. Indira, Jakarta.
- E.H. Tuma., *European Economic History*. New York, Evanston, San Francisco, London, Harper & Row, 1971.
- Ekajati, Edi S., dkk., *Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Barat*. Jakarta, Proyek IDKD, Depdikbud, 1986.
- Gonggong, Anhar., *R.P. Soeroso, Dokumen-dokumen terbatas tentang dirinya*, Jakarta: Proyek IDSN, Ditjarahnitra-Depdikbud, 1983/1984.

- Gunseikabu, *Orang Indonesia Terkemoea di Djawa*. Djakarta, 1944., diterbitkan kembali oleh Gadjah Mada University Press, 1986.
- Hadikusumo, Ki Bagus., *Islam Sebagai Dasar Negara dan Ahlaq Pemimpin*. Yogyakarta: Pustaka Rahayu.
- Hadikusumo, Djarnawi., *Derita Seorang Pemimpin, Riwayat Perjuangan dan Buah Pikiran Ki Bagus Hadikusumo*. Cetakan II, Yogyakarta: Penerbit Persatuan, 1979.
- Hatta, M., *Sekitar Proklamasi*. Jakarta: Tinta Mas, 1970.
- Hatta, M., *Memoir*. Jakarta: Tintamas, 1979.
- Herkusumo, Arniati Prasedjawati., *Chuo Sangi In (Dewan Pertimbangan Pusat Pada masa Pendudukan Jepang)*. Jakarta: PT. Rosda Jayaputra, 1984.
- Hp., Suradi, dkk., *Sejarah Pemikiran Pendidikan dan Kebudayaan*. Jakarta: Proyek IDSN, Ditjarahnitra—Depdikbud. 1984/1985.
- I.N., Soebagijo., *K.H. Masjkur*. Jakarta: Gunung Agung, MCMLXXXII.
- Ibrahim, M., *Dr. Sukiman Wirjosandjojo*. Jakarta: Proyek IDSN. Ditjahnitra, Depdikbud, 1985/1986.
- Iskandar, M., *Para Pembawa Amanah: Kyai dan Ulama dalam perubahan sosial politik di Priangan*. Jakarta: Thesis S2, Program Pasca Sarjana UI, 1991.
- Junaidi, *Runtuhnya Negara Pasundan*. Skripsi Sarjana pada Universitas Indonesia, 1989.
- Kahin, George, MC. T., *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia* (diterjemahkan oleh Ismail bin Muhammad dan Zaharom bin Abdul Rasyid dari "Nasionalism and Revolution in Indonesia"). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pelajaran Malaysia, 1980.
- Kartodirdjo, S., *Kolonialisme dan Nasionalisme di Indonesia abad 19—20*. Yogyakarta: Lembaga Sejarah I Seksi Penelitian Jur. Sejarah Fak. Sastra dan Kebudayaan UGM, 1967.

- Kartodirdjo, S, dkk., *Sejarah Nasional Indonesia*, jilid VI. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984.
- Kartohadikusumo, Soetardjo., *Musyawarah dan Mufakat*. Prasarana Sutarjo Kartohadikusumo kepada Badan Pembantu Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI. Bandung; 1963.
- Kartohadikusumo, Sutarjo., *Membangun Masyarakat Murba*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Kartohadikusumo, Sutarjo., *Desa. Bandung: Sumur Bandung*, Cetakan ke-2, 1989.
- Kasker, Bruno., *Humanism Bondage in South – East Asia*, Chape Hill: University of North Carolina Press, 1950.
- Kepartaian di Indonesia. *Seri I, Kementerian Penerangan RI*, Yogyakarta, 1950.
- Kutoyo, Sutrisno., *Kyai Haji Ahmad Dahlan*. Jakarta: Proyek Biografi Pahlawan Nasional, 1978.
- Kutoyo, Sutrisno., *Prof. H. Muhammad Yamin, SH.*, Jakarta: Proyek IDSN, Ditjarahnitra–Depdikbud, 1981/1982.
- Kutoyo, Sutrisno., *Prof. H. Muhammad Yamin, SH*. Jakarta: Proyek IDSN, Ditjarahnitra–Depdikbud, 1981/1982.
- Kutoyo, Sutrisno., *Haji Agus Salim Riwayat Hidup dan Perjuangannya*. Bandung: Angkasa.
- Kowani., *Buku Peringatan 30 Tahun Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia, 22 Desember 1928–22 Desember 1958*.
- Latuharhary, J., *Azab Sengsara Kepoelaoean Maloekoe*, Pengurus Sarekat Ambon cabang Makasar, Makasar Mei-1932.
- Leirissa, RZ., *Maluku dalam Perjuangan Nasional Indonesia*. Lembaga Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia 1975.
- Masjkuri., *Drs. Susanto Tirtoprodjo SH: Hasil Karya dan Pengabdiannya*. Jakarta: Proyek IDSN, Depdikbud–Ditjarahnitra, 1982/1983.

- Masjkuri., *Prof. Dr. Ir. Roosseno Soerjohadikoesoemo: Karya dan Pengabdianannya*. Jakarta: Proyek IDSN, Ditjarahnitra—Depdikbud, 1984.
- Mukuyat, *Haji Agus Salim Karya dan Pengabdianannya*. Jakarta: Proyek IDSN, Ditjarahnitra—Depdikbud, 1985.
- Mulyono., *Gusti Pangeran Puruboyo Hasil Karya dan Pengabdianannya*. Jakarta: Proyek IDSN, Ditjarahnitra—Depdikbud, 1982/1983.
- Nanulaita I.), *Johannes Latuharhary SH, Hasil Karya dan Pengabdianannya*. Jakarta: Proyek IDSN; Ditjarahnitra—Depdikbud, 1982/1983.
- Nasution, AH., *Tentara Nasional Indonesia*. Jilid I, Jakarta: Seruling Masa, 1970.
- Nasution, A.H., *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia (Diplomasi atau Bertempur)*, jilid 2, Jakarta: Disjarah AD dan Angkatan di Bandung, 1973, h. 96.
- Nasution, AH., *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*. 12 jilid Bandung: Angkasa, 1979.
- Niel, R. van., *The Emergence of the Modern Elite*. Van Hoeve: S. Gravenhage, 1960.
- Nyak Wali, AT., *Mr. Sartono: Karya dan Pengabdianannya*. Jakarta: Proyek IDSN, Ditjarahnitra—Depdikbud, 1985.
- Noer. D., *Gerakan Modern Islam di Indonesia, 1900—1942*. Jakarta: LP3ES, 1980.
- Notosusanto, Nugroho., *Naskah Proklamasi yang Otentik dan Rumusan Pancasila yang Otentik*. Jakarta: Departemen Pertahanan dan Keamanan, Pusat Sejarah ABRI, 1971.
- Notosusanto, Nugroho., *Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1982.
- Notosusanto, Nugroho., *Tentara Peta pada Jaman Pendudukan Jepang*. Jakarta: Gramedia, Jakarta, 1979.
- Yamin, Mr. Muhd., *Naskah Persiapan Undang-undang Dasar* Jakarta: CV. Prapanca, 1959.

- Panitia Peringatan 70 tahun Haji Agus Salim, *Jejak dan Langkah Haji Agus Salim*. Jakarta: Tintamas, 1954.
- Panitia Penulisan Sedjarah Departemen Luar Negeri, *Dua Puluh Lima Tahun Departemen Luar Negeri, 1945-1970*. Jakarta: Jajasan Kesedjahteraan Karjawan Deplu, 1971.
- Parengkuan, F.E.W., A.A. Maramis, S.H., Jakarta: Departemen P & K. 1984.
- Prasojo, Sudjoko, et. al., *Profil Pesantren*. Jakarta: LP3ES.
- Pringgodigdo, AK., *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. Jakarta: Pustaka Rakyat, 1964.
- Rasjidi, HM., "Pengakuan Pertama dari Negara-negara Arab", *Seratus Tahun Haji Agus Salim*. Jakarta: Sinar Harapan, 1984.
- Rasid, G., *Maria Ulfah Santoso: Pembela Kaumnya*. Jakarta: Bulan Bintang, 1982.
- Rusli., *Berlakunya Kembali Undang-undang Dasar 1945*. Jakarta: Skripsi Sarjana S1, FSUI, 1986.
- Sagimun., *KH. Dewantara*.
- Sayogo., *30 Tahun Taman Siswa, 1922-1952*. Yogyakarta: M.L. Taman Siswa, 1952.
- Salam, Solichin., *Haji Agus Salim hidup dan Perjuangannya*. Jakarta: Jaya Murni, 1961.
- Salam., Solichin., *Soekarno Hatta*. Jakarta: Pusat studi dan penelitian Islam, 1991.
- Salam, Solichin., *Biografi Bung Hatta*.
- Sandra, *Sejarah Pergerakan Buruh Indonesia*. Djakarta: PT. Pustaka Rakjat, 1961.
- Sejarah Museum Perumusan Naskah Proklamasi*. Jakarta: Proyek Pembinaan Permuseuman, Ditjenbud-Depdikbud, 1990/1991.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Tokoh Indonesia Dalam Pembangunan (Daftar Riwayat Hidup)*. Jakarta, 1983.

Seperempat Abad DPR RI. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI, 1970.

Sipahoetar, AM., *SIAPA*. Soekaboemi: cet. ke-2, 1946.

Susunan dan Program Kabinet Republik Indonesia selama 25 tahun, 1945–1970 Djakarta: Naskah Departemen Penerangan, Penerbit Pradnya Paramita, 1970.

Soebekti., *Ki Hajar Dewantara*. Usaha Penerbitan "Suharir", 1952.

Soegito, AT., *Prof. Mr. Dr. R. Supomo*. Jakarta: Proyek IDSN, Ditjarahnitra–Depdikbud, 1984.

Soegito, AT., *Pembukaan UUD 1945; Sejarah Penyusunan dan Pengesahaannya*. Semarang: IKIP Semarang, 1973.

Ssp., Pranata., *Ki Hajar Dewantara: Perintis Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1959.

Sumantri, Iwa Kusuma., *Sejarah Revolusi Indonesia, Masa Revolusi Bersenjata, jilid II*. Jakarta: Grafika.

Sugito, A.T., *Dokter KRT Rajiman Wedyodiningrat, Karya dan Pengabdian-nya*, Jakarta: Proyek IDSN, Ditjarahnitra–Depdikbud, 1985/1986.

Suhatno, *Ki Bagus Hadikusumo, Hasil Karya Dan Pengabdian-nya*. Jakarta: Proyek IDSN, Ditjarahnitra–Depdikbud, 1982/1983.

Suhatno, *Jenderal Mayor RH. Abdul Kadir: Karya dan Pengabdian-nya*. Jakarta: Proyek IDSN, Ditjarahnitra–Depdikbud, 1986.

Sudiri Panyarikan, Ktut., *Sukarjo Wiryopranoto*. Jakarta: Proyek IDSN, Ditjarahnitra–Depdikbud, 1981/1982.

Sukardi, Heru., *Kyai Haji Hasyim Asya'ri*. Jakarta: Proyek IDSN, Ditjarahnitra–Depdikbud, 1979/1980.

Suratmin., *Prof. Ir. Raden Mas Panji Surakhman Cokroadisuryo, Hasil Karya dan Pengabdian-nya*. Jakarta: Proyek IDSN, Ditjarahnitra–Depdikbud, 1981/1982.

- Suratmin., *Prof. Ir. Raden Mas Panji Surakhman Cokroadisuryo, Hasil Karya dan Pengabdianannya*. Jakarta: Proyek IDSN, Ditjarahnitra—Depdikbud, 1981/1982.
- Sutjiatiningsih., *K.H. Wachid Hasyim*. Jakarta: Proyek IDSN, Ditjarahnitra—Depdikbud, 1983/1984.
- Sutrisno., *Dr. Sutarjo Kartohadikusumo, Hasil Karya dan Pengabdianannya*. Jakarta: Proyek IDSN, Ditjarahnitra—Depdikbud, 1982/1983.
- Sutjiatiningsih, S., *Gubernur Suryo*. Jakarta: Depdikbud—Ditjenbud, Ditjarahnitra, Proyek IDSN. 1982/1983.
- Tashadi, dkk., *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945—1949), Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Proyek IDSN, Ditjarahnitra—Depdikbud, 1980.
- Tashadi, Prof. K.H. Abdul Kahar Mudzakkir riwayat hidup dan perjuangannya. Jakarta: Proyek IDSN, Ditjarahnitra—Depdikbud, 1986.
- Tauchid, M., *Perjuangan dan Ajaran Hidup Ki Hajar Dewantara*. Yogyakarta: M.L. T. Siswa, 1963.
- Tauchid, M., *Pahlawan dan Pelopor Pendidikan*. Yogyakarta. M.L. Taman Siswa, 1968.
- Tirtoprodjo, S., *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*. Jakarta: PT. Pembangunan, cetakan IV, 1970.
- Tirtoprodjo, S., *Najoko Lelono*. Jakarta: Sari Pers. cetakan IV, 1987.
- Wal S.L. Van der., *Het Onderwijsheleid in Nederlandsch Indie 1900—1940 (een bronnenpublikatie)*. Groningen: J.B. Wolters, 1963.
- Zuhdi, Susanto., *Bogor Shu pada masa pendudukan Jepang, 1942—1945*. Jakarta: Skripsi Sarjana Sejarah, FSUI, 1979.

DOKUMEN

Almanak Nasional 1953, Jakarta: Gapura NV, 1953.

Data Biografi Prof. Dr.Ir. Roosseno Soerjohadikoesoemo. Jakarta: Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Departemen P & K, 1978.

Ensiklopedia Umum, Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1973.
Gramedia, *Apa dan Siapa*.

IKIP Bandung, *Wisuda Gelar Dr. HC kepada Saudara Sutarjo Kartohadikusumo*, 28 Januari 1976.

Kementrian Penerangan, *Detik dan Peristiwa 17 Agustus 1945*. Jakarta: 23 Januari 1953.

M.L. Taman Siswa., *Mengenangkan Jasa Pahlawan Ki Hajar Dewantara*. Yogyakarta: Kepaniteraan M. Luhur T.S., 1960.

Mengenangkan kembali, *Drs. KRMA Sosrodiningrat*, pada Wilujengan Seribu hari wafatnya 8 Februari 1967 – 3 November 1969, Solo: 1969

Panitia Buku Peringatan: *Taman Siswa 30 Tahun, 1922–1952*.

Peraturan Besar Wanita Taman Siswa (1975).

Profil Manusia Konkrit. Kumpulan Karangan dipersembahkan kepada Prof. Dr.Ir. Roosseno pada HUT 70 tahun tanggal 2 Agustus 1978.

Riwayat Hidup almarhum Mr. J. Latuharhary. Dokumentasi Ny. H. Latuharhary, dan lain-lain.

Riwayat Singkat KPH Woerjaningrat: Mahaputra Perintis Kemerdekaan Indonesia, t.t.

Sambutan Ibu Latuharhary-Pattirajiwane pada *Hari Peringatan Ulang Tanun ke 81 almarhum Mr. J. Latuharhary*, tanggal 6 Juli 1961 di Gedung Juang Jln. Abdurachman, Jakarta.

Stihting N.V. Handel Maatschappij Intraport (Indonesia Trading and Transport Company), diambil dari tambahan koran Jawa (Bijvoegsel der Javase Coupant van. 30–12–47 no. 103).

Staatsblad van Nederlandsch-Indie, 1914, No. 359.

Van Baal, Jan., *Ontoliqt Varleden Tot 1947: Indisch Bestuursambtenaar in Vrede en Orlog*, 1990.

MAJALAH :

Baswedan AR., "Aliran dan Organisme", *Insaf*, September 1933, No. 6, Th. I.

Baswedan AR., "Sumpah Pemuda Indonesia Keturunan Arab (1934)", *Penyebar Semangat*, 25 Januari 1975, No. 4 Th. ke-4.

Ben Anderson, "The Problem of Rice," *Indonesia*, II, Oktober 1966, h. 85-7.

Mangunsarkoro., "Het Nationalisme in de Taman Siswa Beweging", dalam *Koloniale Studien No. 2*, 1937.

Mr. A.A. Maramis, "Sang Perintis Yang Keras Kepala Itu", *Maesaan*, Mei 1991.

Hazil, "De Taman Siswa en de Revolutie", *Indonesie*, Mei 1950.

Pusara, Oktober 1932, Nopember 1932, Maret 1933, Agustus 1933, Januari 1935, Agustus 1935, Agustus 1950, Juni/Juli/Agustus 1954, Juli 1958, April 1959, Juli 1965, Agustus 1965.

"Rangkaian Masalah Sekeliling Penerbitan Sadar", *Sadar*, 10 Juni 1936.

Bafaqiah, H., "Soal Tanah Air dan Kebangsaan", *Sadar*, 10 Juni 1936.

Sarinah, no. 35, 1984. Saksi Hidup Kongres Perempoean Indonesia Pertama.

SURAT KABAR

Anatara, 18 dan 19 Nopember 1945.

Kedaoelatan Rakjat, 28 Februari 1946.

Jamharah binti Abdul Kahar, "Saat-saat meninggalnya ayahku", dalam *Harian Abadi*, 18 Desember 1973.

M. Natsir, "Prof. Kahar Mudzakkir sudah tidak ada lagi", dalam *Harian Abadi*, tanggal 5 Desember 1973.

Prof. Dr. H.M. Rasyidi, "Mengenang 40 tahun Persahabatan", dalam *Harian Abadi*, tanggal 12-13 Desember 1973.

HAMKA, "Kenang-kenangan", dalam *Harian Abadi*, tanggal 10 Desember 1973.

H. Ahmad Basuni, "Perkenalan saya dengan Pak Kahar Mudzakkir", dalam *Harian Masa Kini*, 11 Desember 1973.

Ny. Sukaptinah Sunarjo., *Kompas*, 4 Nopember 1977.

Baswedan, AR., "Apakah Indonesia Tidak diundang ke Kongres Solidaritas Palestine di Kairo?", *Kedaulatan Rakyat*, 31 Maret 1984.

WAWANCARA

Nyak Ali Alfatirta terhadap Mr. Soenario tanggal 20, 23, dan 24 Juli 1985 di Jakarta, dan juga wawancara terhadap Mr. Moch. Ichsan tanggal 24 Juli 1985 di Jakarta.

Wawancara Drs. Suratmin dengan Prof. Mr. Haji Sumantri Praptakusuma di Jl. Sisingamangaraja No. 27, Jakarta, bulan Juli 1980.

Lampiran 1

AGENDA ACARA PERSIDANGAN BPUPKI

Senin,	28 Mei 1945	acara peresmian
Selasa,	29 Mei 1945	Sidang <i>pertama</i> dengan materi pidato Mr. Muhd. Yamin tentang asas dan dasar negara kebangsaan
Rabu,	30 Mei 1945	-----
Kamis,	31 Mei 1945	Sidang <i>pertama</i> dengan materi pidato Mr. Dr. R. Soepomo tentang dasar negara.
Kamis,	31 Mei 1945	Sidang <i>pertama</i> dengan materi pidato Mr. Muhd. Yamin tentang dasar negara.
Jum'at,	1 Juni 1945	Sidang <i>pertama</i> dengan materi pidato Ir. Soekarno tentang dasar negara.
Selasa,	10 Juli 1945	Sidang <i>kedua</i> rapat besar penambahan anggota sebanyak 6 orang: 10.00 — 11.16 rapat 1 12.16 — 13.30 rapat 2 15.30 rapat 3 memutuskan tentang bentuk negara 16.35 — 18.00 rapat 4
(dalam rapat besar ini lima belas anggota berpidato)		
Rabu,	11 Juli 1945	Sidang <i>kedua</i> rapat besar 10.50 — 12.05 rapat 1 memutuskan tentang batas negara 12.30 — 13.10 rapat 2 membahas UUD

14.30 –16.40 rapat 3 memutuskan pembentukan 3 panitia kecil

(RUUD + pertahanan + ekonomi)

(dalam rapat besar ini duapuluh anggota berpidato)

Jum'at, 13 Juli 1945 sidang dilanjutkan dengan rapat panitia kecil.

Sabtu, 14 Juli 1945 Sidang kedua rapat besar
15.10 – 16.16

(dalam rapat besar ini tujuh anggota berpidato)

Minggu, 15 Juli 1945 Sidang kedua rapat besar
10.20–13.05 rapat 1
15.10–22.11 rapat 2
22.20–23.25 rapat 3

(dalam rapat besar ini duapuluh lima anggota berpidato)

Senin, 16 Juli 1945 Sidang kedua rapat besar
10.30 –

(dalam rapat besar ini lima anggota berpidato)

Selasa, 17 Juli 1945 acara penutupan

Sumber :

Yamin, Muhd., *Naskah Persiapan Undang-undang Dasar*. Jakarta: CV Prapanca, 1959.

Lampiran 2

Daftar anggota BPUPKI asal dari anggota Tjhuo Sangi—In

BPUPKI	Tjhuo Sangi—In
1. Dr. KRMT Radjiman Wedioningrat	anggota daerah
2. R.P. Soeroso	anggota
3. Ir. Soekarno	anggota
4. Mr. Muhd. Yamin	anggota tambahan kedua
5. Dr. R. Koesoema Atmadja	----
6. R. Abdoelrahim Pratalykrama	----
7. R. Aris	anggota daerah
8. KH. Dewantara	anggota
9. K. Bagoes Hadikoesoemo	anggota
10. BPH Bintoro	----
11. AK Moezakkir	----
12. BPH Poerobojo	anggota daerah
13. RAA Wiranatakoesoema	----
14. Ir. R. Askarsoetedjoe Moenandar	----
15. Oey Tjang Tjoei	anggota
16. Drs. Mohd. Hatta	anggota
17. Oei Tjong Hauw	----
18. H. Agoes Salim	----
19. Mr. Soetardjo Kartohadikoesoemo	----
20. RM. Margono Djojohadikoesoemo	anggota tambahan pertama
21. KH Abdul Halim	anggota
22. KH. Masjkoer	----
23. R. Soedirman	anggota pengganti
24. Prof. Dr. PAH Djajadiningrat	anggota
25. Prof. Dr. Soepomo	----
26. Prof. Ir. R. Rosseno	anggota daerah
27. Mr. R. Pandji Singgih	----
28. Mr. Ny. Maria Ulfah Santoso	----
29. Mr. TA Soerjo	----

30. R. Roeslan Wongsokoesoemo	anggota
31. Mr. R. Soesanto Tirtoprodjo	----
32. Ny. RSS Mangoenpoespito	----
33. Dr. R. Boentaran Martoatmodjo	anggota
34. Liem Koen Hian	----
35. Mr. J. Latuharhary	anggota tambahan kedua
36. Mr. R. Hindromartono	----
37. R. Soekardjo Wirjopranoto	anggota
38. H. Ahmad Sanoesi	----
39. AM Dassad	----
40. Mr. Tan Eng Hoa	----
41. Ir. RMP Soerachman	----
42. RAA Soemitro Kolopaking	----
43. KRMT Werjoningrat	anggota
44. Mr Ahmad Soebardjo	----
45. Prof. Dr. Djenal Asikin	----
46. Abikusno Tjokrosoejoso	anggota
47. Parada Harahap	----
48. Mr. RM. Sartono	anggota
49. KH. Mansoer	anggota
50. Dr. KRMT Sosrodiningrat	anggota daerah
51. Mr. R. Soewandi	----
52. KHA Wachid Hasjim	anggota
53. PF Dahler	anggota tambahan kedua
54. Dr. Soekiman	----
55. Mr. KRMT Wongsonegoro	----
56. R. Otto Iskandar Di Nata	anggota
57. AR Baswedan	anggota tambahan kedua
58. Abdul Kadir	----
59. Dr. Samsi Sastrowidagdo	anggota
60. Mr. AA Maramis	anggota tambahan kedua
61. Mr. R. Samsuedin	anggota
62. Mr. R Sastromoeljono	----
63. Abdul Fattah Hassan	----

64. Asikin Natanegara	----
65. Surio Hamidjojo	----
66. Mohammad Noor	----
67. Besar	----
68. Abdul Kaffar	----

Catatan :

nomor urut 63 sampai dengan 68 adalah anggota tambahan untuk BPUPKI

anggota diangkat tanggal 17 Oktober 1943

anggota tambahan pertama diangkat tanggal 5 September 1944

anggota tambahan kedua diangkat tanggal 7 Nopember 1944

Sumber :

Herkusumo, Arniati Prasedjawati., *Chuo Sangi-In (Dewan Pertimbangan Pusat pada masa Pendudukan Jepang)*. Jakarta: PT Rosda Jayaputra, 1984.

Yamin, Muhd., *Naskah Persiapan Undang-undang Dasar*. Jakarta: CV Prapanca, 1959.

Lampiran 3-1

Panitia Perancang Undang-undang Dasar

Ketua : Ir. Soekarno
 Anggota : Mr. AA Maramis
 Rd. Otto Iskandar Di Nata
 BPH Poeroebojo
 H. Agus Salim
 Sutardijo * (?)
 Mr. Dr. Soepomo
 Mr. Ny. Maria Ulfah Santoso
 KH. Wachid Hasjim
 Parada Harahap
 Mr. J. Latuharhary
 Mr. Susanto Tirtoprodjo
 Mr. RM Sartono
 Mr. KRMT Wongsonegoro
 KRMT Woerjaningrat
 Mr. RP Singgih
 Mr. Tan Eng Hoa
 Prof. Dr. PAH Djajadiningrat
 Dr. Sukiman

Anggota istimewa : Myano

Lampiran 3—2

Panitia Perancang Pembelaan Tanah Air

Ketua : Abikoesno Tjokrosoejoso
 Anggota : Abdul Kadir
 Asikin Natanegara
 BPH Bintoro
 Mr. R. Hindromarto
 KH Kahar Moezakkir
 H. Ah. Sanusi
 Ir. R. Askarsoetedjoe Moenandar
 R. Soekardjo Wirjopranoto
 RMTA Soerjo
 Abdul Kaffar
 KH Masjkoer
 KH Abdul Halim
 R Soemitro Kolopaking
 R. Soedirman
 R. Aris
 Mohammad Noor
 R. Abdulkadir Pratalykrama
 Mr. Liem Koen Han
 Dr. Boen taran Martoatmodjo
 R. Roeslan Wirjokoesoemo
 Ny. RSS. Soenarjo Mangunpuspi to

Anggota istimewa : Tanaka
 Matsuura

Lampiran 3—3

Panitia Perancang Ekonomi dan Keuangan

Ketua : Drs. Moh. Hatta
 Anggota : Ir. Surachman
 RM Margono Djojohadikoesoemo
 Mr. Sutardjo Kartohadiprodjo
 Dr. Samsi Atmowidagdo
 Ir. R. Roosseno
 Surio Hamidjojo
 Ki Hadjar Dewantara
 Mr. R. Koesoema Atmadja
 AM Dassad
 Mr. Oei Tiong Hauw
 Djenal Asikin Natanegara
 PF Dahler
 Mr. Besar
 Mr. Muhd. Yamin
 AR Baswedan
 KH Bagoes Hadikoesoemo
 Mr. R. Sastromoeljono
 Abd. Fatah Hassan
 KH Mansjoer
 Mr. Oei Tiong Ijoei
 RAH Wiranatakoesoema
 Mr. R. Samssoeddin

Anggota istimewa : Tokonomi

Sumber :

Muhd. Yamin, *Naskah Persiapan Undang-undang Dasar*. Jakarta: CV Prapanca, 1959. h. 250—3.

Lampiran 4

Komposisi kedudukan anggota-anggota dari :

Panitia Kecil	Panitia Sembilan	BPUPKI	Chuo Sangi-In
K. Bagoes Hadikoesoemo	---	anggota	anggota
Wachid Hasjim	anggota	anggota	anggota
Mr. Muhd. Yamin	anggota	anggota	anggota tambahan
Soetardjo Karto hadikoesoemo	---	anggota	---
AA Maramis	anggota	anggota	anggota tambahan
Otto Iskandar Di Nata	---	anggota	anggota
Moh. Hatta	anggota	anggota	anggota
Soekarno	anggota	anggota	anggota
---	A. Soebardjo	anggota	---
---	KH. A Moe zakir	anggota	---
---	Abikoesno Tjo- krosoejoso	anggota	anggota tambahan
---	H. Agoes Salim	anggota	---

Sumber : *diolah*

Lampiran 5

Daftar anggota PPKI asal dari anggota BPUPKI

PPKI	BPUPKI
1. Ir. Soekarno (Ketua)	anggota
2. Drs. Moh. Hatta (Wakil Ketua)	anggota
3. Prof. Mr. R. Soepomo (anggota)	anggota
4. KRMT Radjiman Wedioningrat (anggota)	Ketua pelaksana
5. RP Soeroso (anggota)	Waka pelaksana
6. Mr. Soetardjo (anggota)	anggota
7. KH Wachid Hasjim (anggota)	anggota
8. Ki Bagoes Hadikoesoemo (anggota)	anggota
9. Rd. Otto Iskandar Di Nata (anggota)	anggota
10. Abdul Kadir (anggota)	anggota
11. Surio Hamidjojo (anggota)	anggota
12. BPH Poerobojo (anggota)	anggota
13. Yap Tjwan Bing (anggota)	----
14. Mr. J. Latuharhary (anggota)	anggota
15. Dr. Amir (anggota)	----
16. Abd. Abbas (anggota)	----
17. Mr. T. Moh. Hassan (anggota)	----
18. Hamdhani (anggota)	----
19. Ham Ratulangi (anggota)	----
20. Andi Pangeran (anggota)	----
21. I Gusti Ktut Pudja (anggota)	----
22. RAA Wiranatakoesoema (anggota)	anggota
23. Ki Hadjar Dewantara (anggota)	anggota
24. Mr. Kasman Singodimedjo (anggota)	----
25. Sajoeti Melik (anggota)	----
26. Mr. Iwa Koesoema Soemantri (anggota)	----
27. Mr. A. Soebardjo (anggota)	anggota

Catatan : Nomor 22 dan seterusnya adalah anggota tambahan sejak 18 Agustus 1945.

Sumber :

Yamin, Muhd., *Naskah Persiapan Undang-undang Dasar*. Jakarta: CV. Prapanca, 1959.

